



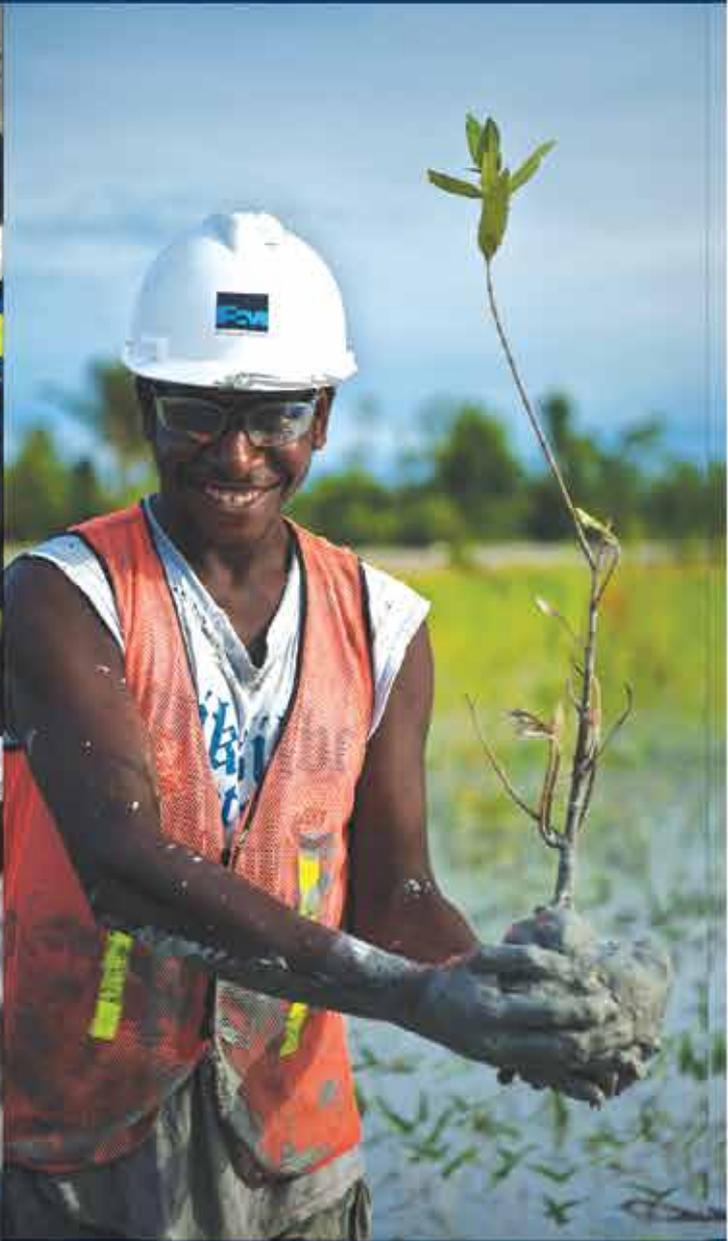
PT FREEPORT INDONESIA

Affiliate of Freeport-McMoRan Copper & Gold

MENGHUBUNGKAN DUNIA

Laporan Berkarya Menuju
Pembangunan Berkelanjutan 2011

TANTANGAN MENDASAR KAMI ADALAH MENCARI CARA-CARA BERPRODUKSI YANG PALING EFEKTIF SEHINGGA MEMUNGKINKAN KAMI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TERHADAP PRODUK-PRODUK KAMI DENGAN PEMBIAYAAN YANG EFEKTIF SEKALIGUS MEMINIMALKAN DAMPAK-DAMPAK NEGATIF.



Freeport Indonesia merupakan salah satu penyedia penting produk-produk yang menopang ekonomi modern. Ribuan usaha di seluruh dunia dan di Indonesia menggunakan berbagai logam yang kami hasilkan untuk menyediakan unsur-unsur prasarana dasar yang menyokong standar kehidupan yang lebih tinggi, termasuk kemajuan teknologi yang mendorong berbagai kelompok masyarakat menuju masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih produktif. Daerah mineral Grasberg kami di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengandung cadangan terbesar dunia, baik untuk tembaga maupun emas. Tembaga, salah satu logam yang paling lama ditambang dan digunakan oleh peradaban, hari ini menjadi lebih penting bagi perekonomian. Logam merah ini esensial bagi prasarana – jaringan pemipaan, perkabelan, konduktivitas, dan konektivitas. Tembaga menjadi penting bagi produk-produk hemat energi dan terbarukan. Emas tidak semata-mata bersinar karena kilaunya, tetapi juga dalam bidang industri dan teknologi untuk sifat-sifat konduktifnya, dan untuk ketangguhannya sebagai sebuah instrumen keuangan global.

Tantangan mendasar kami adalah mencari cara-cara berproduksi yang paling efektif sehingga memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk-produk kami dengan pembiayaan yang efektif sekaligus meminimalkan dampak-dampak negatif. Jika sumber daya tidak diekstraksi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan dan standar masyarakat, kami akan kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan adalah asas yang menjadi landasan kami dalam beroperasi.

Pertambangan tembaga dan emas kami di Provinsi Papua menjembatani manfaat pada tingkat global sebagai tuntutan peradaban dengan perkembangan lokal. Wilayah kami merupakan cerminan di mana terjadi interaksi yang dinamis antara kepentingan lokal dengan perusahaan yang memenuhi kebutuhan dunia. Serangkaian pelajaran berharga dihasilkan dari interaksi antara Freeport Indonesia dengan berbagai pihak. Meskipun serangkaian tantangan baru selalu muncul dari interaksi tersebut, namun, seperti tembaga yang menyalurkan daya listrik untuk tujuan bermakna, dan emas yang melambangkan suatu nilai yang kokoh, Freeport Indonesia mengambil manfaat untuk upaya perbaikan keberadaannya di Indonesia dan berharap pihak lain dapat melihat manfaat yang sama.

DAFTAR ISI

SURAT KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KAMI	05	4 ETIKA BISNIS, MAGANG TERINTEGRASI, KEMITRAAN, PENGEMBANGAN KARIR	36
1 KETERBUKAAN, PERHATIAN, PEMBELAJARAN	06	4.1 PRAKTIK-PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA YANG LAYAK	36
1.1 LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN	06	Kebijakan dan pendekatan	36
Maksud dari Laporan Ini	06	Prinsip Perilaku Bisnis	36
Batasan Laporan	06	Hubungan Ketenagakerjaan	37
Perubahan dan Keterbatasan Pelaporan	06	Kesejahteraan Karyawan	38
Laporan Untuk Pelaporan Berkelanjutan Kami	07	Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	38
Kerangka Pembangunan Berkelanjutan ICMM	07	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	40
Pendekatan Untuk Akuntabilitas	07	Kinerja Keselamatan	40
Menentukan Aspek Penting (Materiality)	07	Kesiapan dan Tanggap Darurat	41
		Fungsi Perusahaan yang Lebih Luas	41
		Kesehatan Kerja	42
2 KEHATI-HATIAN, TEKNOLOGI, PERTUMBUHAN, KEWARGAAN KORPORASI	10	5 KEPATUHAN	46
2.1 PROFIL PERUSAHAAN	10	5.1 HAK ASASI MANUSIA	46
Tentang PT Freeport Indonesia	10	Kebijakan	46
Tentang Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	10	Pelatihan HAM	46
Operasi Aktif dan Proyek Pengembangan yang Utama	10	Tinjauan dan Pemantauan Kepatuhan HAM	47
		Mekanisme Pelaporan	47
		Keamanan	47
2.2 PENDEKATAN KAMI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	12	5.2 HAK-HAK SUKU ASLI	49
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	12	Rekognisi Terhadap Hak Ulayat Tanah	49
Keragaman Pemangku Kepentingan	12	Penanganan Keluhan	50
Partisipasi Aktif dalam Organisasi Industri	13		
Ekstraktif Internasional			
Tatakelola dan Akuntabilitas	13		
Prinsip Perilaku Bisnis	14		
Kebijakan Lingkungan	14		
Kebijakan Audit Lingkungan	14		
Kebijakan Keselamatan & Kesehatan	14		
Kebijakan Hak Asasi Manusia	14		
Kebijakan Komunitas	15		
Tatakelola Korporasi	15		
Kebijakan Anti-Korupsi	15		
Kegiatan dan Kontribusi Politik	15		
Sasaran-sasaran Kinerja	15		
3 PEMBANGUNAN WILAYAH, PENGUATAN KELEMBAGAAN	16	6 PEMBANGUNAN MULTI ASPEK, KOHESI, SOSIAL, JARINGAN KOMPETENSI	52
3.1 DAMPAK EKONOMI	16	6.1 KOMUNITAS	52
3.2 AUDIT, PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN, MONITORING TERSTRUKTUR, PENDIDIKAN LINGKUNGAN	17	Memperluas Hubungan Perusahaan dan Komunitas	53
Lingkungan	17	Membangun Hubungan yang Saling Menguntungkan	53
Perubahan Iklim	17	Pematangan Metode	55
Kepatuhan dan Audit Lingkungan	18	Pematangan Organisasi	55
Pengelolaan Material Pengelolaan Sirsat	18	Kematangan Membangun Jaringan	57
Pengelolaan Bantuan Penutup dan Drainase Batuan Asam	20	Mencari bentuk Pendidikan Yang Tepat	57
Pemantauan Lingkungan	20	Memperluas Jaringan	57
Revegetasi dan Reklamasi	24		
Program Pendidikan Lingkungan	26	6.2 PENGEMBANGAN EKONOMI: LOKAL-NASIONAL	59
Pengelolaan dan Daur Ulang Limbah	27	6.3 PROGRAM EKONOMI BERBASIS DESA	59
Penggunaan Energi	29	Program Perikanan	60
Penggunaan Air	29	program Peternakan	61
Penggunaan Material	29	Program Pertanian & Ketahanan Pangan	61
Gas-Gas Efek Rumah Kaca	29		
Keanekaragaman Hayati	31	6.4 KESEHATAN MASYARAKAT	66
Compliance-Kepatuhan Lingkungan	32	6.5 PELESTARIAN BUDAYA	70
Program Pasca Tambang	32	6.6 PERTAMBANGAN TANPA IZIN	72
Menjaga Keberadaan Material	32	6.7 ETIKA BISNIS DAN KORUPSI	73
Produk	34	Transparansi Pembayaran Pada Pemerintah	73
		6.8 PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN SELAMA 2011	74
		7 DAFTAR SINGKATAN	76
		8 INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT	78

KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KAMI

Di tahun 2011 Freeport Indonesia mengalami periode yang penuh dengan tantangan. Selama kurun waktu tersebut kita menyaksikan suatu dinamika hubungan industrial yang sangat kompleks yang disertai dengan perkembangan situasi keamanan yang kurang kondusif. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap memberikan yang terbaik kepada segenap pemangku kepentingan. Hasil akhir pencapaian produksi selama periode 2011 ditandai dengan produksi tembaga (Cu) sebesar 929,53 juta pon dan produksi emas sebesar 1,48 juta ons.

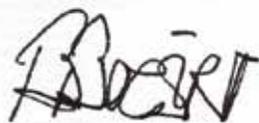
Freeport McMoRan Copper & Gold sebagai perusahaan induk Freeport Indonesia adalah anggota aktif dari International Council of Mining and Metals (ICMM / Dewan Internasional tentang Pertambangan dan Logam), yang mengembangkan

prinsip-prinsip dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang harus dipatuhi oleh perusahaan industri ekstraktif. Kepatuhan terhadap Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan statusnya sebagai negara anggota dari lembaga ini. Upaya ini memerlukan kesungguhan para pemimpin negara dan bisnis untuk menghasilkan laporan yang transparan dan yang mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari operasi industri ekstraktif.

Wilayah operasi kami terletak di Provinsi Papua, suatu provinsi yang masih memerlukan upaya dan fokus yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kami ingin terus memperkuat partisipasi kami dalam pembangunan provinsi ini, antara lain melalui pengintegrasian program internal dan eksternal maupun pencarian aspek strategis yang spesifik untuk menjawab tantangan-tantangan setempat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu program utama kami yaitu pengembangan sumberdaya manusia. Selain pengadaan beasiswa untuk siswa dasar hingga tingkat universitas, peningkatan program telah diarahkan pada pengintegrasian dengan pengembangan metode pengajaran, penguatan institusi pengetahuan, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan pengalamannya dalam program pengembangan komunitas, diharapkan Freeport Indonesia dapat berpartisipasi bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Papua.

Sementara itu, tantangan yang bersifat global juga mendapat perhatian pada tingkat pengoperasian lokal. Dalam laporan ini akan ditemukan uraian tentang upaya Freeport Indonesia dalam menangani aspek-aspek pengelolaan limbah, keragaman biota, ketahanan pangan, hingga efisiensi penggunaan sumberdaya alam. Beberapa di antaranya tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan tetapi juga dikaitkan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Untuk ke depan, kami berharap bahwa tindakan berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan kegiatan utama operasi kita ini dapat lebih terintegrasi dalam program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Hormat kami,



Rozik B. Soetjipto

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia



1.1

LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

MAKSUD DARI LAPORAN INI

Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan (*Working Toward Sustainable Development / WTSD*) ini memberikan sebuah rangkuman kemajuan yang dicapai dari hal-hal yang paling nyata dan kesempatan-kesempatan yang dihadapi dalam pencarian kami untuk menyediakan logam-logam esensial bagi masyarakat. Kami memusatkan perhatian pada ranah kepentingan utama para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional yang menuntut agar keberhasilan usaha kami dicapai melalui kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial.

Selain menjunjung akuntabilitas berkala bagi pemangku kepentingan kami, laporan ini juga memiliki sebuah sasaran penting lain. Laporan ini merupakan bagian dari pengelolaan pengetahuan perusahaan untuk memperoleh masukan, menyusun ulang hasil pembelajaran, dan mengkomunikasikan pelbagai hasil pemikiran. Harapan kami, berbagai organisasi lain akan memperoleh sejumlah manfaat dari pengalaman kami. Masukan dari para pemangku kepentingan juga memungkinkan kami untuk meningkatkan kinerja dan pelaporan ke depan.

BATASAN LAPORAN

Data yang disajikan pada laporan ini mencakup berbagai operasi utama dari Freeport Indonesia selama periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011 yang disampaikan satu kali setiap tahunnya. Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan Freeport Indonesia terakhir dikeluarkan pada tahun 2009 bagi periode pelaporan 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Data tidak termasuk para mitra kerja sama operasi seperti perusahaan kontraktor dan perusahaan induk, FCX.

Program keberlanjutan kami lebih banyak fokus pada pengembangan di wilayah yang langsung berdekatan dengan daerah operasi, di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Namun terdapat beberapa program bekerjasama dengan mitra kerja Freeport Indonesia untuk dilaksanakan di Provinsi Papua bahkan tingkat nasional dan internasional. Apa yang dilaporkan disini adalah tentang kegiatan dan hasil dari program tersebut dari sudut pembangunan berkelanjutan.

Penyajian dan perbandingan data tertentu mungkin saja tidak memenuhi kebutuhan langsung para pemangku kepentingan, dan kami mengundang para pembaca untuk menghubungi Departemen Komunikasi Perusahaan kami di corporate_communications@fmi.com menyangkut pelbagai pertanyaan tentang pelaporan kami.

PERUBAHAN DAN KETERBATASAN PELAPORAN

Karena kami menggunakan pendekatan pelaporan yang menekankan pembelajaran, beberapa data dan informasi dalam laporan ini sesuai dengan Global Reporting Indicator (GRI) G3.0 termasuk diantaranya suplemen pertambangan dan logam. Beberapa program akan mendapat perhatian lebih besar daripada yang lain karena perlu disampaikan tantangan keberlanjutannya.

LAPORAN UNTUK PELAPORAN BERKELANJUTAN KAMI

Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan tahunan Freeport Indonesia telah berkembang untuk memberikan derajat pemaparan yang terus meningkat sebagai tanggapan terhadap umpan balik pemangku kepentingan kami dan sesuai dengan pelaporan keberlanjutan di tingkat kelompok usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Laporan tahun 2011 ini dibuat sesuai dengan panduan pelaporan GRI G3.0.

Laporan ini berupaya menggunakan selengkap mungkin indikator dalam Panduan GRI G3.0. Namun untuk menjadikan laporan, kami lebih dari sekedar mengikuti standar GRI yang telah diterima secara global. Kami menyusunnya dalam suatu format yang dapat memberi tekanan tentang aspek berkelanjutan yang menjadi perhatian penting perusahaan kami.

KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ICMC

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. melaksanakan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan *International Council on Mining & Metals* (ICMM), termasuk pelaksanaan dari 10 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di seluruh perusahaan. Jaminan eksternal Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., tahun 2011 dilakukan oleh Corporate Integrity sesuai dengan Prosedur Jaminan Kerangka Berkelanjutan ICMM. Jaminan ini mencakup semua operasi dalam batas Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Freeport Indonesia. Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tahun 2011, termasuk pernyataan jaminan, dapat dilihat di www.fcx.com.

Program Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. untuk jaminan eksternal dari Kerangka Pembangunan Berkelanjutan ICMM termasuk kunjungan ke semua wilayah operasi penambangan dan pengolahan utama dengan pendekatan bertahap berdasarkan penilaian resiko keberlanjutan perusahaan. Freeport Indonesia adalah salah satu wilayah operasi pertama yang melaksanakan kunjungan wilayah untuk periode pelaporan 2009.

PENDEKATAN UNTUK AKUNTABILITAS

Untuk meningkatkan akuntabilitas, laporan berkelanjutan ini menggunakan metode kontekstualisasi dimana diangkat berbagai persoalan yang kami atau para pemangku kepentingan anggap sebagai isu penting. Dalam konteks persoalan kesejahteraan masyarakat inilah penjelasan mengenai kebijakan Freeport Indonesia dinilai. Bahkan kami juga akan melaporkan isu yang muncul tentang manfaat suatu program dan bagaimana ini menjadi pertimbangan dalam perbaikan. Dengan demikian pembaca dapat menilai apakah terjadi perkembangan program pada tahun-tahun berikutnya dalam menangani suatu isu. Program yang ditampilkan akan diupayakan dinilai dalam kerangka pencapaian aspek keberlanjutan dari aspek lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan ekonomi secara bersama. Hal ini sejalan dengan arah dari pelembagaan GRI dimana salah satu fokusnya adalah mencari indikator yang dapat menunjukkan hubungan antara ketiga wilayah tadi dalam indikator yang lebih teruji.

Terakhir, kami berharap bahwa laporan ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan pengembangan kesejahteraan. Untuk itu kami memilih beberapa di antaranya sehingga uraian lebih rinci tentang bagaimana program tersebut berkembang dalam upaya menghadapi tantangan yang ada.

MENENTUKAN ASPEK PENTING (MATERIALITY)

Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang mempunyai kegiatan berskala luas. Dengan demikian, perusahaan menghadapi sangat banyak isu yang berkaitan dengan masalah keberlanjutan.

Sepanjang 2011, Freeport Indonesia berubah menuju suatu sistem pengelolaan yang formal untuk mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang penting dan konsisten dengan program keberlanjutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. *Sustainable Development Risk Register* (SDRR/Daftar Risiko Pembangunan Berkelanjutan) yang baru, membantu kami mengidentifikasi berbagai risiko dan kesempatan utama lintas-spektrum lingkungan, sosial, dan ekonomi. Cakupan dari bahasan yang kami nilai ditentukan melalui suatu evaluasi yang sistematis terhadap nilai penting mereka bagi usaha kami dan bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Agar inklusif, dalam proses ini kami

Tantangan Utama Terhadap Keberlanjutan	
PETI Hal 72	Di Freeport Indonesia, penambang tradisional tanpa izin (PETI) atau penambang liar menjalankan kegiatannya di dalam wilayah kerja perusahaan maupun areal pendukung. Para penambang tersebut memiliki peralatan dan keahlian terbatas ketika melakukan kegiatannya di kawasan rawan, yang berpotensi menimbulkan resiko terhadap lingkungan hidup, selain membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Bersama pihak yang berwajib, kami berupaya meningkatkan kesadaran para penambang tersebut untuk mencari penyelesaian guna memperkecil resiko terkait masalah yang cukup rumit ini.
Peran Serta dan Pengembangan Masyarakat Hal 59	Kami percaya bahwa berbagai program pengembangan sosial dan ekonomi yang kami jalankan cukup tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan berperan dalam memelihara hubungan baik kami dengan masyarakat serta menghindari gangguan terhadap kegiatan kami. Namun demikian, tuntutan sosial maupun kondisi labil disekitar wilayah kerja kami dapat berdampak negatif terhadap kegiatan kami. Kami telah menganut berbagai kebijakan terancang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktek dan program kami dengan cara yang menjunjung budaya masyarakat setempat serta memperlancar pengembangan kapasitas berjangka panjang.
Korupsi Hal 73	Kami menyelenggarakan kegiatan pertambangan di Indonesia. Dengan demikian permasalahan korupsi dapat berdampak buruk terhadap usaha kami. Pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi berpotensi berdampak pada sanksi pidana, denda yang cukup besar, maupun hukuman penjara. Selain itu pelanggaran hukum anti korupsi dapat menimbulkan kerugian cukup signifikan terhadap nama baik. FCX telah menetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Program Kepatuhan guna membimbing karyawan, konsultan, agen serta pihak ketiga lainnya untuk mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang anti korupsi yang berlaku.
Energi dan Gas Rumah Kaca Hal 29	Berbagai persyaratan peraturan baru maupun undang-undang terkait emisi gas rumah kaca berpotensi menimbulkan resiko peningkatan biaya bahan baku dan energi. Biaya energi adalah sekitar 21 persen dari biaya produksi tembaga terkonsolidasi FCX, termasuk Freeport Indonesia, dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat. Ketidakmampuan memperoleh pasokan energi yang cukup dengan harga yang layak dapat berdampak negatif bagi laba, arus kas, dan peluang pertumbuhan.
Kesehatan dan Keselamatan Hal 40	Kendati kami mengalami satu tahun lagi dengan angka jumlah kecelakaan terekam (<i>Total Recordable Incident Rate</i>) yang lebih baik, di tahun 2011 ini terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan empat kematian di tempat kerja. Kami tetap meningkatkan upaya pencegahan kematian dengan melakukan identifikasi terhadap tanda-tanda awal kejadian kecelakaan berat, serta memperhatikan potensi-potensi bahaya guna mengantisipasi kecelakaan.

mempertimbangkan umpan balik dari berbagai proses kegiatan keseharian kami, pelbagai peraturan yang muncul, praktik terbaik industri, dan berbagai kecenderungan yang ditelusuri oleh pelbagai media massa, organisasi non-pemerintah (ornop), dan peneliti.

Melalui proses SDRR di atas berikut adalah isu keberlanjutan yang telah kami identifikasi dan mendapatkan perhatian besar dalam penanganannya:

<p>Hubungan Tenaga Kerja Hal 36</p>	<p>Kinerja usaha kami berpotensi terkena dampak dari berkurangnya produktifitas secara signifikan maupun aksi mogok kerja yang berkepanjangan. Selama 2011, Freeport Indonesia terkena dampak buruk dari gangguan tenaga kerja, termasuk aksi penghentian kerja selama delapan hari pada bulan Juli 2011 dan aksi mogok selama kurang lebih tiga bulan yang baru berakhir di bulan Desember 2011 serta dicapai kesepakatan pada Januari 2012. Aksi mogok tersebut disertai kerusuhan, pemblokiran jalan, tindakan sabotase terhadap sarana operasional penting, dan juga tindakan kekerasan. Ini merupakan pertama kalinya kami mengalami gangguan semacam ini sepanjang masa operasi kami selama 40 tahun lebih.</p>
<p>Kesehatan Masyarakat Hal 66</p>	<p>Berbagai penyakit seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC dapat menimbulkan dampak sangat besar bagi masyarakat setempat, termasuk anggota tenaga kerja kami. Kami giat melakukan upaya penanggulangan dampak terhadap kesehatan masyarakat disekitar wilayah operasi kami ketika masih terbatasnya sumber daya pemerintah setempat.</p>
<p>Keamanan dan HAM Hal 46</p>	<p>Kami telah mengidentifikasi berbagai risiko hak asasi manusia di Indonesia. Sejak Juli 2009 hingga Februari 2012, telah terjadi 32 kasus penembakan di dalam dan sekitar wilayah pertambangan Grasberg, termasuk sepanjang jalan menuju kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan, yang mengakibatkan 15 kematian dan 56 orang mengalami cedera. Keselamatan karyawan menjadi perhatian kami yang sangat utama, dan Freeport Indonesia tengah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan tersebut. Keamanan merupakan persyaratan dari kegiatan operasional yang normal. Kami menjadi anggota aktif dari <i>Voluntary Principles on Security and Human Rights</i> (Asas-asas Sukarela tentang Keamanan dan HAM) serta bertekad terus meningkatkan program HAM kami.</p>
<p>Pengelolaan Sirsat dan Limbah Batuan Hal 18</p>	<p>Kami menyelenggarakan tata pengelolaan terhadap dampak fisik maupun kimia dari Sirsat dan limbah batuan, termasuk terhadap stabilitas, kemungkinan tumpahan, penimbunan debu dan dampak terhadap air tanah maupun air permukaan. Program pengelolaan Sirsat yang dilakukan oleh FCX mencakup penyelenggaraan audit lapangan setidaknya sekali setiap dua tahun terhadap sarana Sirsat yang aktif.</p>
<p>Dampak Terhadap Air Hal 20</p>	<p>Keberadaan udara, air dan bakteri yang terjadi secara alami dapat menyebabkan sejumlah bahan galian untuk menimbulkan air asam tambang yang apabila tidak terkelola dengan baik berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Kami mengalokasikan sumber daya cukup besar bagi penanggulangan berbagai masalah kualitas air yang secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan kami maupun terhadap pemangku kepentingan.</p>
<p>Pasokan Air Hal 29</p>	<p>Kegiatan kami menuntut pasokan air dalam jumlah yang signifikan untuk keperluan pertambangan, pengolahan bijih, dan sarana pendukung yang terkait. Kegiatan operasi kami di Amerika Utara dan Amerika Selatan berada di kawasan yang langka air sehingga terjadi persaingan antara para pengguna air termasuk masyarakat setempat untuk memperoleh akses tetap terhadap sumber air. Kami tengah bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai strategi persediaan air pada saat ini maupun di masa depan, termasuk menajagi upaya desalinasi air dan pemanfaatan air limbah.</p>

2.1

PROFIL PERUSAHAAN

TENTANG FREEPORT INDONESIA

Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Freeport Indonesia mengeksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kami beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Kami memasarkan berbagai konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seantero dunia.

Kompleks pertambangan Grasberg kami merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas tunggal terbesar dunia, sekaligus mengandung sejumlah cadangan tembaga tambang ulang terbesar dan cadangan emas tunggal terbesar dunia. Grasberg merupakan jantung dari daerah mineral yang berprospek tinggi tempat eksplorasi yang terus berjalan memberikan kesempatan berlanjut bagi cadangan-cadangan kami yang berumur panjang.

TENTANG FREEPORT-McMORAN COPPER & GOLD INC.

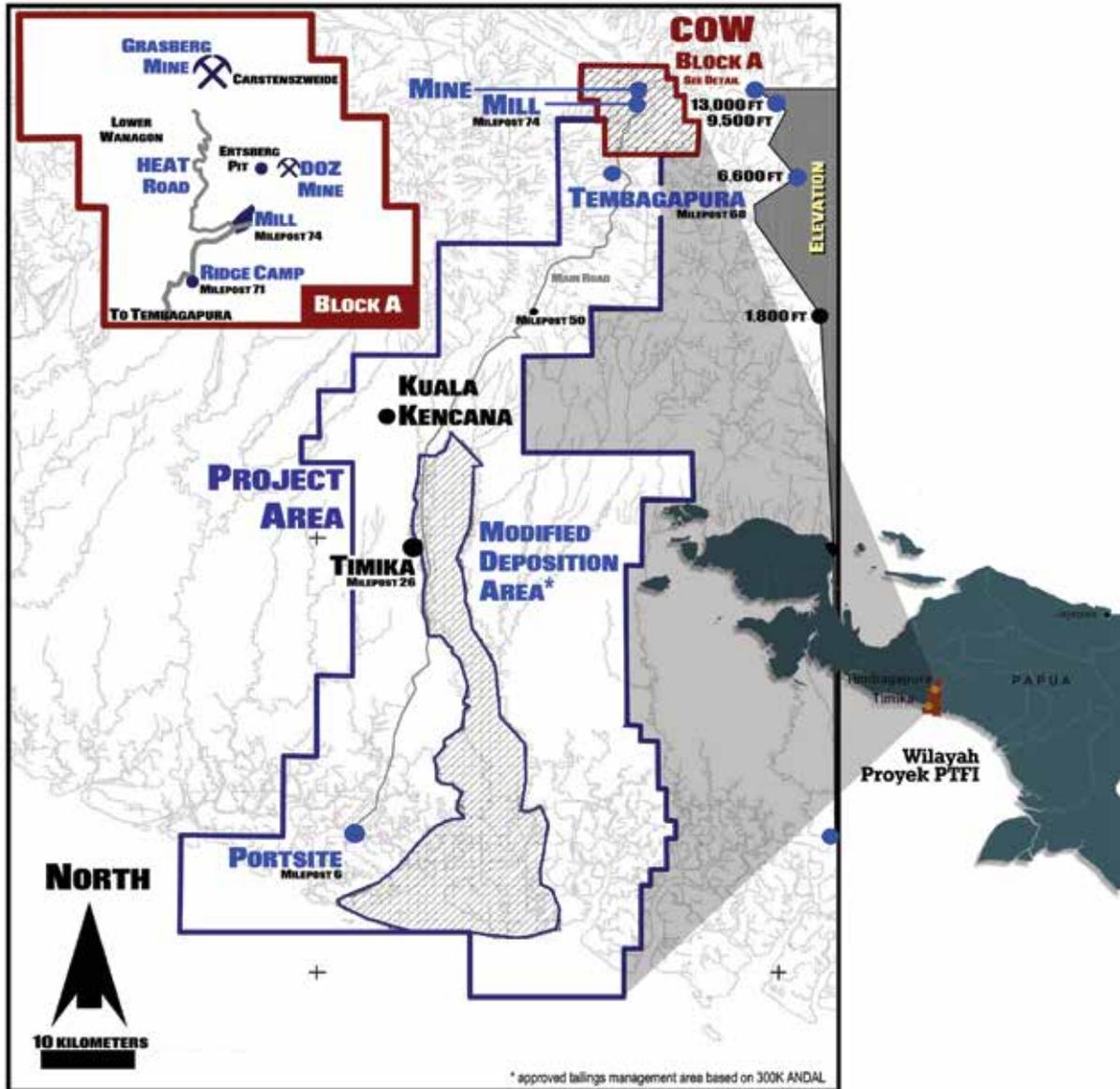
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) merupakan sebuah perusahaan pertambangan internasional terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, U.S.A. FCX mengoperasikan aset-aset besar, berumur panjang, dan yang secara geografis beragam di empat benua, dengan cadangan-cadangan tembaga, emas, dan molibdenum yang jelas ada dan berpotensi. Dari pegunungan khatulistiwa Papua, Indonesia, gurun Barat Daya Amerika Serikat, pegunungan berapi yang agung Peru, wilayah-wilayah penghasil tembaga tradisional Chile, sampai berbagai kesempatan menggembirakan yang muncul di Republik Demokratik Kongo, kami berada di garis depan dalam penyediaan pelbagai logam yang esensial bagi dunia.

FCX merupakan perusahaan perdagangan umum tembaga terbesar dunia, produsen molibdenum – suatu logam yang digunakan dalam berbagai logam campuran baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi bahan pelumas terkemuka dunia, dan salah satu penghasil besar emas. Sebagai salah satu pemimpin industri, kami menunjukkan keahlian yang terbukti, baik menyangkut teknologi maupun metode produksi untuk menghasilkan tembaga, emas, dan molibdenum.

Aset FCX termasuk wilayah tambang Grasberg, tambang tembaga dan emas terbesar di dunia dalam hal cadangan yang dapat dipulihkan; operasi pertambangan yang signifikan di Amerika, termasuk tambang mineral skala besar di Morenci dan Safford, Amerika Utara dan wilayah operasi Verde Cerro dan El Abra di Amerika Selatan; dan tambang mineral Fungurume Tenke di Republik Demokratik Kongo. Informasi tambahan tentang FCX tersedia di situs FCX di www.fcx.com.

OPERASI AKTIF DAN PROYEK PENGEMBANGAN YANG UTAMA

Freeport Indonesia sedang mengembangkan beberapa proyek kapital di wilayah pertambangan Grasberg, meliputi pembangunan jalur penambangan bawah tanah berskala besar dan tingkat tinggi yang terletak di bawah dan bersebelahan dengan tambang terbuka Grasberg. Proyek lain juga berlangsung yaitu pengembangan lanjutan infrastruktur umum, Grasberg Block Cave dan tambang bawah tanah, *Deep Mill Level Zone* [*underground mine*].



Mega Shop, adalah bengkel besar untuk pekerjaan perawatan, merakit dan penggantian komponen mesin dari alat-alat berat untuk mendukung kegiatan penambangan di Grasberg.



Kegiatan operasional kami di bawah tanah adalah proyek masa depan Freeport Indonesia setelah tambang terbuka Grasberg selesai.

2.2

PENDEKATAN KAMI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Beberapa program keberlanjutan Freeport Indonesia yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial pada awalnya didirikan untuk mencapai tujuan spesifik. Dalam perkembangannya, kami dan juga pemangku kepentingan menilai bahwa beberapa program sebaiknya digabung, disandingkan atau disederhanakan satu dengan yang lain. Pembuatan Dokumen Rencana Strategis Program Pengembangan Masyarakat Freeport Indonesia 2009-2014, yang berisikan panduan bagi karyawan Freeport Indonesia Departemen *Social Outreach & Local Development/Community Relation (SLD/CR)* dalam melaksanakan tugas dan target yang harus dicapai Rancangan integrasi antar program pengembangan masyarakat yang dikelola oleh SLD/CR dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK).

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Freeport Indonesia bekerja erat dengan berbagai individu, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, dan mitra usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini dan merencanakan kebutuhan hari esok. Sebagaimana disampaikan di seluruh bagian laporan ini, para pemangku kami memiliki berbagai tingkat kepentingan dan derajat pengaruh yang berbeda-beda terhadap isu-isu sehubungan keberlanjutan. Kami melibatkan diri pada tingkat lokal melalui kelompok dan dewan komunitas, serta pertemuan, lokakarya, dan presentasi berkala. Sejumlah bentuk hubungan ini menjadi bagian dari kesepakatan dan kemitraan yang berlanjut; yang lainnya adalah kesempatan-kesempatan baru untuk menjelajahi masalah atau perhatian utama. Departemen Komunikasi Perusahaan (*Corporate Communications Department*) kami juga memberikan tanggapan pada pertanyaan yang diterima melalui surat, internet, telepon, dan pertemuan langsung.

Komunitas-komunitas menjadi titik pusat untuk berbagai kegiatan yang melibatkan para pihak eksternal karena keberhasilan operasi-operasi kami sangat bergantung pada pemahaman tentang lingkungan sosial di mana kami beroperasi. Di Freeport Indonesia, berbagai masyarakat asli menjadi kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama, termasuk sejumlah suku di Papua. Kami berusaha untuk melibatkan mereka melalui kepemimpinan lokal, pelatihan dan dialog, lokakarya, interaksi perseorangan, dan program-program kemasyarakatan.

KERAGAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan kami meliputi kelompok yang beragam. Beberapa di antaranya sangat aktif dan dapat merumuskan dengan baik pandangan mereka. Beberapa yang lain mempunyai cara penyampaian yang spesifik. Beberapa yang lain, antara lain karena perbedaan latar belakang sosial, mengalami kesukaran dalam penyampaian meskipun kepentingannya sangat mendesak. Keragaman ini membutuhkan cara yang berbeda dan perusahaan harus mengembangkan cara yang tepat untuk dapat mencapai interaksi sosial yang sehat dan efektif. Dalam perkembangannya, interaksi ini tidak statis dan merupakan tantangan untuk menemukan bentuk yang lebih tepat. Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam rangka memperbaiki interaksi dengan para pemangku kepentingan kami yaitu: Pertama, untuk mengembangkan pemahaman yang sama tentang bagaimana mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat di tengah sumber daya yang ada batasnya dan keterdesakan persoalan kesejahteraan. Kedua, kesepakatan tentang metode pengembangan akuntabilitas program. Ketiga, bagaimana mengembangkan kerja sama yang lebih efektif antara para pemangku kepentingan dalam program-program Freeport Indonesia.

**PARTISIPASI AKTIF
DALAM ORGANISASI
INDUSTRI EKSTRAKTIF
INTERNASIONAL**

Selain beberapa organisasi internasional yang terkait dalam penguatan etika bisnis, Freeport Indonesia sebagai bagian dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. menjadi anggota dari dua organisasi penting terkait dalam upaya internasional untuk mengarahkan dan mengontrol keberadaan industri tambang agar menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut adalah:

**KERANGKA KERJA
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DI BAWAH
INTERNATIONAL
COUNCIL ON
MINING AND
METALS**

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. melaksanakan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan *International Council on Mining & Metals* (ICMM), termasuk pelaksanaan dari 10 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di seluruh perusahaan. Jaminan eksternal Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tahun 2011 dilakukan oleh Corporate Integrity sesuai dengan Prosedur Jaminan Kerangka Berkelanjutan ICMM. Jaminan ini mencakup semua operasi dalam batas laporan WTSD, termasuk Freeport Indonesia. Laporan WTSD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tahun 2011, termasuk pernyataan jaminan, dapat dilihat di www.fcx.com.

Program Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. untuk jaminan eksternal dari Kerangka Pembangunan Berkelanjutan ICMM termasuk kunjungan ke semua wilayah operasi penambangan dan pengolahan utama dengan pendekatan bertahap berdasarkan penilaian resiko keberlanjutan perusahaan. Freeport Indonesia adalah salah satu wilayah operasi pertama yang melaksanakan kunjungan wilayah untuk periode pelaporan 2009.

**EXTRACTIVE
INDUSTRIES
TRANSPARENCY
INITIATIVE**

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. selaku induk perusahaan Freeport Indonesia merupakan anggota pendukung skema *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI, Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif). Freeport Indonesia juga aktif dalam perumusan EITI di Indonesia. Sasarannya adalah memperkuat tata kelola dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif. Ini mendukung tata kelola yang lebih baik di negara-negara yang kaya sumber daya alam melalui verifikasi dan publikasi menyeluruh tentang pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas, dan pertambangan ([web: www.eiti.org](http://web:www.eiti.org)). Selain telah melakukan kewajiban yang sejalan dengan persyaratan EITI, yaitu melaporkan secara publik semua pembayaran pada pemerintah Indonesia dan juga pada masyarakat, Indonesia sendiri baru-baru ini telah menandatangani nota kesepahaman untuk menyiapkan pelaksanaan EITI. Dengan demikian, saat ini Indonesia mendapat status sebagai negara kandidat anggota pendukung EITI. Status ini dapat dicabut oleh intitusi EITI jika suatu negara tidak memperlihatkan kemajuan dalam mempersiapkan pelaksanaan EITI. Freeport Indonesia memahami bahwa upaya pemerintah ini harus didukung oleh perusahaan tambang yang ada.

Selain dukungan dan partisipasi aktif Freeport Indonesia dalam program EITI di Indonesia, Freeport Indonesia juga telah secara sukarela melaporkan manfaat langsung yang diterima oleh pemerintah Indonesia berupa pembayaran kepada Pemerintah Indonesia yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya.

**TATAKELOLA DAN
AKUNTABILITAS**

Komisi Kebijakan Publik dari Dewan Direksi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan Dewan dalam hal 1) program lingkungan; 2) program hubungan dengan pemerintah dan komunitas; 3) kebijakan dan praktik sosial, lapangan pekerjaan, dan hak asasi manusia; 4) program kesehatan dan keselamatan kerja; dan 5) sumbangan amal dan derma perusahaan melalui pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang komprehensif.

Freeport Indonesia, melalui perusahaan induknya, turut menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan Kerja dan Hak Asasi Manusia (*Voluntary Principles on Security and Human Rights*) Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Inggris. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasi kami secara konsisten dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa, aturan perundang-undangan Indonesia, dan budaya masyarakat asli di daerah-daerah operasi perusahaan. Kami mendukung EITI; membuat sebuah komitmen internasional untuk memaparkan secara terbuka pendapatan dan pembayaran kepada pemerintah.

PRINSIP PERILAKU BISNIS

Pendekatan kami untuk pembangunan berkelanjutan didasarkan pada nilai-nilai menyeluruh dalam Prinsip-Prinsip Perilaku Bisnis. Hal ini telah menetapkan sebuah prinsip yang berlaku global bahwa tenaga kerja, kontraktor, serta jajaran direksi maupun komisioner kami harus mengikuti semua kegiatan – mulai dari menghindari konflik kepentingan hingga mengembangkan hubungan yang positif dengan komunitas lokal. Kebijakan pendukung kami, bersama dengan standar dan inisiatif eksternal, membentuk suatu kerangka menyeluruh yang menjadi panduan program keberlanjutan kami. Mendukung kerangka ini adalah tata kelola internal dan sistem manajemen yang memberikan rincian penting tentang bagaimana kita beroperasi untuk mencapai kesuksesan bisnis yang bertanggung jawab.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Kebijakan ini menjadi kerangka pedoman untuk mengurangi dampak lingkungan, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan di area tempat kami beroperasi, mentaati semua peraturan yang berlaku, dan berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kebijakan tersebut termasuk pula komitmen untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 bagi semua sarana operasional, yang telah kami capai; mengenal dan melindungi keanekaragaman hayati; dan melindungi serta melakukan remediasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab kami.

KEBIJAKAN AUDIT LINGKUNGAN

Program korporasi yang efektif untuk melakukan audit lingkungan berguna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, selain keyakinan kami bahwa resiko yang timbul dari permasalahan lingkungan yang buruk memang tengah kami tanggulangi. Kebijakan Audit Lingkungan Hidup kami mewajibkan agar semua aset besar kami di seluruh dunia menjalani audit internal setidaknya setiap dua tahun sekali, selain merinci prosedur audit lebih jauh.

KEBIJAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN

Kebijakan ini menjabarkan tujuan kami untuk mencapai angka kematian nihil, menurunkan tingkat kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, serta menetapkan tolok ukur untuk evaluasi kinerja kami dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan tersebut juga memperkuat dan menegaskan pelaksanaan audit keselamatan dan kesehatan kerja pada semua sarana.

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Kebijakan ini, yang belum lama berselang telah diperbaharui untuk mencakup jejak rekam kami yang lebih mendunia, menggariskan komitmen kami untuk mengakui dan mengedepankan hak asasi manusia dimanapun kami melakukan kegiatan usaha. Kami berkomitmen untuk menjalankan operasi kami dengan cara yang menjamin agar setiap karyawan memperlakukan semua orang di dalam dan di sekitar kegiatan operasi kami dengan hormat dan bermartabat.



Pelatihan tentang HAM diberikan kepada seluruh karyawan Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor, termasuk petugas keamanan pemerintah yang ditugaskan di wilayah kerja Freeport Indonesia.

KEBIJAKAN KOMUNITAS

Kami menjalankan kegiatan kami dengan cara yang mengedepankan hubungan yang positif dan terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendukung manfaat berkelanjutan di manapun kami beroperasi, selama siklus usia suatu proyek. Belum lama ini kami memperbaharui kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa kami mengidentifikasi, menghindari dan mengurangi dampak kepada masyarakat dan mendukung peluang untuk bermitra dengan masyarakat lokal untuk mendorong pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk membaca kebijakan-kebijakan dimaksud secara lengkap, silahkan mengunjungi www.ptfi.com.

TATA KELOLA KORPORASI

Komite Kebijakan Publik Dewan Direksi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sebagai induk perusahaan Freeport Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi program-program pembangunan berkelanjutan kami. Komite tersebut mengkaji data kinerja utama dan menerima penjelasan mengenai tantangan hal keberlanjutan dan isu-isu yang muncul. Selama 2011, Komite Kebijakan Publik menerima berbagai laporan dan hal termasuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja, tanggung jawab lingkungan dan proyek perbaikan, pelaksanaan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, program kesehatan di Freeport Indonesia dan Tenke Fungurume Mining (TFM) dan program sosial serta investasi terhadap masyarakat di seluruh dunia. Komite Kebijakan Publik melapor kepada Dewan Direksi, yang melaksanakan pengawasan global pada semua hal, termasuk kelangsungan Perusahaan kami secara ekonomi yang merupakan elemen pertama dari pendekatan kami untuk pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia hanya perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di bursa saham yang wajib memiliki Komisioner Independen dan karena Freeport Indonesia merupakan perusahaan swasta yang belum secara publik terdaftar di bursa saham maka Freeport Indonesia tidak wajib memiliki anggota komisioner yang independen.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

Kebijakan anti korupsi kami bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan pada U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 serta juga peraturan lain yang relevan, termasuk peraturan yang ada di Indonesia.

KEGIATAN DAN KONTRIBUSI POLITIK

Isu-isu utama di mana Perusahaan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik termasuk regulasi industri pertambangan, peraturan lingkungan, hak memanfaatkan air, akses lahan, pajak bisnis dan hukum perdagangan. Semua kegiatan lobi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada calon perseorangan untuk jabatan politik, partai politik atau organisasi untuk pemilihan calon tertentu untuk setiap jabatan politik dalam setiap yurisdiksi.

SASARAN-SASARAN KINERJA

Penetapan sasaran-sasaran untuk segenap perusahaan menciptakan sebuah kesadaran tentang isu-isu industrial yang penting yang sedang kami tangani dan mendorong berbagi praktik mutakhir melampaui batas-batas lokal menyangkut suatu Sistem Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Pelibatan Masyarakat pada sebuah kawasan.

Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 2011 Freeport Indonesia berusaha mempertahankan fokus sebagaimana yang dilaporkan untuk 2010. Sasaran-sasaran kinerja kami berdasarkan pada penjualan tembaga dan emas, serta panduan arus kas pengoperasian yang disediakan bagi para pemangku kepentingan dalam rilis pendapatan triwulan pertama kami pada 2011. Sasaran-sasaran produksi dan keuangan ini tunduk pada perubahan berdasarkan kondisi pasar.

3.1

DAMPAK EKONOMI

Freeport Indonesia mengukur dampak ekonominya dari pembayaran wajib perusahaan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta kontribusi finansial yang dialokasikan bagi masyarakat lokal, program kemasyarakatan dan lingkungan, investasi sosial dan infrastruktur. Untuk tingkat lokal sedang dikembangkan pengukuran efektifitas program dari sudut sosial dan efektifitas dalam mencapai tujuan.

Freeport Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi pemerintah pusat, provinsi, dan lokal di Indonesia, dan bagi ekonomi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Manfaat-manfaat langsung bagi Pemerintah Indonesia itu mencakup pajak, royalti, dividen, pembiayaan, dan dukungan langsung lainnya. Kami merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Papua dan salah satu pembayar pajak terbesar di negeri ini. Selama 2011, manfaat langsung Freeport Indonesia mencapai kurang lebih 2,4 milyar dolar AS. Semenjak kontrak karya kedua kami dengan Pemerintah Indonesia pada 1992, manfaat-manfaat langsung bagi Indonesia ini telah mencapai lebih daripada 13.8 milyar dolar AS.

Kontribusi langsung bagi Indonesia mencakup investasi dalam pembangunan prasarana di Provinsi Papua, seperti pusat-pusat permukiman, pembangkit tenaga listrik, bandar udara dan laut, jalan raya, jembatan, sarana instalasi pengolahan limbah, dan sistem komunikasi modern. Prasarana sosial yang disediakan oleh perusahaan mencakup sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, rumah ibadah, sarana rekreasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Freeport Indonesia telah berinvestasi sebesar 7,7 milyar dolar AS dalam infrastruktur.

Di dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani bersama Gubernur Papua, Freeport Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbang pasir sisa tambang (Sirsat) sebagai bahan bangunan dalam pembangunan prasarana di Provinsi Papua, termasuk untuk jalan raya dan sarana umum.

Selain itu Freeport Indonesia berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 1 persen dari pendapatan kotor perusahaan bagi pengembangan wilayah suku-suku yang digunakan dalam pengoperasian khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik ulayat. Pada tahun 2011 dana sebesar 54,4 juta dolar AS telah dialokasikan lewat program Dana Kemitraan Freeport untuk Pengembangan Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK). LPMK dalam pengelolaannya bermitra dengan Pemerintah Daerah, ornop, dan mitra-mitra masyarakat untuk mendukung pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam komunitas-komunitas lokal.

Pada tahun 2011, Freeport Indonesia berkontribusi 98,4 juta dolar AS dalam berbagai prakarsa investasi komunitas termasuk sumbangan tunai, program dan layanan masyarakat yang langsung dikelola oleh Freeport Indonesia, Dana Kemitraan, investasi prasarana serta biaya staf dan kegiatan sosial.

3.2

AUDIT, PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN, MONITORING TERSTRUKTUR, PENDIDIKAN LINGKUNGAN

LINGKUNGAN

Freeport Indonesia berkomitmen untuk mengelola dan meminimalkan dampak dari operasi-operasi kami terhadap lingkungan sekitar, melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan, dan secara terus-menerus memperbaiki kinerja kami. Sebagai bagian dari Kebijakan Lingkungan kami, kami menerapkan strategi-strategi pengelolaan risiko berdasarkan data yang sah dan ilmu pengetahuan yang mumpuni.

Kami secara rutin menjalankan audit lingkungan internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan, sistem dan praktik pengelolaan lingkungan kami. Seluruh karyawan dalam organisasi kami bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga lingkungan dan mengembangkan rencana aksi berdasarkan hasil audit.

Program lingkungan kami dipandu oleh persyaratan-persyaratan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kami, yang diserahkan kepada Pemerintah setiap tahun sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kami, serta oleh persyaratan-persyaratan peraturan dan izin-izin terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Program lingkungan kami dalam perkembangannya dikaitkan dengan program ketahanan pangan dan ekonomi serta pendidikan. Hal ini sangat penting mengingat minimnya perkembangan sosial ekonomi wilayah. Ke depan, upaya pencarian model yang menyatukan berbagai tujuan lingkungan dan kesejahteraan harus diperkuat. Semakin kompleksnya tujuan yang ingin dicapai, dibutuhkan berbagai kerja sama dengan pihak lain dilakukan, seperti dengan universitas, lembaga agama, dan pemerintah daerah.

PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim adalah topik yang umum dan menjadi minat yang besar serta perdebatan bagi pemerintah, sektor swasta, analis, investor dan akademisi yang bertanggung jawab secara sosial. Bagi perusahaan kami, potensi risiko yang terkait dengan topik perubahan iklim termasuk diantaranya peraturan mengenai potensi emisi gas rumah kaca dan biaya terkait yang meningkat dari bahan bakar dan listrik yang dibeli. Selanjutnya, operasi kami memerlukan air dalam jumlah yang besar dan kekurangan pasokan air dapat berdampak negatif terhadap biaya kami, produksi dan kinerja keuangan.

Inti Es Menyimpan Catatan Penting Mengenai Perubahan Iklim

Sebuah tim ilmuwan iklim global (kanan) berkumpul di gletser yang terletak di khatulistiwa di dekat lokasi operasi Freeport Indonesia pada tahun 2010 untuk mengambil inti es yang dapat memberikan informasi ilmiah yang berharga tentang sejarah perubahan iklim dunia dan kejadian lingkungan lainnya. Profesor Lonnie G. Thompson, pimpinan tim dari Ice Core Paleoclimate Research Group di Ohio State University Byrd Polar Research Center, mengatakan bahwa ada urgensi untuk mengumpulkan catatan-catatan ini sebelum es tersebut menghilang. Banyak gletser di dunia yang saat ini cepat mencair, termasuk yang menutup puncak tertinggi Pegunungan Jayawijaya di Papua. Tim ini berhasil mengambil inti es selama misi tersebut berlangsung, mengangkutnya ke AS untuk studi intensif yang bertujuan untuk mengembangkan sejarah variasi suhu dan curah hujan, bersama dengan catatan perubahan vegetasi yang didapatkan dari serbuk sari dan sejarah kebakaran yang direkam oleh fragmen tanaman dan zat organik di dalam es. Misi tersebut didukung oleh Freeport-McMoRan dan Freeport Indonesia, termasuk peneliti dari Ohio State dan Universitas Columbia, dan dilakukan bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia (BMKG).



Ekspedisi ke Jayawijaya oleh sekelompok tim ilmuwan iklim global yang dipimpin Prof. Lonnie G. Thompson dari Universitas Ohio Amerika Serikat (paling kanan). Ekspedisi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi ilmiah yang berharga tentang sejarah perubahan iklim dunia dan kejadian lingkungan lainnya.

KEPATUHAN DAN AUDIT LINGKUNGAN

Audit lingkungan Freeport Indonesia menyediakan informasi bagi para manajer kami menyangkut kinerja terkini, dan membantu mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Kami merespons terhadap hasil audit ini dengan rencana aksi untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh para auditor.

Pada 2011, kami mengalami tumpahan yang dilaporkan pada instansi-instansi pemerintah. Freeport Indonesia terus berusaha untuk mencegah, merancang kewaspadaan dan kesiagaan serta menanggulangi tumpahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Freeport Indonesia juga secara sukarela berkomitmen untuk menjalankan suatu audit lingkungan eksternal setiap tiga tahun sebagai bagian dari perluasan 300K Pernyataan Dampak Lingkungan. Audit ini fokus pada pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, dan terpenuhinya komitmen Freeport Indonesia untuk mengikuti praktik-praktik lingkungan terbaik yang terkait dengan komunitas pertambangan internasional. Sebuah ringkasan eksekutif dari audit lingkungan eksternal terakhir (2011) beserta tanggapan Freeport Indonesia pada berbagai rekomendasi audit tersedia pada situs internet kami.

PENGELOLAAN MATERIAL PENGELOLAAN SIRSAT

Salah satu volume limbah terbesar di operasi-operasi kami berbentuk Sirsat sisa air dan bebatuan alamiah di permukaan tanah yang sangat halus setelah konsentrat terpisah dari bijih di pabrik pengolahan. Volume Sirsat kering yang dihasilkan dari pabrik pengolahan bijih selama tahun 2011 adalah sekitar 58,8 juta Metrik Ton.

Proses pengolahan konsentrat Freeport Indonesia merupakan sebuah proses fisik di mana bijih digerus halus dan mineral yang mengandung tembaga dan emas dipisahkan dari partikel-partikel batuan yang tidak bernilai ekonomi. Oleh karena topografi istimewa tapak, kegiatan seismiknya, dan curah hujan tahun yang melebihi 10 meter di beberapa lokasi, kami menggunakan sistem pengelolaan Sirsat yang terkendali melalui aliran sungai yang mengangkut Sirsat ke suatu daerah yang ditetapkan di zona dataran rendah dan pesisiran, yang disebut sebagai *Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA)*. Daerah pengendapan ini adalah suatu bagian dari bantaran genangan sungai, dan merupakan sistem yang direkayasa, dikelola untuk pengendapan dan pengendalian Sirsat.

Sistem pengelolaan ini dijalankan di bawah rencana pengelolaan Sirsat komprehensif Freeport Indonesia, yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia setelah melakukan banyak studi teknis dan suatu proses peninjauan ulang secara tahun-jamak. Sistem ini melibatkan pembangunan struktur penampung lateral, atau tanggul, untuk daerah pengendapan. Tanggul-tanggul ini belakangan diperluas dan pekerjaan secara terus-menerus dilakukan untuk berbagai perbaikan sistem, termasuk pemeriksaan, pemantauan, dan pembangunan fisik. Kami terus-menerus mengevaluasi dan memutakhirkan rencana pengelolaan Sirsat untuk meminimalkan risiko. Apabila pertambangan berakhir, penelitian kami memperlihatkan bahwa daerah pengendapan ini dapat direklamasi dengan vegetasi alamiah atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, atau perikanan.

Kami telah melaksanakan suatu program untuk mendaur ulang Sirsat sebagai bahan campuran beton dalam pembangunan prasarana lokal. Kami juga menggunakan Sirsat untuk membangun jembatan, kantor pemerintah, jalan, saluran drainase, dan mencetak sejumlah produk seperti batako, *paving block*, penahan ombak, serta gorong-gorong. Sirsat dalam bentuk batako juga digunakan dalam program perusahaan untuk bantuan membuat bangunan lokal.

STUDI KASUS:



Beton campuran Sirsat digunakan dalam pembangunan jalan masuk menuju terminal Bandara Mozes Kilangin dan areal parkir sekitar bandara.



Staff Kementerian ESDM membahas pengelolaan Sirsat dengan tim bidang Proyek Pengelolaan Aliran Sirsat Freeport Indonesia di daerah pengelolaan pasir sisa tambang.

Freeport Indonesia Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Praktik Pengelolaan Sirsat

Freeport Indonesia dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) mengawali sebuah Nota Kesepahaman untuk memelihara komunikasi berlanjut tentang praktik pengelolaan lingkungan Freeport Indonesia dan untuk terlibat dalam isu-isu penting terkait dengan penutupan pertambangan yang telah diangkat oleh para pemangku kepentingan setempat. Pada November 2009, Freeport Indonesia dan UNIPA menyelenggarakan sebuah simposium untuk memberikan informasi terkini tentang pengelolaan Sirsat dari pengoperasian Tambang Grasberg. Para akademisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan Organisasi Non-Pemerintah (ornop) belajar mengenai kegiatan pembangunan tanggul, pertimbangan-pertimbangan keanekaragaman hayati, reklamasi, dan upaya-upaya pemantauan lingkungan secara berlanjut.

Selama sesi penutupan pembahasan meja bundar, para peserta bermufakat tentang sejumlah kesimpulan, termasuk pengakuan bahwa program pemanfaatan Sirsat seyogianya dilanjutkan dan ditingkatkan, transportasi yang lebih baik di dalam dan di sekitar daerah pengendapan Sirsat terjamin, dan bahwa Freeport Indonesia seyogianya meningkatkan penyediaan informasi pengelolaan Sirsat di kampus universitas dan lingkungan masyarakat setempat.

PENGELOLAAN BANTUAN PENUTUP DAN DRAINASE BATUAN ASAM

Batuan penutup adalah bebatuan yang harus dipindahkan ke sisi untuk dapat memperoleh akses pada bijih yang akan ditambang dan untuk mengambil logam-logam untuk tujuan komersial. Freeport Indonesia menangani material ini di bawah Rencana Pengelolaan Batuan Penutup yang komprehensif yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Banyak logam terdapat bebas di alam dalam bentuk logam sulfida. Apabila bijih ditambang dan batuan penutup yang mengandung sulfida terpapar unsur-unsur tersebut, maka reaksi antara air, oksigen, dan bakteri yang hadir secara alamiah berpotensi menciptakan air asam batuan. Air asam ini dapat melarutkan logam-logam yang terkandung dalam batuan penutup dan akan mengakibatkan dampak lingkungan yang nyata pada sistem drainase air jika tidak dikelola dengan semestinya. Proses ini dikenal sebagai pengaliran air asam batuan (*acid rock drainage/ ARD*).

Perusahaan menerapkan suatu penilaian risiko formal yang fokus pada pengelolaan batuan penutup dan Sirsat. Prosedur baku pengoperasian (*Standard Operating Procedure, SOP*) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan penilaian-penilaian risiko ini. Di bawah Rencana Pengelolaan Batuan Penutup yang disetujui Pemerintah, Freeport Indonesia menempatkan batuan penutup di daerah-daerah terkelola di sekitar galian tambang terbuka Grasberg. Air asam batuan dialirkan menuju ke lokasi pengolahan air asam di MP74 untuk dinetralisasi dengan kapur.

PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Kami sadari operasi kami memiliki potensi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Freeport Indonesia memiliki Program Pemantauan Lingkungan jangka panjang. Freeport Indonesia dirancang untuk memantau dampak-dampak lingkungan potensial dengan rutin mengukur karakteristik mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, dan meteorologi di seluruh daerah operasi kami.

Lazimnya setiap tahun lebih dari 15.000 sampel yang menghasilkan lebih dari 160.000 hasil analisis terpisah dipakai untuk mengembangkan informasi ilmiah yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajemen menyangkut pengoperasian kami sehingga kami dapat meminimalkan dan memitigasi dampak-dampak lingkungan.

Freeport Indonesia memiliki sebuah laboratorium lingkungan di dalam area yang menghasilkan data analisis untuk digunakan dalam program pemantauan. Laboratorium ini memperoleh sertifikasi standar kualitas ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laboratorium lingkungan. Sebagai bagian dari audit lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Sarpedal (laboratorium lingkungan Pemerintah) mengambil sampel air, sedimen, ikan, air permukaan, dan emisi cerobong. Hasil-hasilnya secara rutin mengkonfirmasi data dari Freeport Indonesia.

Pada tahun 2002, Freeport Indonesia menyerahkan laporan Penilaian Resiko Ekologi kepada Pemerintah Indonesia pada sebuah Penilaian Risiko Ekologi yang terinci terhadap sistem pengelolaan Sirsat, yang mengevaluasi jalur-jalur potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan flora, fauna, dan manusia. Penilaian terinci ini memperkuat dasar untuk persetujuan sistem pengelolaan Sirsat dalam AMDAL. Pada tahun 2002 dilakukan studi dampak Sirsat terhadap kesehatan masyarakat setempat serta keanekaragaman hayati. Studi dari berbagai aspek ini kemudian ditinjau kembali keabsahan metodologi dan kesimpulannya oleh tim panel yang independen dan terdiri dari para ahli. Hasil studi menunjukkan tidak terbukti adanya bahaya kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia.

Meskipun demikian, hasil studi ini juga meminta kami untuk mengambil langkah-langkah lanjutan. Karena wilayah Sirsat tidak mungkin kembali sepenuhnya seperti semula, harus dilakukan pengawasan atas kondisi baru yang terjadi.

Pemantauan kualitas mutu air dilakukan oleh para staf Departemen Lingkungan Hidup Freeport Indonesia di Laboratorium Lingkungan Timika, laboratorium milik Freeport Indonesia di Timika yang mendapat sertifikasi sebagai laboratorium lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada akhir 2010. Sampel air diambil dari sekitar wilayah proyek untuk kemudian dianalisa. Puluhan ribu analisa terhadap biota air, jaringan tumbuh-tumbuhan, air tambang, air permukaan, air tanah, limbah air kotor, sedimen sungai dan Sirsat telah dilakukan pada berbagai laboratorium lokasi dalam rangka program jangka panjang pemantauan lingkungan.



Program biologi kami memantau lebih dari 200 lokasi sampling untuk nekton, bentos, dan plankton. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 2.000 sampel fauna air dianalisis untuk mengetahui unsur-unsur kandungan logamnya, dengan jumlah analisis melampaui 15.000. Hasil-hasil dari pemantauan terkini memperlihatkan bahwa sampel daging ikan dan udang dari daerah Sirsat layak dikonsumsi sebagaimana diatur dalam standar baku mutu makanan Indonesia.

Data dari sampling biologi terus memperlihatkan bahwa muara di hilir daerah pengendapan Sirsat merupakan ekosistem yang berfungsi berdasarkan jumlah spesies dan jumlah *specimen* yang dikumpulkan baik dari nekton maupun organisme yang dapat berenang seperti ikan dan udang.

Selama tahun 2011, Freeport Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di area kontrak karya pada tiga kawasan pemantauan, yaitu kawasan dataran tinggi, kawasan dataran rendah dan kawasan muara sungai. Pemantauan di kawasan dataran tinggi dilakukan di area Ertsberg dan Grasberg, di dataran rendah dilakukan di kawasan pengendapan pasir sisa tambang (Sirsat) dalam Tanggul Ganda, sedangkan di kawasan muara sungai dilakukan di Sungai Mawati, Sungai Otakwa dan di Pulau Ajkwa di muara Sungai Ajkwa.

A. KAWASAN DATARAN TINGGI

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan reklamasi lahan yang dilakukan di area tambang dapat mendorong terjadinya pemulihan lingkungan hayati di kawasan yang terkena dampak. Dengan demikian, kedua parameter ini (pemulihan flora dan fauna) dapat menjadi ukuran untuk melihat keberhasilan kegiatan reklamasi dan proses suksesi alami. Analisa vegetasi dilakukan menggunakan metode kuadran, dimana pada setiap lokasi dibuat kuadran berukuran 4 X 4 m sebanyak 16 buah secara kontinyu. Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman (diversitas) maka dibuat pula kuadran berukuran 1 X 1 m sebanyak 5 kuadran pada setiap lokasi pemantauan. Pemantauan terhadap burung dilakukan dengan menggunakan metoda TSCs (*Time Species Counts*) dengan bantuan binokuler dan buku panduan pemantauan burung di lapangan untuk mengidentifikasi burung-burung yang dijumpai.

B. KAWASAN DATARAN RENDAH

Pada tahun 2011, kegiatan pemantauan di Tanggul Barat hanya dilakukan kegiatan pemantauan vegetasi dan sampling tanah untuk mengetahui sifat Fisika, Kimia maupun Biologi Tanah (Mikroorganisme Tanah). Kegiatan pemantauan fauna tidak dapat dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012.

C. KAWASAN MUARA SUNGAI

Pengendapan Sirsat di kawasan *Modified-Ajkwa Deposition Area (ModADA)* seluas 230 km², masih meloloskan partikel yang sangat-sangat halus sampai di muara dan membentuk delta (pulau kecil). Kawasan endapan tersebut telah mengalami suksesi alami yang berjalan dengan cepat dan telah menjadi habitat bagi burung-burung yang hidup di ekosistem pantai dan mangrove. Pemantauan burung di Pulau Ajkwa terus dilakukan secara berkala pada tiap triwulan.

Pada 2011, Freeport Indonesia juga menerima sejumlah keluhan terkait dengan peningkatan sedimentasi material Sirsat perusahaan di daerah muara, yang dilaporkan berdampak negatif pada jalur-jalur transportasi air yang dipakai oleh masyarakat di kampung-kampung pesisir sebagai akses menuju kota Timika. Dampak sedimentasi ini teridentifikasi dalam laporan AMDAL 1997 Freeport Indonesia, dan perusahaan telah memberikan komitmen dalam laporan tersebut untuk melakukan mitigasi dampak dengan cara membantu jalur-jalur alternatif bagi masyarakat.



Burung-burung air berburu ikan di Muara Aijkwa yang merupakan tempat aliran Sirsat Freeport Indonesia.

Departemen Lingkungan dan Sosial Freeport Indonesia telah menanggapi keluhan serta mengumpulkan data dan analisis terinci tentang tingkat mutu air di daerah muara dan akses transportasi. Freeport Indonesia telah melakukan konfirmasi terhadap keluhan masyarakat dan sekarang dalam proses menugaskan sebuah studi untuk menilai beragam alternatif transportasi daerah pesisir yang berkelanjutan dan akses transportasinya. Freeport Indonesia menyediakan lebih dari 680.000 dolar AS dalam bentuk prasarana transportasi bus dan angkutan darat lainnya untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan di sekitar daerah pengendapan Sirsat ke dan dari Timika. Freeport Indonesia memegang komitmen untuk melakukan mitigasi dampak terhadap jalur air tradisional dan mendukung tingkat mobilitas masyarakat daerah pesisir.



Kupu-kupu Ulysses (*Papilio ulysses autolyucus*) merupakan salah satu spesies kupu-kupu yang mudah kita temukan di lokasi kawasan reklamasi pengendapan Sirsat.

REVEGETASI DAN REKLAMASI

Freeport Indonesia memegang komitmen baik pada reklamasi maupun revegetasi lahan terganggu setelah tidak lagi dipergunakan untuk operasi pertambangan kami. Kami telah melakukan berbagai studi dan program reklamasi yang ilmiah dan komprehensif selama bertahun-tahun baik di kawasan dataran tinggi maupun di kawasan dataran rendah dalam kawasan proyek agar dapat menyediakan data yang sah tentang opsi-opsi yang tersedia bagi reklamasi lahan.

DATARAN TINGGI

Ekosistem dataran tinggi terbentuk oleh kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrem, yang mencakup suhu malam hari yang sangat rendah, radiasi matahari tinggi selama siang hari dengan periode fotosintensis yang pendek, kabut tebal, curah hujan tinggi, dan tanah yang miskin hara. Tanaman yang hidup di sini sangat istimewa; melewati evolusi untuk bertahan dalam kondisi hidup yang keras. Banyak di antara spesies ini, termasuk rumput lokal dan beberapa spesies *rhododendron* dan lumut, telah diketahui sesuai untuk dipakai dalam reklamasi terasering batuan penutup.



Pada akhir tahun 2011, total tanah terganggu baru adalah 27 hektar. Sedangkan sepanjang 2011, lebih dari 60,1 hektar lahan terganggu dekat areal pertambangan di dataran tinggi telah melalui revegetasi sebagai bagian dari program reklamasi yang lebih berjangka panjang. Kami memantau kinerja beragam teknik penanaman dan memodifikasi program-program untuk meningkatkan keberhasilan jangka panjang tanaman ini. Pada tahun 2011, dilaksanakan uji coba perbanyakan tumbuhan asal Grasberg melalui teknik kultur jaringan. Program uji coba ini melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bio-Teknologi untuk melakukan uji coba di laboratoriumnya dan untuk selanjutnya akan dibuat laboratorium kultur jaringan di Grasberg.

Tim Departemen Lingkungan Freeport Indonesia sedang memantau tanaman-tanaman asli dataran tinggi *Deschampsia klosii* sebagai bagian dari program reklamasi di kawasan tambang Freeport Indonesia di dataran tinggi.



Freeport Indonesia telah menanam 56.500 ribu pohon bakau di daerah pengendapan Sirsat sebagai bagian dari suatu prakarsa kolonisasi bakau terbantu. Perusahaan kontraktor dari masyarakat setempat, dilibatkan dalam program reklamasi skala besar ini.

DATARAN RENDAH

Kajian kami tentang reklamasi Sirsat dan pembangunan lahan percontohan di atas endapan Sirsat telah memperlihatkan bahwa Sirsat tidak berbahaya bagi hutan spesies asli dan tanaman pertanian. Kajian-kajian tersebut juga memberikan informasi penting tentang kumpulan spesies tanaman yang dapat berkembang subur pada media Sirsat. Daerah endapan Sirsat sesuai untuk membudidayakan beragam tanaman pertanian jika Sirsat diperkaya dengan karbon organik. Tujuan program reklamasi dan revegetasi Freeport Indonesia di dataran rendah adalah untuk memperagakan cara-cara berkelanjutan guna mengalihfungsikan endapan Sirsat menjadi lahan bermanfaat yang produktif, atau mengembalikannya menjadi lahan yang ditumbuhi tanaman asli ketika kegiatan pertambangan berakhir.

Pada 2011, kegiatan revegetasi telah dilakukan pada lahan seluas 16,6 hektar dari target 12 hektar per tahun yang menjadi komitmen Freeport Indonesia dalam rencana reklamasi 5 tahunan, dan sampai akhir 2011 lebih dari 170 spesies tanaman berhasil tumbuh pada lahan yang mengandung Sirsat. Hal ini mencakup tanaman penutup jenis kacang-kacangan (*legume*) untuk pakan ternak; pepohonan asli seperti kasuarina, matoa, kayu putih (*eucalyptus*), dan kelapa; tanaman pertanian seperti nenas, melon, tebu, sagu, dan pisang; serta sayur-mayur dan sereal seperti cabe, timun, tomat, padi, jagung, kacang-kacangan, dan labu.

Strategi lain dari reklamasi Sirsat adalah membiarkan terjadinya suksesi ekologis alami (pertumbuhan kembali spesies asli secara alami) pada kawasan yang telah ditentukan. Sebuah proyek penelitian independen tentang suksesi alami pada kawasan endapan Sirsat menemukan bahwa, dalam kurun waktu beberapa tahun saja, lebih dari 500 spesies tanaman berhasil melakukan kolonisasi secara alami dan tumbuh dengan baik.



Kontraktor-kontraktor lokal dari tujuh suku dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan reklamasi di kawasan pengendapan Sirsat.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Juli 2008 menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus tentang pengelolaan endapan Sirsat di kawasan proyek Freeport Indonesia. SK tersebut membatasi jumlah Sirsat dan sedimen alami yang dapat melintasi daerah endapan Sirsat ke daerah muara atau laut lepas. Freeport Indonesia telah menangani isu ini sejak dasawarsa terakhir melalui program tehnik dan biologi.

Sedimen alami dan partikel sirsat yang halus secara alami membentuk lahan-lahan baru di daerah muara yang kemudian menjadi suksesi hutan bakau secara alami. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan spesies bakau, kepiting, udang, siput, kerang, ikan, dan cacing laut teridentifikasi di daerah-daerah koloni bakau ini. Untuk mempercepat proses suksesi primer di lahan-lahan bentukan baru ini, Freeport Indonesia menanam ratusan ribu pohon bakau dengan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal yang berasal dari masyarakat suku Kamoro, pemukim asli dataran rendah. Pemantauan terhadap proyek tersebut memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan dan daya tahan hidup bibit yang ditanam serupa dengan yang dilaporkan untuk program kolonisasi di seluruh dunia, sebagaimana dijelaskan dalam literatur ilmiah.

PROGRAM PENDIDIKAN LINGKUNGAN

Freeport Indonesia mendukung suatu program yang aktif menjangkau masyarakat untuk membantu karyawan dan penduduk setempat menjadi lebih sadar lingkungan. Program ini memanfaatkan Daerah Percontohan Reklamasi Tanggul Ganda, ekosistem alami di sekitarnya, dan kegiatan yang terkait dengan lingkungan, seperti sarana laboratorium lingkungan dan sarana pengolahan limbah. Program ini difokuskan pada siswa dan guru, tetapi juga mencakup para pemangku kepentingan setempat lainnya, seperti karyawan, pejabat pemerintah, organisasi non pemerintah setempat, media, dan anggota satuan keamanan pemerintah. Kegiatan peringatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Sedunia, dan Hari Kota Bersih diikuti dengan bersemangat oleh masyarakat setempat.

Selama beberapa tahun ini, kami telah melaksanakan Program Pendidikan Lingkungan di sekolah-sekolah di sekitar areal Freeport Indonesia. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Papua sedang mengadopsi program ini untuk semua sekolah di Papua dan Freeport Indonesia telah membantu dalam pengembangan kurikulumnya.



Sikap peduli lingkungan juga ditumbuhkan untuk para pelajar di lingkungan sekolah. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Freeport Indonesia yang dikelola Yayasan Pendidikan Jayawijaya berhasil meraih status Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG LIMBAH

Program-program pengelolaan lingkungan Freeport Indonesia mencakup semua aspek kegiatan operasinya, bukan hanya yang terkait dengan pertambangan. Kami memiliki sistem pengelolaan limbah yang komprehensif menerapkan prinsip-prinsip 3R – *reuse, recycle, reduction* (pemanfaatan kembali, daur ulang, pengurangan). Program-program minimalisasi limbah kami melibatkan pengurangan limbah dan penggantian bahan dengan produk ramah lingkungan. Wadah besar, ampas minyak, kertas dan ban bekas digunakan kembali sesuai peruntukannya dengan cara yang ramah lingkungan. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang lainnya, sebagaimana logam dan baterai bekas, dikumpulkan dan disimpan di daerah penyimpanan sementara untuk selanjutnya didaur ulang sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia.

Material yang didaur ulang atau dimanfaatkan kembali antara lain: Minyak pelumas (oli) yang dikumpulkan dari bengkel-bengkel di seluruh area kerja Freeport Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar alternative di Pabrik Kapur Mahaka dan Pabrik Pengeringan Konsentrat di portsite; Aki/accu bekas kendaraan ringan dan berat serta material lainnya seperti drum-drum bekas, ban bekas, besi bekas dikirimkan kepada pihak ketiga untuk didaur-ulang dimanfaatkan kembali.

Berbagai limbah, termasuk jumlah kecil limbah berbahaya, dipisah-pisahkan di lokasi kerja masing-masing. Pengumpulan, pengemasan, dan penyimpanan limbah berbahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan uji kadar logam (*assay*) terhadap sampel bijih, laboratorium analitika, sarana medik, dan proses-proses lain dikelola sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya diangkut ke industri pengolah dalam negeri yang memiliki izin dan tidak melintasi perbatasan internasional. Pada 2011, Freeport Indonesia menghasilkan 7.940 ton limbah berbahaya, dan sekitar 21.590 ton limbah tidak berbahaya.

Jenis	Jumlah	Satuan
Daur Ulang Limbah Padat	6.140	Ton
Oil/Minyak pelumas yang digunakan kembali/daur ulang	6.360	Meter kubik

Pemakaian material daur ulang Freeport Indonesia selama 2011.

Limbah tidak berbahaya Freeport Indonesia ditangani di tiga lokasi yang telah ditentukan, yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk limbah tak bergerak dan sebuah TPA untuk limbah terurai dan limbah lainnya, yang dilengkapi dengan sebuah sistem pengumpulan dan pengolahan. Kesepuluh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kami dikelola sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia. Mutu air limbah dari semua instalasi itu dipantau secara berkala terkait dengan parameter pH, kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), total padatan tersuspensi dan lemak, serta minyak sesuai dengan baku mutu.

Kami mengembangkan sebuah rencana dan mendapatkan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memanfaatkan abu dari unit *boiler* pada sarana pembangkit listrik kami yang menggunakan bahan bakar batubara yang dicampur 5 hingga 10 persen semen untuk keperluan proyek *infill* di daerah operasi kami. Hal ini berguna untuk memanfaatkan timbunan abu kami untuk kegiatan produktif.



Kegiatan daur ulang minyak goreng bekas dari rumah tangga untuk pengembangan proyek bio-diesel sebagai salah satu energi alternatif di daerah operasi Freeport Indonesia.

Program Biodiesel di Freeport Indonesia

Freeport Indonesia sebagai perusahaan pertambangan yang peduli terhadap lingkungan, melalui Departemen Lingkungan Hidup mengembangkan sebuah proyek biodiesel di MP 21. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbarukan karena dapat dibuat kapan saja dari bahan dasar tumbuh-tumbuhan. Biodiesel ini bersifat ramah lingkungan karena nilai emisi yang dihasilkan sangat rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Menurut Manajer Departemen Lingkungan Hidup Freeport Indonesia, Andi Mukhsia, sesuai rekomendasi dari perusahaan Toyota, ke depan sekitar lima persen biodiesel digunakan dalam campuran bahan bakar yang sedang diujicobakan ke beberapa kendaraan operasional Freeport Indonesia. Sejak tahun 2010, Departemen Lingkungan Hidup telah merintis proyek biodiesel yang menggunakan minyak goreng bekas atau jelantah dari dapur tempat makan karyawan (*Messhalls*) di Jobsite menjadi biodiesel. Saat ini, terdapat 10 unit mobil yang sementara diuji coba memanfaatkan bahan bakar biodiesel dengan pengawasan langsung oleh PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI), salah satu perusahaan privatisasi Freeport bergerak di bidang pengelolaan transportasi, pelabuhan, dan pemeliharaan kendaraan ringan. KPI akan terus memantau perkembangan kinerja dari mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar biodiesel ini. Pada tahun 2011 lebih dari 3.400 liter biodiesel dihasilkan dari proyek tersebut dan telah dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar.

PENGGUNAAN ENERGI

Energi merupakan kebutuhan utama pada kegiatan operasi pertambangan dan pengolahan kami. Sumber energi utama kami adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan batubara.

Pada 2011, pengoperasian Freeport Indonesia menggunakan sekitar 14.100 Gjoule BBM dan 20.600 Gjoule energi batubara. Energi ini dipergunakan terutama untuk menghasilkan tenaga listrik dan bahan bakar truk dan alat transportasi lainnya yang digunakan dalam kegiatan penambangan.

Kami secara aktif mengikuti, menerapkan, dan beralih pada perkembangan teknologi yang lebih produktif, ramah lingkungan, efektif dan efisien; serta ikut berperan mengembangkan sumber energi alternatif melalui berbagai prakarsa yang telah dilakukan di daerah operasi kami dan lingkungan masyarakat setempat.

Penggunaan energi tidak langsung di Freeport Indonesia adalah untuk keperluan listrik kantor pusat dan kantor perwakilan di Jayapura. Energi listrik untuk kedua kantor ini dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara.

PENGGUNAAN AIR

Pada 2011, jumlah air yang digunakan oleh Freeport Indonesia mencapai 56.647.364 meter kubik dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Satuan
Surface Water	12.938.093	Meter kubik
Groundwater	21.109.270	Meter kubik
Stormwater	22.600.000	Meter kubik

Sungai Ajkwa merupakan salah satu sumber air yang terkena dampak dari kegiatan operasi Freeport Indonesia dimana sungai tersebut selama 2011 digunakan untuk pengaliran Sirsat sebesar 39,2 meter kubik ke muara air asin di Laut Arafura. Data kualitas air memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Sedangkan jumlah air yang digunakan kembali /didaur ulang selama 2011 lebih dari 59 juta meter kubik.

PENGGUNAAN MATERIAL

Material yang digunakan Freeport Indonesia selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Satuan
Batuan	70.822.000	Ton
Bahan peledak	39.082	Ton
Pelumas	6.564	Ton
Caustics	80.004	Ton
Cairan asam	651	Ton
Bahan kimia yang digunakan dalam proses flotasi	4.722	Ton
Baja	33.440	Ton

GAS-GAS EFEK RUMAH KACA

Pada 2011, jumlah emisi ekuivalen karbondioksida Freeport Indonesia mencapai 2,99 juta ton; terutama berasal dari pembakaran bahan bakar oleh truk pengangkut dan pembangkit tenaga listrik. Oleh karena kami menghasilkan semua tenaga listrik kami, hal tersebut digolongkan sebagai emisi langsung.

Emisi pada 2011 lebih rendah dibandingkan pada 2010 sejalan dengan penurunan tingkat penambangan kami yang disebabkan karena pemogokan serikat pekerja pada triwulan ke-empat tahun 2011.

Jenis	Jumlah	Satuan
Emisi - NOx	19.378	MetrikTon
Emisi - SOx	5.169	MetrikTon
Emisi - PM10	2.515	MetrikTon
Emisi - VOC	3.701	MetrikTon

Jenis-jenis emisi udara yang diinventarisasi dari area kerja Freeport Indonesia.

Komponen utama dari emisi langsung kami berkaitan dengan peralatan pertambangan. Pemasok utama kami

telah menetapkan tujuan perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari produk-produknya sebesar 20 persen hingga tahun 2020. Dalam jangka pendek, kami fokus pada perbaikan efisiensi pengoperasian armada truk pengangkut sebagai cara untuk mengurangi emisi langsung. Selain itu kami juga sedang mengevaluasi sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air yang dapat mengimbangi emisi dari pabrik batubara di masa depan.

Pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan dari Pabrik Gamping/Kapur Mahaka, Pabrik Pengerangan Konsentrat, PLTU dan emisi kendaraan bergerak dengan menaati peraturan dan perizinan pemerintah yang berlaku. Prosedur pemeliharaan, pencegahan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan izin. Pemantauan emisi dilakukan secara rutin oleh internal maupun pihak eksternal.

Perusahaan induk kami, Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) telah menetapkan sasaran kinerja untuk berbagai aspek pada semua kegiatan operasi pertambangannya yang masih aktif, termasuk Freeport Indonesia, guna melaksanakan rencana efisiensi dan konservasi energi. Freeport Indonesia dan perusahaan induknya FCX secara aktif terlibat dalam berbagai upaya mengidentifikasi proyek-proyek *carbon offset* di Papua bekerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta.

Dalam AMDAL 300K Freeport Indonesia, program penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO), menjadi suatu komitmen perusahaan, untuk mengakhiri penggunaan BPO di daerah kerja Freeport Indonesia sebelum akhir tahun 2000. Hal ini sesuai dengan program serupa yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Komitmen ini akan dijalankan selaras dengan penerapan kebijakan Pemerintah. Tujuan dari program penghapusan BPO di Freeport Indonesia adalah untuk menghentikan penggunaan bahan-bahan yang berdasarkan Protokol Montreal teridentifikasi sebagai bahan yang dapat merusak lapisan ozon di daerah kerja Freeport Indonesia, khususnya menghentikan penggunaan BPO pada unit-unit yang besar.

Sebagian besar target-target spesifik yang telah dicanangkan dalam program penghapusan bahan perusak ozon telah tercapai diantaranya adalah :

- Telah dicantumkannya klausul yang menyatakan penghentian setiap pembelian barang yang mengandung BPO sejak 1998. Klausul tersebut menyatakan bebas BPO sebagaimana yang dideklarasikan dalam Protokol Montreal. Penghentian penggunaan produk minyak bumi yang mengandung unsur-unsur klor telah diselesaikan pada 1997.
- Sebagian besar aplikasi Chlorofluorocarbon (CFC) pada sistem peralatan yang besar (seperti pada mesin pendingin, mesin pembeku, bus, truk, perahu, peralatan berat dan sistem pendingin pada ruangan besar) telah digantikan dengan produk-produk non-BPO.
- Penggantian sistem Halon pada unit pemadam kebakaran telah rampung semuanya digantikan dengan sistem non-Halon pada Mei 2001.
- Penghentian pembelian produk yang dirancang-bangun dengan menggunakan BPO

Sementara itu, beberapa program penghapusan BPO yang tetap berjalan diantaranya adalah:

- Penggantian sistem yang masih menggunakan R-22 dengan sistem yang lebih ramah lingkungan. Penggantian aplikasi R-22 pada unit-unit ini dilaksanakan secara berkesinambungan pada saat penggantian unit baru. Inventarisasi semua sistem yang masih menggunakan R-22 telah diselesaikan.
- Proses penapisan pembelian barang-barang berpotensi bahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti halnya juga BPO terus dilanjutkan sejalan dengan kebijakan lingkungan dan prosedur yang berlaku.

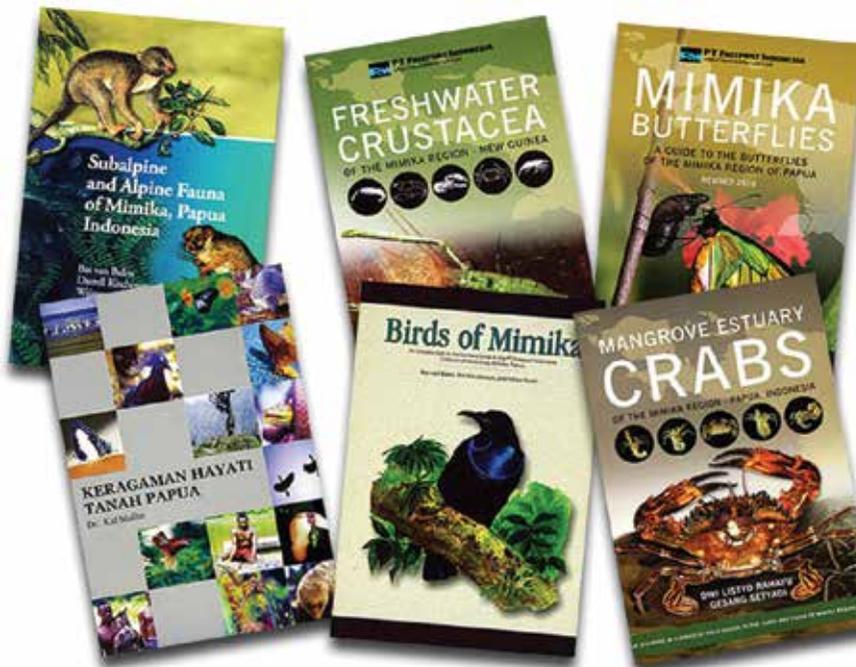
KEANEKARAGAMAN HAYATI

Wilayah proyek Freeport Indonesia terdiri dari 292.000 hektar di Provinsi Papua, Indonesia. Sekitar 26.000 hektar (9 persen dari seluruh wilayah kontrak) digunakan untuk kegiatan produksi dan ekstraksi logam mineral. Keseluruhan wilayah Selatan Papua memperlihatkan tingkat endemis yang tinggi dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Asia Tenggara.

Wilayah proyek Freeport Indonesia berbatasan dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah Situs Warisan Dunia (*World Heritage Site*) dan daerah konservasi terbesar di Asia Tenggara (lebih dari dua juta hektar). Taman nasional ini merupakan satu-satunya daerah konservasi di dunia yang mencakup bentangan utuh berkesinambungan mulai dari pegunungan yang tinggi hingga kawasan laut tropis, termasuk lahan basah yang sangat luas di sekitar dan sepanjang garis pantai. Freeport Indonesia telah melakukan banyak studi keanekaragaman hayati, disamping mendukung para peneliti pihak ketiga dan program

pendidikan masyarakat; kami juga membantu membangun basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan jangka panjang taman nasional.

Bersama para pakar nasional dan internasional, Freeport Indonesia terus menjalankan program pemantauan lingkungan yang mencakup survei flora dan fauna secara ekstensif di dalam berbagai rentang habitat berbeda. Lebih lanjut, sebuah prosedur baku pengoperasian (SOP) untuk pengelolaan keanekaragaman hayati sedang dikembangkan.



Kumpulan buku keanekaragaman hayati di Provinsi Papua yang telah didokumentasikan oleh Freeport Indonesia.

Pada 2010, Freeport Indonesia mensponsori Konferensi Internasional Pertama Provinsi Papua tentang Keanekaragaman Hayati; berbagi informasi tentang praktik-praktik pengelolaan lingkungan dengan para akademisi, instansi pemerintah, ornop lingkungan, dan mahasiswa dari seluruh dunia.

Kami telah menjalankan, memfasilitasi, dan mendukung banyak studi ekologi dan keanekaragaman hayati untuk memfasilitasi pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif. Studi-studi keanekaragaman hayati ini, dilakukan bersama-sama para pakar Indonesia maupun internasional, mencakup survei vegetasi, etnobotani, tumbuhan obat, mamalia, burung, kupu-kupu, amfibi, reptil, ikan, tanah, fauna, serta serangga air dan daratan. Informasi yang tersedia mengindikasikan kemungkinan 50 spesies di wilayah Kontrak Karya Freeport Indonesia termasuk Daftar Merah Spesies Terancam dari International Union for Conservation of Nature (IUCN/ Badan Konservasi Alam Dunia); yang sebagian besar disebabkan langkanya data karena masih banyak yang harus dikerjakan di kawasan ini.

COMPLIANCE - KEPATUHAN LINGKUNGAN

Operasi kami telah mempertahankan Sistem Manajemen Lingkungan yang disertifikasi sesuai dengan standar ISO 14001 berdasarkan audit yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan standar dipenuhi. Sedangkan kami juga turut mengadakan audit lingkungan internal selama tahun 2010 sesuai dengan Kebijakan Audit Lingkungan kami. Freeport Indonesia juga memiliki sistem manajemen tindakan korektif dan pencegahan untuk segala temuan audit maupun insiden. Sistem ini meliputi analisis penyebab, pengembangan rencana aksi dan rencana pelacakan hingga penutupan.

PROGRAM PASCA TAMBANG

Freeport Indonesia telah mengembangkan sebuah rencana pasca tambang yang ditinjau secara berkala. Perkiraan biaya akhir dari rencana pasca tambang melibatkan penilaian terintegrasi dari beberapa hal yang kompleks dalam periode yang cukup lama, dan dapat sewaktu-waktu berubah. Jumlah akhir dari biaya reklamasi dan pasca tambang yang akan dikeluarkan juga akan ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada saat penutupan tambang. Pada tahun 1996, Freeport Indonesia mulai berkontribusi bagi sebuah dana yang dirancang untuk mengumpulkan setidaknya 100 juta dolar AS (termasuk bunga) pada akhir kegiatan pertambangan di Indonesia. Freeport Indonesia berencana untuk menggunakan dana ini termasuk bunganya, untuk membayar biaya penutupan tambang dan reklamasi. Setiap biaya yang melebihi dari dana 100.000.000 dolar AS ini akan didanai oleh arus kas operasional atau sumber lain.

MENJAGA KEBERADAAN MATERIAL

FCX induk perusahaan Freeport Indonesia adalah anggota dari asosiasi industri dan komoditas yang memiliki agenda yang kuat terhadap keberadaan material, seperti keanggotaan FCX dalam European Copper Institute and the Molybdenum Consortium dibawah the International Molybdenum Association (IMO) yang merupakan bagian dari upaya industri tersebut dalam memenuhi kewajibannya terhadap REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances* atau Registrasi,



Evaluasi, Wewenang, dan Restriksi terhadap bahan-bahan Kimia). FCX juga berperan aktif dalam International Council on Mining & Metals (ICMM) Material Stewardship Committee yang menangani berbagai masalah terkait industri pertambangan secara keseluruhan.

PRODUK

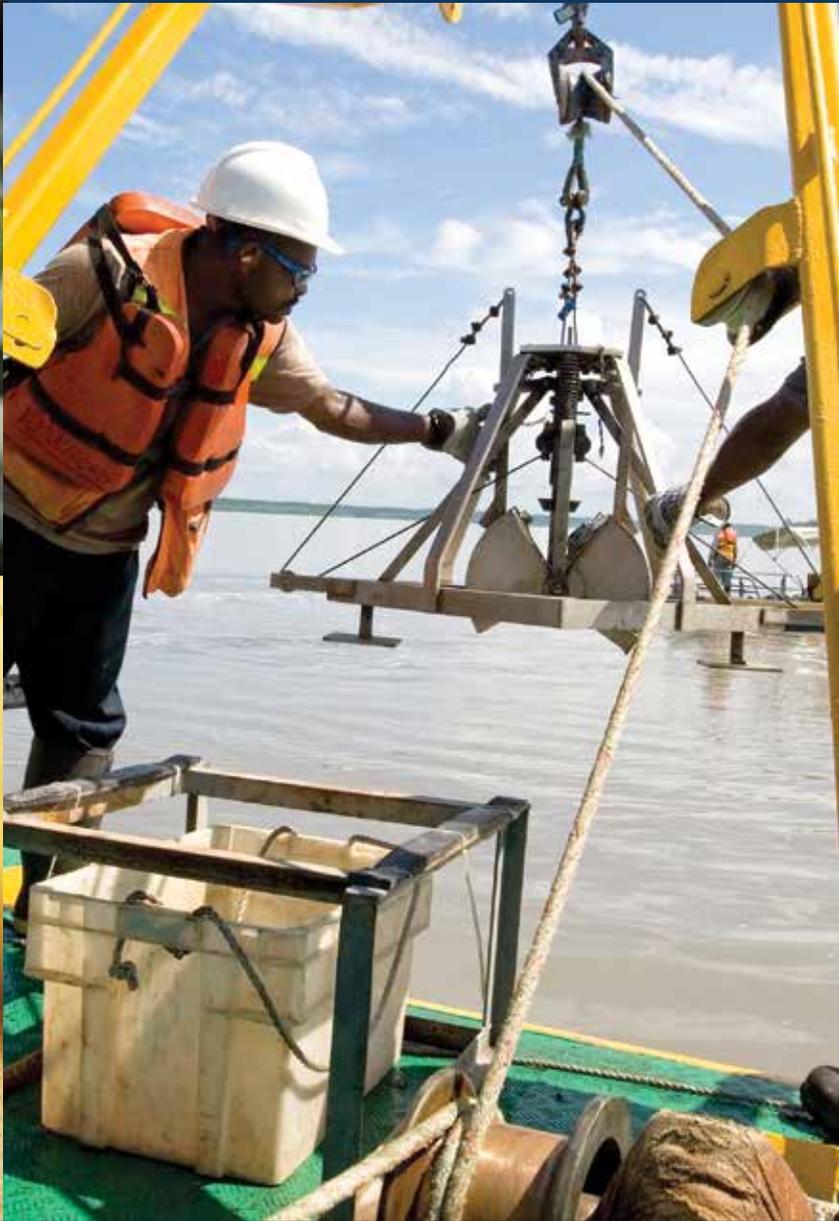
FCX dan Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak terutama dalam bisnis ekstraksi dan pengolahan logam. Kami menyediakan produk massal dalam bentuk konsentrat tembaga dan emas, kami tidak mengawasi program penilaian kesehatan dan keselamatan khusus untuk produk yang dipasok kepada pelanggan. Namun, di Uni Eropa, Laporan Data Keselamatan FCX (*Safety Data Sheets*) untuk *roasted molybdenite concentrate* dan *pure molybdenum trioxide* mencakup informasi yang menginformasikan pelanggan kami mengenai batas paparan yang aman dan praktek kerja ketika menggunakan produk kami. *Global Harmonized System (GHS)* atau keluhan terhadap Lembar Data Keselamatan secara rutin diberikan kepada pelanggan kami untuk produk tembaga.

Sebagai perusahaan pertambangan, kita tidak beroperasi dalam pasar konsumen; kontrak penjualan kami yang utama adalah dengan pelanggan industri. Kami tidak mengetahui adanya insiden yang menyalahi peraturan dan prinsip sukarela mengenai komunikasi pemasaran.

Tembaga ditemukan di dalam berbagai aplikasi dan alat yang digunakan oleh industri dan individu di seluruh dunia. Meskipun kami tidak memiliki kontrol langsung terhadap penggunaan akhir dan pembuangan produk kami, FCX selaku induk perusahaan dari Freeport Indonesia bekerjasama dengan asosiasi industri dan komoditas seperti ICMM, IMO, dan ICA mempelajari keterlibatan efektif dalam suatu siklus hidup sebuah produk atau komoditas. Penilaian siklus hidup untuk tembaga tersedia di European Copper Institute. Kawat, batang, tabung dan komponen elektronik dari tembaga merupakan benda yang dapat 100 persen digunakan kembali. Sebagian dari palet kayu yang digunakan untuk kemasan dan pengiriman batang dan katoda tembaga dapat digunakan kembali jika dikembalikan kepada FCX, sedangkan palet plastik yang digunakan untuk pengiriman batang tembaga didaur ulang di tiga pabrik FCX (Miami, Norwich, dan El Paso).

Tidak ada denda yang signifikan yang dikenakan pada kami atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan tentang penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

BERSAMA PARA PAKAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL, FREEPORT INDONESIA TERUS MENJALANKAN PROGRAM PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG MENCAKUP SURVEI FLORA DAN FAUNA SECARA EKSTENSIF DI DALAM BERBAGAI RENTANG HABITAT BERBEDA.



4.1

PRAKTIK-PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA YANG LAYAK

**KEBIJAKAN DAN
PENDEKATAN**

Freeport Indonesia berkomitmen memastikan bahwa kegiatan kami dijalankan sesuai dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia, peraturan serta standar dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), undang-undang dan peraturan Indonesia serta budaya dari masyarakat yang merupakan penduduk asli di wilayah operasi perusahaan kami.

Jumlah karyawan kami hingga tahun 2011 sekitar 23.000 orang, dimana 30 persennya adalah karyawan asli Papua. Kami memberikan kesempatan bagi program pengembangan karyawan sesuai dengan kemampuannya untuk menduduki tingkatan-tingkatan tertentu. Kami memahami bahwa keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada kontribusi perseorangan dari para karyawan. Oleh karena itulah kami mendapatkan manfaat dengan mempekerjakan karyawan yang berkomitmen untuk sukses bersama kami.

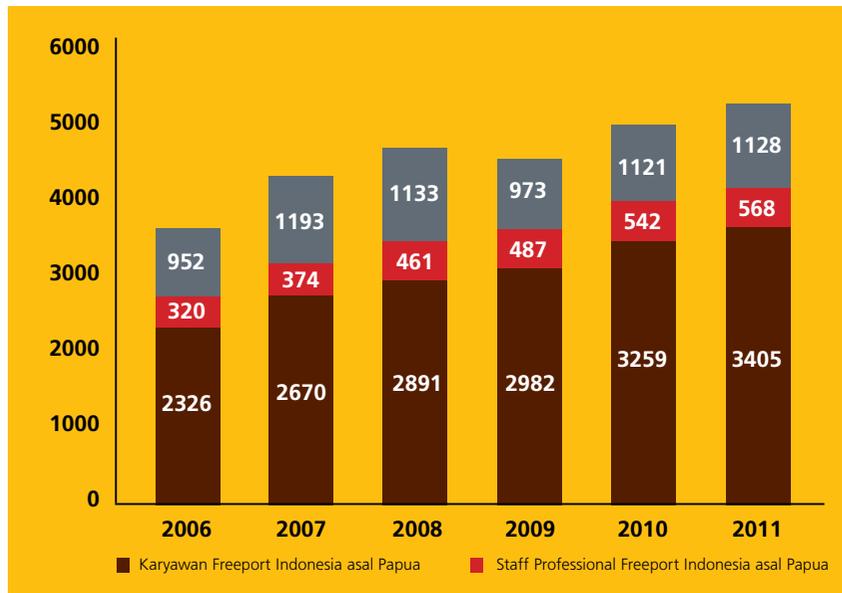
**PRINSIP PERILAKU
BISNIS**

Prinsip Perilaku Bisnis Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang juga diadopsi oleh Freeport Indonesia mendefinisikan bagaimana kami bekerja dan perilaku yang kami harapkan dari para karyawan. Prinsip-prinsip ini merupakan bentuk afirmasi komitmen kami terhadap integritas. Siapa pun yang menjalankan bisnis atas nama Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. dan Freeport Indonesia terikat oleh prinsip-prinsip kami. Kami percaya terhadap bisnis yang kami jalankan dengan para pemasok, kontraktor, konsultan, dan mitra usaha lainnya yang memperlihatkan standar-standar tinggi dari perilaku bisnis yang etis.

Prinsip Perilaku Bisnis ini mensyaratkan semua karyawan untuk patuh pada standar-standar etis yang ditetapkan oleh perusahaan dan konsisten dengan UU yang berlaku, termasuk UU anti-korupsi. Karyawan setiap tahun diharuskan untuk menyatakan kepatuhan mereka pada kebijakan ini dan pelatihan disediakan untuk mendukung pemahaman para karyawan tentang kebijakan ini. Para karyawan diharuskan memberitahu petugas kepatuhan perusahaan tentang dugaan pelanggaran apa pun terhadap prinsip-prinsip ini. Setiap insiden atau kekhawatiran yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran akan diselidiki dan diselesaikan secara patut. Pada 2011, 95 persen dari semua posisi tingkat manajer di Freeport Indonesia menerima pelatihan tentang Prinsip Perilaku Bisnis dan pelatihan lanjutan yang lebih terinci untuk posisi-posisi non-manajemen juga telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN

Pada bulan Juli tahun 2011 dimulai perundingan antara manajemen Freeport Indonesia dengan PUK KEP SPSI (Pengurus Unit Kerja Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Freeport Indonesia, sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17 dalam sejarah Freeport Indonesia. PKB adalah perjanjian yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Perundingan PKB ke-17 tahun 2011 itu memakan waktu lebih lama karena adanya beberapa usulan Pengurus Unit Kerja (PUK) yang harus didiskusikan lebih detail termasuk tingginya usulan kenaikan upah dan tambahan insentif lainnya. Namun, perundingan berhasil diselesaikan dan mencapai kesepakatan dan pada 25 Januari 2012 telah ditandatangani PKB ke-17 tersebut oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia dan Ketua PUK KEP SPSI Freeport Indonesia.



*Freeport Indonesia, GDP/GEL, LSC and Starting 2011 excluded YPI, NMI

Di akhir 2011, Freeport Indonesia mempekerjakan 22.759 orang. Jumlah ini terdiri dari 11.327 karyawan tetap dan 11.432 karyawan kontraktor. Dari semua karyawan ini, 98 persen adalah WNI dan 33 persen adalah keturunan Papua. Selama 2011 sebanyak 472 karyawan Freeport Indonesia berhenti bekerja, sedangkan tingkat pergantian karyawan (*turn over rates*) Freeport Indonesia selama 2011 adalah sekitar 4 persen termasuk diantaranya tingkat karyawan yang purna tugas (pensiun).

Pada 2011, Freeport Indonesia menerima Perjanjian Kerja Bersama ke-17 dengan Unit Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan SPSI yang berlaku hingga tahun 2013. Sekitar 8.109 orang (72 persen) yang dipekerjakan oleh Freeport Indonesia berada di bawah perjanjian musyawarah bersama. Selama 2011 Freeport Indonesia mengalami mogok karyawan yang melebihi durasi 1 minggu.

Berdasarkan pada persyaratan hukum tertentu, Freeport Indonesia maupun FCX selaku induk perusahaan telah mempertahankan otoritas dan kebebasan untuk menunda, membatasi atau merestrukturisasi operasinya yang dipandang perlu untuk menanggapi kondisi ekonomi yang terjadi. Ketika keputusan tersebut diambil, keputusan tersebut akan dikomunikasikan kepada karyawan pada waktu yang sesingkat-singkatnya termasuk diantaranya informasi mengenai status karyawan yang terkena dampak dari perubahan dalam operasi serta manfaat yang akan didapat jika pengurangan karyawan terjadi. Perusahaan juga telah membuat kebijakan dan perjanjian kerja bersama yang dipergunakan untuk menentukan karyawan yang mungkin terpengaruh dari pengurangan karyawan yang terkait dengan perubahan operasional perusahaan.

FCX beserta seluruh afiliasinya termasuk Freeport Indonesia, memandang perspektif dan latar belakang karyawan yang beragam sebagai aset perusahaan. Kebijakan dan praktek yang Freeport Indonesia lakukan, termasuk Prinsip Perilaku Bisnis (*Principles of Business Conduct*) dan Kebijakan Hak Asasi Manusia, melarang adanya diskriminasi dan menghormati keragaman di dalam perusahaan. Kebijakan kami dirancang untuk mendorong dan memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan prestasi individu serta untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dimanapun.

Kebijakan kami termasuk untuk membuat semua keputusan ketenagakerjaan berdasarkan kemampuan dan fungsi dari sebuah posisi serta memberikan kesempatan yang sama dalam upah dan manfaat bagi karyawan dengan keterampilan, usaha dan tanggung jawab pekerjaan yang sama.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Untuk mendukung kesejahteraan pegawai, Freeport Indonesia memiliki program khusus bagi mereka yang sudah purna tugas. Ada dua program yang dilaksanakan, yakni program pensiun Manfaat Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Freeport Indonesia (DPFI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi pemberian Jaminan Hari Tua (JHT).

PELATIHAN, PENDIDIKAN, DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

Karyawan adalah aset utama bagi Freeport Indonesia. Freeport Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusianya dengan melaksanakan suatu program pengembangan dan penilaian berbasis kompetensi yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Pada tahun 2011 perusahaan terus meningkatkan level kompetensi karyawannya. Freeport Indonesia terus berjuang untuk melanjutkan program pengembangan tenaga kerja dengan meningkatkan kompetensi B (spesialisasi) dan A (master), 24 siswa magang terdaftar dalam program D3 Admin Institut Pertambangan Nemangkawi - Politeknik Negeri Semarang, 11 karyawan mendapat bantuan beasiswa pada beberapa universitas di Indonesia, menyelenggarakan tugas ke luar negeri melalui program *secondment* di Amerika Serikat bagi 13 karyawan, dan menitikberatkan pada pengembangan karyawan Papua melalui Departemen Urusan Papua (Papuan Affairs Department) serta Institut Pertambangan Nemangkawi.

Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang didirikan untuk mendukung pengembangan masyarakat Papua terus berkembang. Selama tahun 2011 kami terus berfokus pada pengembangan masyarakat Papua untuk mengembangkan keterampilan agar dapat bekerja di Freeport Indonesia serta perusahaan-perusahaan mitra. Perekrutan pemegang diatur sesuai jumlah dan disiplin yang diidentifikasi dalam rencana suksesi sebagaimana dibutuhkan untuk menutup kebutuhan tenaga kerja terampil di Freeport

Indonesia di masa mendatang. Kami terus merekrut para pemegang baru melalui IPN dan saat ini telah terdaftar sebanyak 1.224 orang.

Kualitas pelatihan terus meningkat dengan penambahan alat baru dan pengembangan instruktur. Semua instruktur telah diberikan kesempatan untuk mengikuti program instruktur Sertifikat 4. Para instruktur untuk pelatihan *Haul Truck* (Kendaraan alat berat) dan Kendaraan Ringan telah memperoleh sertifikasi teknis untuk memastikan tingkat keterampilan serta pengetahuan instruktur yang tinggi.

Pelatihan & Pengembangan	Pencapaian 2011 (Jumlah Peserta)
Komputer	4,844
Perawatan Mekanis	22,735
Perawatan Listrik	6,592
Penilaian Kompetensi	41,892
Sertifikasi	3,989
Bahasa/Literasi	4,042
Program Kepemimpinan	33,186
Pelatihan di luar Tempat Kerja	421
Operator	170,147
Keselamatan Kerja & Lingkungan	97,574
Program Pemagangan	4.934

Tabel Pengembangan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2011.

IPN dan Pembangunan Daerah



Pelatihan, pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan komponen-komponen penting untuk menjamin efisiensi operasi dalam jangka panjang untuk bisnis apapun. Hal ini menjadi lebih penting manakala beroperasi dalam wilayah yang sedang berkembang tanpa suatu sejarah panjang program pendidikan yang maju. Program-program pelatihan kerja di Papua harus menawarkan dari sekedar pengembangan keterampilan teknis. Selama 2011, Freeport Indonesia menyediakan 2.565.648 jam pelatihan untuk program pra-magang dan magang bagi masyarakat setempat. Ratusan putra Papua sedang berusaha menguasai keterampilan pertambangan untuk karir yang potensial dalam perluasan operasi-operasi bawah tanah Perusahaan. Program-program pelatihan mencakup keterampilan baca, tulis, dan dasar berhitung hingga program pra-magang bagi individu tanpa pengalaman kerja sebelumnya, magang teknis lanjutan, pengembangan karir dan kepemimpinan, serta program pengelolaan bisnis yang memberikan keterampilan kelas dunia bagi para karyawan kami.

Pada tahun 2003, selaras dengan komitmen pengembangan jangka panjang sumberdaya manusia Papua untuk angkatan kerja, Freeport Indonesia membentuk Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Tujuan jangka panjang Institut ini adalah memberikan kesempatan pra-magang, magang, dan pengembangan karir lanjutan bagi putra-putri asal Papua dan putra-putri Indonesia lainnya setiap tahun. IPN yang berlokasi di kawasan industri Kota Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, ini merupakan satu-satunya yang didirikan secara spesifik untuk memberikan keahlian yang dibutuhkan dalam industri pertambangan. Program yang dikembangkan sangat ketat, menyeimbangkan antara teori dan kecakapan teknis dengan langsung penerapan lapangan. Karena itu, IPN mempunyai potensi untuk memberi sumbangan alih pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi industri pertambangan di Papua, bahkan Indonesia.

Selama tahun 2003-2011, telah tercatat lebih dari 3.783 siswa magang (90 persen Papua dan 10 persen Non-Papua). Dari 2003-2011, hampir sekitar 1.764 siswa magang telah dikontrak oleh Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor. Program pra magang menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kebutuhan dasar seperti

membaca dan menulis. Sedangkan para peserta program magang menerima pelatihan teori dan praktik lapangan dalam hal peleburan logam, penanganan mesin berat, pengoperasian peralatan, pekerjaan kelistrikan dan instrumentasi, tugas administratif dan tata usaha serta berbagai kegiatan lain. Lulusan program magang dapat menerima penempatan kerja di mana pun mereka kehendaki, namun diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Freeport Indonesia dan mitra kerjasamanya.

Selain program magang, terdapat dua program dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu program Diploma 3 administrasi niaga yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Semarang untuk keturunan Papua non-karyawan Freeport Indonesia berusia 18-21 tahun, dan untuk program D 3 ini disediakan sekitar 24 kursi setiap dua tahun. Ini merupakan program tiga tahun, dengan masa kuliah enam minggu di Papua dan dua minggu di Semarang yang merupakan kombinasi antara teori dan praktek. Pada tahun 2007, IPN dan manajemen Freeport Indonesia mengikat kemitraan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menawarkan program Master of Business Administration kerjasama Freeport Indonesia dengan ITB. Hingga 2011 program MBA Freeport Indonesia - ITB telah meluluskan 72 karyawan.



(Foto atas dan bawah) Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) menyiapkan tenaga kerja asli asal Papua untuk siap memasuki industri modern seperti pertambangan. IPN dibangun dan dikelola Freeport Indonesia dan berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan nilai inti dari perusahaan kami dan salah satu isu paling nyata dalam pembangunan berkelanjutan kami. Kami percaya semua cedera akibat kecelakaan kerja dan penyakit terkait dengan pekerjaan dapat dicegah. Produksi yang aman menangkap esensi dari falsafah kami bahwa pertimbangan keselamatan dan kesehatan merupakan bagian integral dari, dan bersesuaian dengan, semua fungsi manajemen dalam organisasi. Kami mempertimbangkan prakarsa keselamatan dan kesehatan, baik selama maupun di luar jam kerja, sebagai investasi yang sangat penting bagi karyawan kami.

Mendorong para karyawan untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas keselamatan mereka dan menjaga rekan kerja mereka merupakan praktik bisnis yang baik. Di luar itu, kami menjunjung keselamatan sebagai nilai inti untuk operasi-operasi kami. Keselamatan merupakan ukuran kunci yang digunakan dalam pengelolaan kinerja perusahaan dan program pengembangan karyawan dan, oleh karenanya, kami mendorong praktik-praktik kerja yang aman untuk seluruh angkatan kerja kami.

Melaksanakan sebuah program keselamatan yang efektif untuk operasi yang sedemikian besar dan beragam melibatkan lebih dari 23.000 karyawan dan kontraktor yang terlibat dalam kegiatan penambangan dan peleburan, pengolahan bijih, pembangkit tenaga listrik, operasi pengangkutan darat, udara, pelabuhan, dan kapal laut, pusat-pusat permukiman, asrama, dan pengelolaan sebuah hotel merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Hal ini melibatkan fokus pengelolaan dan penyeliaan; suatu sistem pengelolaan keselamatan untuk setiap aspek operasi; pelatihan keterampilan dan penyeliaan pendahuluan, dasar, dan khusus termasuk kursus penyegaran tahunan; dan sebuah sistem untuk melacak hasil dan kemajuan dalam mencapai sasaran-sasaran keselamatan.

KINERJA KESELAMATAN

Kegiatan produksi yang aman menentukan tujuan akhir dari perbaikan berlanjut terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kami. Dengan menetapkan sasaran-sasaran keselamatan yang khusus untuk setiap operasi, kami akan terus memusatkan perhatian pada perbaikan kinerja keselamatan perusahaan. Komponen-komponen terukur dari segala sasaran keselamatan menjadi bagian dari peninjauan ulang kinerja tahunan operasi di akhir tahun.

Selama 2011, *Lost Time Incident Rate* (LTIR/Tingkat Insiden Kehilangan Waktu) per 200.000 jam kerja kami adalah 0,06, berada di bawah target tahun 2011 sebesar 0,09. *Total Recordable Incident Rate* (TRIR/Total Tingkat Insiden Tercatat) Freeport Indonesia adalah 0,27 sebuah peningkatan dibandingkan 0,35 di tahun 2010 dan sekali lagi memberikan perbandingan yang cukup baik dengan target 2011 sebesar 0,33.

Freeport Indonesia sedang memusatkan perhatian pada pendekatan penilaian risiko untuk mencegah kecelakaan, menghindari kasus kematian apapun di masa mendatang, dan menekankan keterlibatan mereka yang bukan staf dalam proses pengelolaan keselamatan. Kejadian kasus kematian apapun di tempat kerja tidak dapat diterima, dan kami teramat menyesal dengan kehilangan nyawa ini. Perusahaan telah mengidentifikasi akar-akar penyebab kasus kematian ini dan melakukan upaya untuk mencegah terulangnya kejadian.

Selama tahun 2011, tidak dilakukan audit *Occupational Health & Safety Advisory Services* (OHSAS) 18001:2007, berkenaan dengan terjadinya mogok kerja karyawan.

KESIAPAN DAN TANGGAP DARURAT

Kesiapan dan tanggap darurat merupakan komponen mendasar dari kegiatan program keselamatan operasi kami. Kami mempunyai 67 tenaga tanggap darurat yang terlatih untuk secara efektif mengelola situasi yang potensial darurat. Bekerja sama dengan badan-badan Pemerintah Daerah, kami mengidentifikasi dan merencanakan sejumlah skenario untuk memastikan ketepatan koordinasi peralatan dan personel dalam mengatasi situasi yang potensial darurat. Latihan uji coba, pendidikan masyarakat, dan pertemuan koordinasi secara berkala membantu kami mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola jenis situasi darurat apa pun untuk melindungi angkatan kerja kami dan masyarakat di sekitar operasi perusahaan.

FUNGSI PERUSAHAAN YANG LEBIH LUAS

Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia atau *Emergency Response Group* (ERG) sering memberikan bantuan profesional tanggap darurat melampaui batas-batas daerah proyeknya. Pada tahun 2010, tiga bencana alam melanda Indonesia, Banjir di Wasior Papua Barat, Gunung Meletus di Yogyakarta, dan Tsunami di Mentawai dimana ketiga bencana tersebut memakan korban ratusan orang dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Selang berapa lama setelah bencana ini terjadi, Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia tiba di lokasi untuk membantu evakuasi dan proses pencarian dan penyelamatan. Tim juga mendistribusikan bantuan perusahaan yaitu kebutuhan mendesak berupa pakaian, bahan makanan, dan air, di samping membantu kelancaran tim-tim kesehatan untuk mencapai para korban bencana. Dalam tahun-tahun belakangan, Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia telah menerima sejumlah penghargaan untuk berbagai upaya tersebut.

STUDI KASUS:



Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Group/ ERG) Freeport Indonesia dengan motto "We Fight What You Fear" selalu siap siaga untuk merespon situasi darurat.

Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja Freeport Indonesia, Solihin, menyatakan, "Apa yang tim telah lakukan sejalan dengan komitmen Freeport Indonesia untuk berkontribusi dan memberikan kembali kepada masyarakat. Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia secara terus-menerus meningkatkan profesionalitas mereka."

Tim Tanggap Darurat Melanjutkan Arah Kemenangannya

Selama empat tahun berturut-turut, Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia berhasil memenangi the Indonesia Fire & Rescue Challenge yang diadakan setiap tahun.

Lebih lanjut, enam anggota Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia menerima *wing* pelayanan dari Badan SAR Nasional untuk peran mereka dalam operasi pencarian dan penyelamatan pesawat Pilatus Porter yang jatuh pada April 2009 di Gunung Gergaji, Papua.

Setelah upacara penyematan,

KESEHATAN KERJA

Pertambangan dalam sejarahnya dilihat sebagai usaha yang berbahaya dan penuh ancaman. Mengenali dan mengelola ancaman-ancaman fisik yang terjadi dalam proses penambangan menjadi komponen-komponen penting dari program keselamatan dan kesehatan kami. Mengidentifikasi ancaman-ancaman ini memungkinkan setiap operasi untuk melakukan mitigasi melalui pengendalian terekayasa atau administratif, atau melalui penggunaan peralatan perlindungan pribadi.

Pendekatan kami adalah evaluasi berlanjut terhadap proses dan operasi apapun yang potensial menghadirkan suatu ancaman. Apabila suatu risiko teridentifikasi, kami mengambil langkah untuk mengukurnya dan kemudian mengendalikannya melalui cara-cara proaktif untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dari angkatan kerja kami.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan para karyawan, Freeport Indonesia telah memiliki suatu program kesehatan karyawan baik wajib maupun pilihan. Penyelenggaraan Tes Kesehatan Tahunan, penyediaan klinik di wilayah kerja hingga akses ke rumah sakit serta program dan fasilitas olahraga yang dapat dipilih dan digunakan oleh karyawan merupakan bagian dari program tersebut.

Kami menyadari dan prihatin terhadap prevalensi HIV dan AIDS, terutama di antara anggota masyarakat dalam areal kontrak kerja kami. Perusahaan menyadari bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit yang perlu ditangani dengan pendekatan medis yang tepat dan pemahaman aspek-aspek sosial dari masalah ini. Pada tahun 2011, Departemen Community and Industrial Public Health & Malaria Control (PHMC) Freeport Indonesia telah melaksanakan sesi pelatihan HIV & AIDS bagi total 15.000 orang dewasa, baik karyawan maupun anggota masyarakat. Kegiatan pendidikan HIV/AIDS untuk para karyawan dilakukan melalui pusat-pusat pendidikan di tempat kerja, dan melalui penggunaan saluran TV internal tertutup perusahaan, serta media kampanye lainnya di wilayah perusahaan. Sedangkan kepada masyarakat, pendidikan diberikan melalui klinik-klinik kesehatan Community Public Health and Malaria Control (CPHMC) Freeport Indonesia, posyandu, sekolah, tempat ibadah, dan pada saat acara khusus seperti peringatan hari HIV/AIDS, hari TB, hari malaria, dan lain-lain.

Pernyataan kebijakan Freeport Indonesia tentang HIV/AIDS mengakui implikasi-implikasi penting dari HIV dan AIDS pada angkatan kerja dan pada masyarakat setempat serta berupaya untuk mengendalikan transmisi penyakit sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia dan rekomendasi-rekomendasi World Health Organization (WHO), International Labor Organization (ILO), U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), dan organisasi kesehatan internasional relevan lainnya. Selaras dengan kebijakan non-diskriminatif perusahaan, peraturan-peraturan pemerintah menyangkut HIV dan AIDS, serta pandangan ILO, maka Freeport Indonesia menjunjung pendekatan yang non-diskriminatif dan adil bagi orang-orang dengan HIV atau AIDS.

Freeport Indonesia juga melaksanakan program-program pengendalian malaria terpadu berkelas dunia, dan mempunyai sebuah pendekatan terkoordinir untuk melawan penyakit TBC.

Freeport Indonesia mendukung program-program komprehensif untuk menanggulangi HIV/AIDS di tempat kerja dan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan melalui pendidikan pencegahan, konseling, dan penanganan medis.





(Foto kiri, kanan) Para calon Peer Leader Educator dari perusahaan-perusahaan anggota Koalisi Perusahaan-Perusahaan Peduli HIV/AIDS (Indonesian Business Coalition on AIDS) cabang Papua mengikuti pelatihan Basic Standardization Training sebagai bagian dari Program Cerdas HIV/AIDS di Tempat Kerja.

IBCA Cabang Papua Berdiri, Beranggotakan Perusahaan-Perusahaan Kontraktor Freeport Indonesia

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) I Gusti Made Arka meresmikan berdirinya Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA) Cabang Papua di Kuala Kencana, Papua (10/11).

Pembentukan IBCA Cabang Papua merupakan upaya Freeport Indonesia untuk mengajak para mitra kerjanya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. IBCA Cabang Papua beranggotakan sembilan perusahaan yang merupakan kontraktor Freeport Indonesia, yaitu PT Trakindo Utama, PT Puncak Jaya Power, Sucofindo, Airfast Indonesia, Pangansari Utama, PT Redpath, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, Sandvik dan Buma Intinaker.

"Koalisi institusi swasta dalam memerangi AIDS ini merupakan upaya nyata dari perusahaan-perusahaan untuk membantu pemerintah dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs)", kata Director, EVP & CAO Freeport Indonesia Sinta Sirait mewakili IBCA. Freeport Indonesia merupakan salah satu pendiri dari IBCA yang beranggotakan tujuh perusahaan; British Petroleum, Freeport Indonesia, Gajah Tunggal, Chevron, Sintesa Group, Sinar Mas dan Unilever. Ketujuh perusahaan tersebut sepakat untuk membentuk sebuah koalisi yang program utamanya adalah memastikan adanya kebijakan yang tepat tentang HIV/AIDS di tempat kerja pada level manajemen. Sementara di tingkat karyawan memastikan terbentuknya kesadaran yang tinggi terhadap bahaya HIV/AIDS. Mereka juga bersepakat untuk menghilangkan diskriminasi dan stigmatisasi bagi penderita HIV/AIDS (ODHA) di tempat kerja.

Country Director IBCA Evodia Iswandi sangat berterima kasih kepada manajemen Freeport Indonesia atas terbentuknya koalisi baru tersebut. "Pembentukan IBCA Cabang Papua merupakan kontribusi nyata sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Papua", katanya.

Sementara itu, mewakili manajemen Freeport Indonesia, Vice President Social Outreach & Local Development Arief Latif menegaskan bahwa HIV/AIDS adalah masalah bersama, maka diperlukan upaya bersama untuk menanganinya. "Freeport Indonesia memiliki kebijakan dan program dalam penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Freeport Indonesia juga bersama pemerintah dan masyarakat terus berupaya memerangi penyebaran penyakit ini", katanya.

"Peresmian IBCA Cabang Papua merupakan sesuatu yang luar biasa, sangat strategis dalam upaya penanggulangan AIDS, tidak hanya di Papua namun juga secara nasional", kata Dr. Nafsiah Mboi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional. Nafsiah menambahkan bahwa IBCA merupakan sebuah model *public - private partnership*. "Dimana dalam upaya mengatasi masalah bangsa diperlukan kerjasama antara sektor swasta, pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah HIV/AIDS", ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Freeport Indonesia dan semua perusahaan peserta IBCA Cabang Papua, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenakertrans Made Arka menuturkan bahwa aspek-aspek implementasi upaya pencegahan penyakit menular (HIV/AIDS) di tempat kerja sangat sesuai dengan amanat Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja. "Regulasi itu mengamankan kepada semua perusahaan agar melaksanakan kewajiban mencegah penyakit akibat kerja, di antaranya penyakit menular", katanya. Kemenakertrans juga telah menerbitkan sebuah ketentuan teknis tentang pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja.

Tak hanya perwakilan dari perusahaan mitra Freeport Indonesia yang menjadi anggota IBCA Cabang Papua, peresmian itu juga dihadiri oleh CEO Asia Pacific Business Coalition on AIDS (APBCA) Stephen Grant, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Erens Machboen, manajemen Freeport Indonesia, para Relawan AIDS Freeport Indonesia dan undangan lainnya.



5.1

HAK ASASI MANUSIA

KEBIJAKAN

Seperti yang ditegaskan induk perusahaannya Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Freeport Indonesia, mempunyai komitmen yang bulat dan tanpa ragu terhadap hak asasi manusia (HAM). Kami menjalankan operasi kami dengan cara yang konsisten dengan Deklarasi Universal HAM. Induk perusahaan kami menjadi penandatanganan, serta aktif berpartisipasi dalam, Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan HAM Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., berlaku wajib bagi semua operasi dan kontraktor termasuk Freeport Indonesia. Kebijakan ini mensyaratkan perlakuan dan kondisi kerja yang adil bagi semua karyawan, termasuk hak untuk bebas berserikat dan musyawarah bersama, serta melarang penggunaan pekerja anak. Kami tidak bertenggang rasa terhadap bentuk kekerasan apapun dan melindungi siapapun yang melaporkan dugaan pelanggaran.

Freeport Indonesia juga menempatkan Petugas Kepatuhan HAM di wilayah operasi. Para petugas kepatuhan HAM ini memastikan bahwa pelaporan setiap kemungkinan pelanggaran HAM didokumentasi, diselidiki, dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Komunikasi dan pelatihan tentang Kebijakan HAM Perusahaan juga diberikan kepada para karyawan, kontraktor, dan jika diperlukan, anggota satuan petugas pemerintah untuk mendukung pelaksanaan yang konsisten dan kesadaran semua pihak yang bertanggung jawab.

PELATIHAN HAM

Selama tahun 2011, Freeport Indonesia telah menjalankan lebih dari 27.000 jam pelatihan pada kebijakan sosial, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia untuk lebih dari 13.000 karyawan, dan sosialisasi hak asasi manusia bagi 1.760 peserta dari TNI/POLRI, petugas keamanan, kontraktor lokal, dan pelajar. Freeport Indonesia juga melakukan Sertifikasi Kepatuhan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak Asasi Manusia tahun 2010 dengan 100 persen dari responden melaporkan kepatuhan (proses pengumpulan Sertifikasi Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kepatuhan saat ini).

Semua personel keamanan Freeport Indonesia dan semua kontraktor keamanan swasta/pihak ketiga telah menerima pelatihan HAM. Lebih lanjut, pada tahun 2011, kantor HAM Freeport Indonesia memberikan pelatihan kepada unit usaha masyarakat, Organisasi Mitra Masyarakat (Ornop), personil polisi dan TNI, perusahaan penyedia jasa keamanan (Securicor/JAS) sebanyak 1.288 peserta.

Pada tahun 2010 dan 2011 Kantor HAM Freeport Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Pengembangan Masyarakat Lokal (Social Outreach & Local Development/Community Relations) Freeport Indonesia melakukan pelatihan kebijakan hak asasi manusia untuk beberapa kepala suku dan juga para pemuka organisasi adat di bawah LPMK, Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA), dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (LEMASKO). Freeport Indonesia juga telah mengeluarkan sebuah buku saku untuk penerapan Hak Asasi Manusia berjudul Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelatihan, perusahaan memberikan standar hak asasi manusia yang diterima secara internasional. Penekanan bagaimanapun diberlakukan sesuai dengan bidang staf yang sedang mengikuti pelatihan. Penyesuaian ini dilakukan melalui kasus dan metode penyampaian. Namun perusahaan terus melakukan perbaikan dalam pelatihan, misalnya dengan mempertimbangkan untuk menambah dimensi pencegahan konflik.



Kegiatan sosialisasi HAM kepada para petugas keamanan di kawasan operasional Freeport Indonesia.

TINJAUAN DAN PEMANTAUAN KEPATUHAN HAM

Freeport-McMoRan (FCX), dengan bantuan dari sebuah konsultan eksternal, telah melakukan peninjauan terhadap program hak asasi manusia di Freeport Indonesia pada semester kedua tahun 2010.

Beberapa hal spesifik yang ditinjau termasuk proses penilaian risiko, program pelatihan dan kesadaran, dan mekanisme keluhan untuk melaporkan insiden dan tuduhan. Salah satu hasil penting yang dicapai dari peninjauan ini adalah rekomendasi untuk melakukan penilaian risiko yang lebih kuat dan berfokus pada keamanan dan hak asasi manusia. Sebuah alat penilaian baru yang dihasilkan adalah mencakup masukan dari karyawan pada tingkat yang berbeda di organisasi untuk menunjukkan risiko dari dalam maupun dari luar wilayah proyek, termasuk risiko terhadap masyarakat lokal. Kami berencana meluncurkan sebuah proses penilaian risiko terkait hak asasi manusia yang telah diperbaharui di Freeport Indonesia tahun 2011.

MEKANISME PELAPORAN

Pada tahun 2011, 12 dugaan pelanggaran HAM yang telah dilaporkan kepada Petugas Kepatuhan HAM PTFI. Kasus-kasus ini tidak mencakup tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel Freeport Indonesia terhadap masyarakat, tapi terdapat beberapa insiden yang terjadi terhadap atau diantara karyawan kami. Sebagian besar dugaan tersebut (empat kasus) melibatkan personel aparat pemerintah, satu kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang melibatkan karyawan Freeport Indonesia, tiga kasus yang terkait hubungan ketenagakerjaan, dua kasus pelecehan intelektual dan dua kasus lainnya tidak teridentifikasi. Semua kasus telah didokumentasikan, dua kasus yang tidak teridentifikasi saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh pemerintah.

Kelima kasus kriminal tersebut melibatkan dugaan bahwa personel keamanan publik secara fisik mengintimidasi dan menyerang personel perusahaan atau kontraktor (tiga dari 5 kasus tersebut melibatkan personel keamanan yang merupakan karyawan Freeport Indonesia). Prosedur yang dilakukan oleh Freeport Indonesia adalah dengan memberitahukan para komandan langsung dari pelaku, yang kemudian menyelidiki kasus tersebut dan menentukan tindakan disipliner (per Januari 2011, tindakan disipliner telah diambil untuk empat kasus dan kasus kelima sedang dalam proses penyelidikan). Pada tahun 2011, Freeport Indonesia mengalami peningkatan pelaporan dugaan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak keamanan negara (sembilan kasus HAM di 2010, meningkat menjadi 12 kasus HAM di 2011) dan penurunan dalam kasus yang melibatkan aparat keamanan (lima kasus pada tahun 2010, menurun menjadi empat kasus pada tahun 2011). Hal ini mengingatkan kami tentang pentingnya pelatihan lanjutan bagi pasukan keamanan negara yang ditempatkan di wilayah operasi kami dan peningkatan efektivitas mekanisme pengaduan Perusahaan.

KEAMANAN

Kami memberi sumber daya dan upaya manajerial yang nyata untuk mengawal rencana dan program guna menyediakan lingkungan kerja yang aman. Departemen-departemen keamanan internal kami menjalankan fungsi-fungsi seperti melindungi sarana-sarana Perusahaan, memantau pengapalan berbagai pasokan dan produk Perusahaan, membantu pengendalian arus lalu lintas, dan membantu operasi tanggap darurat.

Freeport Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah dalam perannya untuk menjaga ketertiban umum, menjunjung penegakan hukum, dan melindungi personil dan properti Perusahaan. Di samping tim keamanan Freeport Indonesia, yang jumlahnya sekitar 800 karyawan (termasuk administrasi dan satuan pengamanan), satuan kepolisian ditugaskan berdasarkan suatu keputusan presiden untuk melindungi Tambang Grasberg, yang telah digolongkan sebagai sebuah aset vital nasional. Jika diundang oleh pihak kepolisian, satuan militer Indonesia juga dapat ditugaskan untuk memberikan keamanan tambahan. Terkait dengan insiden-insiden keamanan yang dialami pada 2010, sebuah misi bersama antara personil kepolisian dan militer ditugaskan dan secara bersama-sama berjumlah sekitar 1.600 personil dalam daerah proyek Freeport Indonesia dan sekitarnya.

Bagian Freeport Indonesia untuk menunjang biaya keamanan yang disediakan Pemerintah mencapai 14 juta dolar AS pada 2011. Dukungan penunjang ini terdiri dari beragam biaya prasarana dan biaya lain, seperti makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, uang saku untuk menutupi biaya tidak terduga dan administratif, dan program bantuan masyarakat yang dijalankan oleh tentara dan polisi untuk mendorong keselarasan dengan masyarakat setempat.

Freeport-McMoRan pada tahun 2000 mendapatkan sebuah peran memimpin dalam pengembangan dan organisasi bersama dari the U.S. State Department-British Foreign Office Voluntary Principles on Security and Human Rights. Setiap tahun, para peserta program ini, termasuk berbagai perusahaan pertambangan, minyak, dan gas serta organisasi HAM lain, bertemu untuk meninjau kembali pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut; juga mencari cara-cara yang lebih baik dalam memberikan keamanan bagi operasi-operasi industri ekstraktif di seluruh dunia untuk melindungi para karyawan dan investasi sekaligus menjamin kepatuhan tertinggi pada HAM. Kami memaparkan program dan hasilnya secara tahunan pada Voluntary Principles Plenary.

STUDI KASUS:

Melaksanakan Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Perusahaan telah menetapkan Nota Kesepahaman dengan Republik Indonesia yang merinci hubungan kerja antara Perusahaan dan petugas keamanan umum yang ditugaskan untuk melindungi daerah proyek kami. Pada 2010, akibat penembakan-penembakan yang terjadi sepanjang jalan menuju jalur tambang kami di Papua, kami mengambil langkah-langkah nyata untuk menerapkan Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia di antara satuan petugas keamanan Indonesia dikarenakan risiko keamanan yang tinggi.

Freeport Indonesia meminta agar semua anggota kepolisian dan militer pendukung yang ditugaskan untuk memberikan keamanan dalam daerah proyek untuk membaca dan memahami Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia serta Kebijakan HAM Freeport Indonesia.

Pada tahun 2011, pelatihan program hak asasi manusia Freeport Indonesia dan Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia diberikan kepada lebih dari 1.000 polisi dan personil militer. Para anggota militer dan polisi menerima presentasi tentang hak asasi manusia setidaknya dua kali sebelum awal rotasi mereka di Freeport Indonesia; satu kali di markas mereka dan sekali lagi pada saat kedatangan mereka di Papua. Terjemahan bahasa Indonesia dari Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia juga didistribusikan ke lebih dari 2.000 pegawai pemerintahan setempat, perusahaan, dan personil keamanan swasta. Untuk melihat Laporan Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia kunjungi website kami di www.ptfi.com



Buku saku Pedoman Prinsip-Prinsip Sukarela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

5.2

HAK-HAK SUKU ASLI

REKOGNISI TERHADAP HAK ULAYAT TANAH

Sesuai UUD Republik Indonesia, semua lahan tak diolah adalah milik Pemerintah Indonesia dan semua kekayaan mineralnya menjadi milik Pemerintah Indonesia. Kesepakatan Januari 1974 antara Freeport Indonesia dengan Suku Amungme merupakan bentuk pengakuan pertama di Indonesia terhadap hak ulayat masyarakat atas tanah perburuan dan pengumpulan sumber daya alam tradisional mereka. Mengikuti perjanjian itu, Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui hak atas pemakaian tanah ulayat. Pengakuan penggunaan tanah ulayat dalam bentuk rekognisi ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang melepaskan hak ulayat mereka. Sebagai hak properti yang bersifat komunal Freeport Indonesia telah memberi rekognisi dalam beberapa tahun ini melalui program-program yang disepakati bersama-sama masyarakat Papua setempat dan Pemerintah Indonesia.

Dua program rekognisi jangka panjang telah berjalan di daerah dataran tinggi dan dataran rendah di wilayah kerja kami. Kedua program ini menyediakan prasarana, proyek pembangunan sosial ekonomi, termasuk perumahan, gedung sekolah, asrama siswa, klinik kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan umum, gedung perkantoran, jalan raya, jembatan, tangki air bersih, kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, sarana olah raga, serta studi kelayakan tentang kesempatan usaha.

- Program Rekognisi bagi Suku Kamoro memberikan kompensasi untuk pelepasan lahan kepada Pemerintah Indonesia oleh lima desa Kamoro di daerah dataran rendah, termasuk lahan yang digunakan untuk pengendapan Sirsat, sarana dok kargo, pelabuhan, dan jalur transmisi listrik. Program ini awalnya fokus pada prasarana fisik, termasuk perumahan dan sarana lingkungan. Akan tetapi, sasaran pembangunan saat ini dipusatkan pada pengembangan ekonomi dan sumber pendapatan, pendidikan kesehatan dan akses pada sarana kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan menengah dan tinggi, pembangunan kampung dan lembaga sosial, dan pelestarian budaya Kamoro. Termasuk juga adalah program-program untuk mengembangkan kebun sagu dan kelapa, serta membina komersialisasi industri perikanan setempat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat merujuk kepada bagian pengembangan ekonomi berbasis desa pada laporan ini.
- Program Pengembangan Tiga Desa merupakan program yang serupa untuk tiga desa Amungme di dataran tinggi. Program ini memberikan tambahan rekognisi bagi anggota Suku Amungme yang hidup paling dekat dengan tambang dan telah menerima bantuan berdasarkan perjanjian pada 1974, sejalan dengan perluasan dan keberhasilan lingkup kegiatan kami. Program ini mencakup pembangunan jembatan, jalan raya, tanggul pelindung, perumahan, layanan air dan saluran air limbah, serta pengembangan sebuah sistem pembangkit listrik tenaga air.

PENANGANAN KELUHAN

Sejak memulai operasi di Tanah Papua, Freeport Indonesia senantiasa berprinsip untuk menghormati dan menghargai masyarakat lokal sebagai pemilik ulayat sekaligus salah satu pemangku kepentingan yang utama. Muncul berbagai persoalan baru yang timbul akibat persinggungan antara operasi perusahaan dengan berbagai kepentingan yang terdapat pada masyarakat. Selama tahun 2010, Freeport Indonesia menerima beberapa keluhan dari kelompok masyarakat. Keluhan-keluhan tersebut memiliki isu yang berbeda-beda dan memerlukan tanggapan yang berbeda pula.

Dalam menanggapi berbagai keluhan tersebut Freeport Indonesia terus berupaya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak sehingga baik Freeport Indonesia dan kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dan adil. Untuk menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Freeport Indonesia telah mengembangkan mekanisme respon keluhan berbasis online untuk menampung dan mengklasifikasikan keluhan berdasarkan jenis dan tingkatannya. Pengembangan sistem ini dilakukan secara global di seluruh area tambang Freeport-McMoRan (FCX) di seluruh dunia. Dengan sistem ini diharapkan Freeport Indonesia dan FCX mampu memetakan jenis-jenis keluhan masyarakat, meresponnya dengan lebih cepat, serta mendapatkan solusi yang lebih tepat dan adil bagi kedua belah pihak.

Selama tahun 2011 terdapat 15 keluhan yang disampaikan masyarakat ke Freeport Indonesia yang mencakup isu: lingkungan, hak ulayat, kompensasi atas jasa, ganti rugi tanam tumbuh, penyerobotan wilayah, dan lain-lain. Beberapa tuntutan yang signifikan antara lain:

- **Sedimentasi di Muara Sungai Ajkwa**

Pada tahun 2011, Freeport Indonesia terus menindak lanjuti keluhan masyarakat tentang lingkungan yang masuk pada 2010. Keluhan ini terkait dengan meningkatnya sedimentasi di Muara Sungai Ajkwa. Masyarakat mengeluhkan pendangkalan muara sungai yang telah mengganggu jalur tradisional transportasi air. Dalam AMDAL Freeport Indonesia 300K yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia, perusahaan telah memprediksi bahwa peningkatan kegiatan tambang bawah tanah akan mempercepat tingkat pendangkalan di muara Sungai Ajkwa. Untuk menanggapi keluhan masyarakat ini, Freeport Indonesia mengundang pihak ketiga (Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya/ITS) untuk melakukan survei dan memberikan rekomendasi sarana transportasi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang paling terdampak oleh pendangkalan tersebut. Pada bulan Maret 2011, ITS telah mempresentasikan rekomendasinya kepada Freeport Indonesia dan Pemerintah Daerah. Freeport Indonesia memutuskan untuk bekerja bersama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana transportasi berupa perahu kecil dan bis bagi masyarakat tersebut. Pada tahun 2012, Freeport Indonesia dan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi keputusan ini kepada masyarakat setempat.

- **Hak Ulayat**

Freeport Indonesia telah menerima keluhan dari masyarakat setempat tentang hak ulayat tanah yang terdampak dari operasi Freeport Indonesia. Sesuai dengan hukum tentang hak ulayat yang ada di Indonesia, Freeport Indonesia tidak memiliki wewenang dalam penentuan batas hak ulayat antar kelompok suku di sekitar wilayah operasi Freeport Indonesia. Namun demikian, Freeport Indonesia tetap bekerja dengan pemerintah daerah untuk menindak lanjuti tuntutan tersebut dan mencari solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Freeport Indonesia memberikan kompensasi hak ulayat kepada masyarakat asli daerah-daerah yang terdampak melalui berbagai program pengembangan masyarakat lokal, termasuk pemberian Dana Perwalian kepada suku Amungme dan Kamoro selama tambang beroperasi. Sejak tahun 2001, Freeport Indonesia telah berkontribusi lebih dari 29 juta dolar AS untuk Dana Perwalian ini. Selain itu, Freeport Indonesia telah melaksanakan program rekognisi di desa-desa Amungme dan Kamoro yang terdampak melalui pembangunan infrastruktur dan program pengembangan masyarakat lainnya. Pada tahun 2011, Freeport Indonesia menerima 6 tuntutan hak ulayat dan kompensasinya dari berbagai kelompok masyarakat asli. Untuk mengatasi masalah ini, Freeport Indonesia juga telah menyetujui bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat untuk melakukan pemetaan wilayah adat, sekaligus sebagai antisipasi munculnya tuntutan hak ulayat di masa mendatang.

Lapter Mulu, Tingkatkan Mobilisasi Masyarakat

Lapangan terbang (lapter) yang dibangun Freeport Indonesia di ketinggian 1.950 meter di atas permukaan laut di Kampung Tsinga sebagai bagian dari Program Pembangunan Tiga Desa oleh Freeport Indonesia untuk menyokong desa-desa Suku Amungme yang terdekat dengan operasi pertambangan Grasberg. Keterbatasan akses jalan di dataran tinggi ini, adanya lapter Mulu ini membuka akses pada layanan barang dan jasa. Lapter juga membuka jalur baru bagi para pendaki gunung untuk mengakses Puncak Jaya (titik tertinggi antara Pegunungan Himalaya dan Pegunungan Andes) dan hal tersebut berpotensi, meningkatkan kesempatan pengembangan ekowisata di dataran tinggi. Lapter Mulu telah selesai dibangun pada tahun 2010.



Lapangan terbang di atas bukit dengan ketinggian 1.950 di atas permukaan laut di Desa Tsinga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dibangun oleh Freeport Indonesia untuk mempermudah akses masyarakat di dataran tinggi ke kota Timika.

6.1

KOMUNITAS

Keterlibatan masyarakat menjadi komitmen pembangunan berkelanjutan kami yang fundamental. Tujuan kami adalah menyatukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk kebutuhan dan keprihatinan para pemangku kepentingan kami, ke dalam keputusan-keputusan bisnis kami dan memastikan bahwa kami mengantisipasi, melakukan mitigasi, dan memperbaiki dampak-dampak sosial dari operasi kami. Pada tahun 2011, Freeport Indonesia menginvestasikan sekitar 49,8 juta dolar AS dalam bentuk infrastruktur dan jasa untuk kepentingan masyarakat (jumlah tersebut tidak termasuk bantuan infrastruktur dan jasa yang didanai oleh Dana Kemitraan Freeport Indonesia untuk Pembangunan Masyarakat). Bantuan dan investasi ini mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian malaria sebesar 7,4 juta dolar AS yang dikelola oleh Departemen Community Public Health & Malaria Control Freeport Indonesia. Bantuan dan investasi lainnya termasuk pengoperasian asrama dan penyediaan sekolah untuk pelajar dari masyarakat asli dataran tinggi di sekitar wilayah Freeport Indonesia. Sedangkan secara total 94,6 juta dolar AS untuk investasi yang diberikan Freeport Indonesia kepada komunitas, termasuk diantaranya Dana Kemitraan Freeport Indonesia untuk Pengembangan Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK).

Di tahun 2011, program-program membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan terus kami lakukan yang mencakup upaya memahami kebutuhan masyarakat; menyediakan sumberdaya, termasuk dukungan teknis dan finansial; menawarkan pengetahuan dan keahlian dari perusahaan dan para narasumber luar; dan mendorong para sukarelawan yang merupakan karyawan Freeport Indonesia untuk membantu rekan sesamanya. Membangun dan melestarikan komunitas-komunitas yang sehat menjadi tanggung jawab Freeport Indonesia bersama Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat adat, para pemilik unit usaha, dan anggota masyarakat lainnya. Merupakan kepentingan utama dari setiap orang untuk menciptakan komunitas yang kuat beserta ekonomi yang tangguh dan beragam, yang dapat mandiri di saat industri pertambangan ada kalanya jatuh bangun.

Kami percaya kami mampu memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari kelompok-kelompok masyarakat di dekat kawasan operasional kami, dengan bekerjasama erat dengan kelompok-kelompok tersebut. Melalui cara-cara formal maupun informal seperti melalui pertemuan masyarakat, forum dan dewan bersama, serta para petugas Hubungan Kemasyarakatan Freeport Indonesia yang kesehariannya bekerja bersama para anggota masyarakat. Kami terbuka terhadap masukan dari para pemangku kepentingan kami menyangkut masalah dan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas. Kami menggunakan umpan balik ini sebagai informasi bagi kemitraan serta keputusan investasi sosial dan pemberian derma kami. Hal ini bukan hanya akan mendukung membangun hubungan yang kuat dan kredibel dengan para anggota masyarakat, tetapi juga akan memfasilitasi pemanfaatan terbaik dari investasi kemasyarakatan kami.

MEMPERLANCAR HUBUNGAN PERUSAHAAN DAN KOMUNITAS

Ada dua program utama yang berkaitan dengan pengembangan hubungan baik antara perusahaan dan para pemangku kepetingan lokal. Kami melakukan pelatihan berkala dan berkesinambungan terhadap para staf keamanan kami mengenai hak asasi manusia.

Kedua, kami mempunyai divisi *Community Relations* yang fungsinya memberi masukan tentang aspek kesesuaian lokal dari program yang akan maupun sedang dijalankan, serta menyelesaikan ketegangan yang bisa saja muncul dengan pihak lain. Disadari bahwa program pembangunan kadang-kadang memunculkan ketegangan dan selalu membutuhkan komunikasi yang baik. Divisi ini sejak tahun 2008 berada dalam satu departemen dengan Departemen Social Outreach & Local Development/Community Relations (SLD/CR) untuk membantu kelancaran program pembangunan masyarakat.

MEMBANGUN HUBUNGAN YANG SALING MENGUNTUNGAN

Dalam upaya memperkuat komitmen kami untuk membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dan positif dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja kami, kami terlibat dalam dialog berlanjut dengan para tokoh masyarakat. Dialog-dialog ini telah bermuara pada perjanjian-perjanjian penting dengan masyarakat Amungme dan Kamoro, serta suku-suku asli lainnya yang memiliki ikatan tradisional dengan daerah ini.

Freeport Indonesia dan mitra kerjanya sejak 1996 telah memegang komitmen untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan Freeport untuk Pembangunan Masyarakat. Dana Kemitraan ini dikelola dan dicairkan oleh sebuah organisasi masyarakat adat di Timika yaitu Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK). LPMMAK dibina oleh sebuah Badan Musyawarah yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah, para tokoh-tokoh Papua, tokoh-tokoh masyarakat dari Suku Amungme dan Kamoro, dan Freeport Indonesia.

Badan ini berperan penting dalam menilai dan mengarahkan program, organisasi dan pengorganisasian yang didapatkan melalui diskusi aktif dan kritis mengenai gagasan-gagasan baru yang terukur dan implementatif. Interaksi tidak selalu mulus tetapi kesadaran dan keinginan bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran utama dalam menilai suatu program.

Badan Musyawarah LPMMAK menetapkan anggaran tahunan untuk tiga bidang program pembangunan utama kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi selain pendanaan untuk program-program yang mendukung kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Anggaran dibuat berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang ditentukan oleh Badan Pengurus LPMMAK. Proyek-proyek yang didukung oleh LPMMAK memberikan manfaat langsung pada anggota masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya yaitu Suku Dani, Moni, Ekari/Mee, Damal, dan Nduga. Suku-suku ini terwakili dalam Badan Pengurus LPMMAK melalui tokoh-tokoh masyarakat, gereja, dan pemerintahan mereka. Kantor sekretariat dan biro-biro program LPMMAK, yang menangani kegiatan sehari-hari organisasi, di akhir Desember 2011 mencakup 176 karyawan, 72 persen orang Papua.

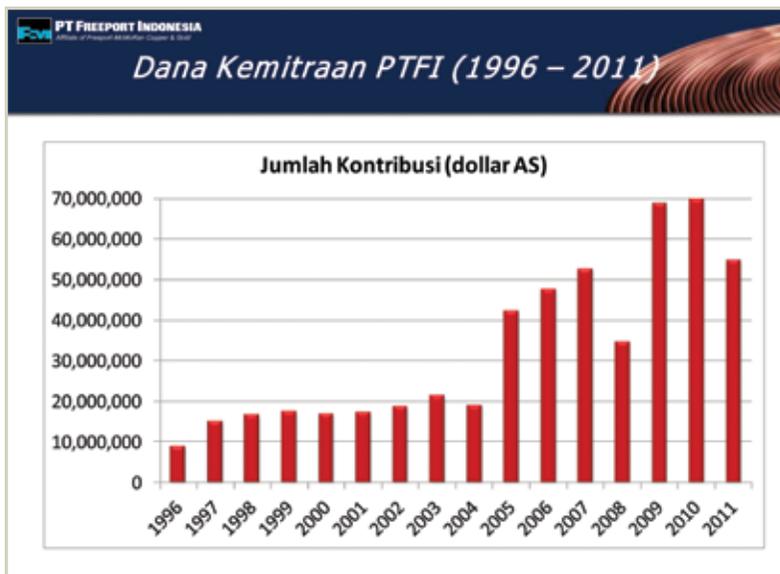
LPMMAK telah memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat setempat dengan mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi penduduk kampung-kampung di seluruh wilayah Mimika. Contohnya mencakup rumah sakit-rumah sakit di kota Timika dan Desa Banti di dataran tinggi yang merawat ribuan pasien setiap tahun. Pada tahun 2011, kedua rumah sakit tersebut telah melayani 156.860 pasien rawat inap dan rawat jalan, dimana sekitar 79 persen diantaranya adalah pasien tidak mampu yang mendapatkan subsidi penuh. Program pendidikan LPMMAK menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan (matrikulasi) bagi ribuan siswa dan mahasiswa Papua.



Pemberian Dana Perwalian ini merupakan suatu pengakuan terhadap kedua suku Amungme dan suku Kamoro sebagai pemilik hak ulayat atas wilayah kegiatan Freeport Indonesia dan pemberian dana ini dimulai sejak tahun 1996. Sampai dengan 2011 total Dana Perwalian yang telah diberikan oleh Freeport Indonesia lebih dari 29 juta dolar AS dengan alokasi pendanaan lebih dari 15 juta dolar AS untuk Amungme dan lebih dari 14 juta dolar AS untuk Kamoro.



Kesepakatan di Manado.



Komitmen untuk Dana Kemitraan pada 2011 mencapai sekitar 54,4 juta dolar AS, dengan total komitmen untuk dana itu mencapai hampir 521,8 juta dolar AS sejak awal pelaksanaannya di tahun 1996.

Tercatat pada tahun 2011 jumlah beasiswa baru telah diberikan bagi 618 mahasiswa dan siswa; serta program-program pengembangan ekonomi dan desa yang telah menyediakan proyek-proyek penciptaan sumber pendapatan pedesaan, penyediaan air bersih, sarana gereja, dan prasarana lain di kampung-kampung terpencil di Provinsi Papua. LPMK menjalankan program pembangunan yang akuntabel, terkelola secara profesional, dan berhasil, dimana programnya merupakan salah satu program pembangunan sosial terbesar yang didanai oleh swasta di Asia.

Pada 2001, Freeport Indonesia secara terpisah membentuk dana perwalian sukarela untuk Suku Amungme dan Kamoro. Perusahaan telah berkontribusi kurang lebih 1 juta dolar AS selama tahun

2010 dan, sesuai dengan perjanjian hak tanah ulayat yang berlaku, akan terus memberikan kontribusi sebesar 1 juta dolar AS per tahun untuk keberlanjutan hidup dari tambang. Dana-dana ini adalah tambahan dan dikelola secara terpisah dari Dana Kemitraan Freeport untuk Pengembangan Masyarakat.

Sebuah Nota Kesepahaman yang dicapai pada tahun 2000 (Forum MOU 200) oleh organisasi-organisasi lokal Amungme, Kamoro dan Freeport Indonesia memusatkan perhatian pada isu-isu sumber daya sosio - ekonomi, HAM, hak tanah ulayat, dan lingkungan. Perjanjian penting yang tercapai setelah lima

tahun perundingan ini, membina dialog berlanjut untuk meningkatkan hubungan yang saling memahami dan menghargai sehingga masyarakat setempat dapat mencapai aspirasi-aspirasi mereka, serta untuk melanjutkan hubungan-hubungan yang selaras.

Forum MOU 2000 dibentuk sesuai kesepakatan antara pihak Freeport Indonesia dan Lembaga Adat suku Amungme (LEMASA) dan suku Kamoro (LEMASKO) yang merupakan suku pemilik ulayat wilayah operasi Freeport Indonesia. Tujuan dari Forum MoU adalah sebagai forum komunikasi antara Freeport Indonesia dengan Lembaga Adat yang merupakan representasi masyarakat pemilik ulayat. Freeport Indonesia memberikan dukungan kepada Forum MoU 2000 dalam bentuk pendampingan terutama untuk peningkatan kapasitas organisasi LEMASA dan LEMASKO. Selain itu Freeport Indonesia juga memberikan bantuan dana untuk membiayai operasional organisasi. Pada tahun 2010 telah terlaksana pertemuan Forum MoU di Manado dengan keputusan mengenai kegiatan pemetaan tanah tradisional dan audit tahunan lembaga-lembaga tradisional yang menerima dana program pengembangan masyarakat dari Freeport Indonesia.

PEMATANGAN METODE

Beasiswa tidak lagi diberikan secara longgar, namun dengan proses seleksi tertentu. Beasiswa diberikan bertahap dan melalui proses administrasi tertentu untuk meningkatkan akuntabilitas. Sedangkan pada program sekolah berasrama dimana saat ini ada empat asrama di Mimika dan dua di Semarang. Proses penerimaannya berdasarkan kesepakatan para orang tua dan siswa untuk mengikuti tata cara yang berlangsung di asrama sekolah. Pendekatan pendidikan ini lebih menyeluruh dalam meningkatkan karakter, kemampuan menyerap pengetahuan, kemampuan hidup bermasyarakat, dan kesehatan diri. Program berasrama ini ditangani oleh organisasi-organisasi sosial yang telah memiliki pengalaman dalam mendidik anak-anak dari daerah terpencil. Bahkan organisasi-organisasi sosial ini masih terus melakukan penyesuaian dan perbaikan untuk membantu siswa dari Mimika dengan lebih baik. Metode lain yang diterapkan untuk membantu siswa adalah program matrikulasi bagi mahasiswa selama satu tahun agar dapat mengikuti sistem pendidikan nasional. Pemantauan dan evaluasi juga diperbaiki. Sejak dua tahun terakhir, pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa diutamakan pada bidang studi teknik dan pertanian, agar lebih banyak tenaga ahli teknik dan pertanian dihasilkan untuk mendukung pembangunan lokal.

PEMATANGAN ORGANISASI

Dalam menjalankan perbaikan metode pendidikan seperti di atas bukan hal yang mudah bagi LPMK. Organisasi ini dipandang sebagai badan yang mewakili kepentingan anggota masyarakat tujuh suku, dimana berlaku sistem pemberian berdasarkan pertimbangan hubungan sosial. Masyarakat memandang bahwa adalah hak mereka untuk mendapatkan bantuan dari LPMK tanpa perlu persyaratan. Hubungan tradisional dengan para pengurus, diperlukan kematangan dalam mengambil yang lebih akuntabel. Seiring dengan berkembangnya tingkat kematangan LPMK, para pengurus dapat meminimalkan dan menyelesaikan isu-isu dalam proses seleksi penerimaan beasiswa. Mereka menjadi lebih kompeten dalam menjelaskan masalah, latar belakang, maksud, tujuan dari pemberian beasiswa ini secara persuasif. Di sisi lain, adanya regenerasi dalam kepengurusan dalam pemerintahan dan LPMK yang kompeten memudahkan proses pelaksanaan metode baru.



Para pelajar sedang bersiap memulai aktifitas belajar di Sekolah berasrama Penjunan di Timika. Sekolah berasrama seperti Sekolah berasrama Penjunan merupakan salah satu solusi pembangunan bidang pendidikan di Papua, mengingat kondisi geografis yang sulit.

Program Pendidikan LPMAC: Transformasi Sosial dan Kultural

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAC) adalah mitra utama Freeport dalam upaya pengembangan masyarakat lokal. Karena pendidikan merupakan elemen penting bagi kemajuan masyarakat, maka Freeport Indonesia memfokuskan usaha pengembangan pendidikan masyarakat melalui sebuah organisasi masyarakat adat yang dalam perjalanannya senantiasa berusaha untuk memperbaiki sistem organisasinya guna mencapai kemajuan.

Freeport Indonesia memfokuskan usaha pengembangan pendidikan masyarakat melalui sebuah organisasi masyarakat adat yang dalam perjalanannya senantiasa berusaha untuk memperbaiki sistem organisasinya guna mencapai kemajuan.

Ketersediaan finansial memang merupakan prasyarat, namun perjalanan organisasi masyarakat adat ini dalam upayanya sendiri untuk terus memperbaiki hasil adalah sesuatu yang memberikan banyak pelajaran. Biro Pendidikan LPMAC menangani program pemberian beasiswa untuk anak SD dan SMP serta mahasiswa perguruan tinggi, perbaikan prasarana dan kurikulum sekolah di Kabupaten Mimika, dan program sekolah berasrama. Program pendidikan yang dikelola oleh lembaga masyarakat ini dimulai sejak tahun 1990-an. Pada awalnya program tersebut dijalankan hanya dengan tujuan memberi kesempatan dengan membantu pembiayaan. Program dengan pendekatan semacam ini kemudian dinilai tidak begitu berhasil, Pemberian beasiswa tidak banyak membantu baik tingkat kelulusan maupun mutu. Bahkan banyak beasiswa yang dipergunakan untuk keperluan lain. LPMAC sebagai organisasi memahami bahwa dibutuhkan suatu program yang lebih lengkap untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Perkembangan ini sejalan dengan proses kematangan LPMAC sebagai suatu organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Penilaian-penilaian yang obyektif akan membantu pihak lain dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk hasil dari penilaian ini dituangkan dalam perbaikan program yang lebih terarah tercapuk dalam Rencana Strategis 2007 - 2017. Di dalam rencana strategis misalnya ditemukan rencana penetapan kembali arah bidang studi yang akan mendapat beasiswa berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah.

Terdapat tiga macam proses kematangan yang dijalani organisasi ini yaitu pematangan metode, pematangan organisasi, dan pematangan perluasan jaringan.

KEMATANGAN MEMBANGUN JARINGAN

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan tingginya tingkat program yang telah dikembangkan, LPMK menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan program pendidikannya. Program sekolah berasrama dilakukan bersama dengan Yayasan Pesat (Pelayanan Desa Terpadu) dan Binterbusi (Bina Teruna Bumi Cendrawasih). Program pendidikan tingkat sarjana dan sekolah tinggi bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi di Manado, Universitas Papua di Manokwari, Universitas Cendrawasih di Jayapura, Ikopin Bandung, Sekolah penerbangan Aero Flyer Institute di Banten, dan Surya Research Education Center (SURE) untuk bidang matematika tingkat dunia. SURE adalah milik fisikawan Indonesia Prof. Yohanes Surya di Tangerang Banten yang misinya meningkatkan kemampuan anak-anak pada tingkat dunia dengan metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan). Sedangkan untuk penguatan programnya, LPMK dibantu oleh suatu badan konsultan pendidikan di Surabaya yang terlibat dalam kegiatan harian. Kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi sekolah yang ada di Kabupaten Mimika.

MENCARI BENTUK PENDIDIKAN YANG TEPAT

Para pengambil kebijakan dan pelaksana pengajaran bertanggung jawab untuk memberikan substansi dan metode yang memperkuat mereka sebagai individu dan anggota masyarakat. Program pendidikan LPMK difokuskan pada peningkatan standar pendidikan konvensional. Dalam kerangka ini, kerja sama seperti dengan berbagai institusi seperti SURE milik fisikawan Indonesia Prof. Yohanes Surya di Tangerang Banten yang misinya meningkatkan kemampuan matematika anak-anak pada tingkat dunia; atau pendidikan pilot di Aero Flyer Institute berguna untuk membangkitkan kepercayaan diri bagi anak-anak Papua. Akan tetapi, tantangan LPMK yang lebih besar di waktu mendatang adalah mencari bentuk dan isi yang menguatkan.

MEMPERLUAS JARINGAN

Dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan, kerja sama yang luas dengan berbagai pihak sangat diperlukan guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itulah Freeport Indonesia dan LPMK senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.

Terdapat beberapa kategori dari peran yang dijalankan oleh pihak ketiga dari suatu program kemitraan. Kategori pertama adalah organisasi yang karena kompetensi pengetahuannya dibutuhkan untuk memberikan penilaian obyektif. Misalnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang melakukan penelitian dampak ekonomi perusahaan terhadap kabupaten dan Tim Panel Uji Lingkungan untuk menilai dampak kegiatan produksi. Kategori kedua adalah organisasi yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu misalnya Universitas Papua dalam bidang pertanian, EduConsulting, yang membantu program pendidikan LPMK secara metode dan pengorganisasian, Yayasan Pesat dan Binterbusi dalam bidang pendidikan berasrama, atau Konsultan Bina Swadaya yang sangat berpengalaman dalam pengembangan kredit mikro.



Seorang pelajar sedang mengikuti seleksi penerima beasiswa LPMK.



Asrama Penjunan (dilihat dari udara). Sekolah Berasrama (Penjunan) yang berlokasi di Desa Wonosari, Timika dibangun dan dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) dengan menggunakan Dana Kemitraan Freeport untuk Masyarakat.

Kategori ketiga adalah yang mempunyai jaringan sosial berbasis keagamaan, seperti Keuskupan Timika. Dengan jaringan dan legitimasi yang dimilikinya, lebih mudah untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan aturan baru sebagai peserta program. Bersama Keuskupan Timika dan Agribusiness Market and Support Activities (AMARTA) yang merupakan sebuah proyek yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) Indonesia dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem agribisnis di Indonesia yang secara signifikan dapat berkontribusi peningkatan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sebuah proyek kerjasama telah dilakukan. Diantaranya program penanaman pohon sagu seluas 120 hektar dan padi varietas unggul, serta program koperasi. Keuskupan juga dapat memainkan peran kritisnya baik terhadap Freeport Indonesia maupun para peserta program. Kategori keempat adalah organisasi yang dapat memfasilitasi kontak pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya PADA (*Papua Agriculture Development Alliance*) USAID, sebuah kerjasama USAID dengan Freeport Indonesia untuk membantu perkembangan ekonomi di daerah terpencil Papua melalui AMARTA. AMARTA memberikan bantuan teknis, pelatihan dan dana hibah untuk kegiatan perikanan di Kokonao, pengembangan kopi di Wamena dan Moanemani, peternakan dan beras di Agimuga. Kategori terakhir, namun perannya sangat krusial, adalah Pemerintah Daerah. Otonomi daerah di Indonesia, memberikan peran bagi daerah untuk mengurus bidang-bidang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat. Termasuk dalam wewenang dan tanggungjawabnya adalah mengembangkan kebijakan dalam menyediakan maupun memfasilitasi semua inisiatif kesejahteraan rakyat. Dalam programnya Freeport Indonesia sangat membutuhkan dukungan kebijakan dan birokrasi yang responsif untuk ikut memecahkan masalah kesejahteraan Provinsi Papua.

Dalam perspektif organisasi, pelibatan berbagai pihak ini merupakan suatu bentuk dari akuntabilitas perusahaan. Freeport Indonesia dengan demikian tidak menerapkan ukurannya sendiri melainkan merundingkan dan menetapkan cara terbaik bersama organisasi lain.

6.2

PENGEMBANGAN EKONOMI: LOKAL – NASIONAL

Kami memberikan kontribusi pada penguatan daya hidup ekonomi dari kelompok-kelompok masyarakat tempat kami beroperasi, khususnya dengan mendukung pengembangan usaha setempat. Lebih lanjut, kami memprioritaskan pembelian dari para pemasok setempat. Nilai total barang domestik yang Freeport Indonesia peroleh secara lokal adalah 835 juta dolar AS pada 2011; barang domestik mencakup 55 persen dari seluruh barang yang dibeli oleh Freeport Indonesia, sebuah peningkatan dari 26 persen pada 2010. Freeport Indonesia juga memperoleh 90 persen layanan jasanya dari dalam negeri dengan nilai total 636 juta dolar AS. Dari semua layanan jasa yang dipenuhi secara domestik, 6 persen berasal dari perusahaan berbasis Papua; dari seluruh layanan jasa yang diperoleh dari Papua, 39 persen (suatu peningkatan dari 33 persen di 2010) diperoleh dari unit usaha yang dimiliki keturunan Papua dengan nilai total 15,5 juta dolar AS.

Program Pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Freeport Indonesia menawarkan pembinaan profesional bagi para wirausahawan. Penilaian terhadap dampak ekonomi tidak langsung dari berbagai program pengembangan ekonomi masyarakat, seperti Program UMKM dan program perikanan masyarakat, dilakukan setiap dua tahun sekali dan sudah dilakukan pada 2010. Penilaian berikutnya dilaksanakan di tahun 2012 mendatang.

Sebanyak 139 unit UMKM aktif milik masyarakat Papua menerima bantuan teknis dan pelatihan dari Freeport Indonesia. Unit-unit usaha ini menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 964 orang dengan pendapatan sekitar Rp. 91,1 milyar pada tahun 2011 saja. Dana Kemitraan Freeport untuk Pengembangan Masyarakat menyediakan dukungan tambahan untuk lebih dari 1.500 unit usaha mikro yang bergerak dalam berbagai jenis jasa layanan, perniagaan, dan industri rumah tangga. Unit-unit usaha mikro ini pada akhirnya menciptakan sumber pendapatan baru, yang menggiring pada menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat desa; memberikan banyak rumah tangga dana untuk membayar kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, perjalanan, dan investasi baru untuk usaha mereka.

6.3

PROGRAM EKONOMI BERBASIS DESA

Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar daerah operasinya, Freeport Indonesia senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pengembangan masyarakat berbasis desa artinya adalah memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam perjalanan pelaksanaan program, pengelola program masyarakat menyadari bahwa bahkan program

ekonomi dipengaruhi dan berdampak pada aspek lain dalam masyarakat. Program ekonomi adalah mengelola sumber daya yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Hal ini mungkin berkaitan dengan perubahan pengetahuan dan ketrampilan, sikap dalam mengelola keuangan, dan kepatuhan pada prinsip keagamaan. Untuk itu secara bertahap, program pengembangan berbasis desa mengkaitkan aspek yang lebih luas dan bermitra dengan berbagai organisasi yang mempunyai karakter yang dapat menopang program.

PROGRAM PERIKANAN

Program perikanan tangkap yang telah dimulai oleh Freeport Indonesia pada tahun 2009 sudah melibatkan lebih banyak peran LPMK. Freeport Indonesia, LPMK dan AMARTA-USAID serta pihak Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) dari Keuskupan Timika telah menyepakati pemberian bantuan dana dan pendampingan dalam pengembangan program perikanan ini. Freeport Indonesia, melalui tim Program Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat Lima Desa (P3MD), memberikan



Program pengembangan perikanan dan pertanian merupakan satu program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Freeport Indonesia dan Pemda Mimika bekerjasama dengan pihak lainnya seperti Keuskupan Timika dan USAID, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian bagi masyarakat setempat.



Program ekonomi bidang peternakan juga dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh LPMK melalui program Rural Income Generating Activities (RIGA) bagi kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM). Sampai akhir tahun 2010 jumlah KSM yang bergerak di sektor peternakan mencapai 845 KSM. Jenis ternak yang dikembangkan antara lain: ikan air tawar, itik, ayam, dan babi.



pendampingan dan dukungan transportasi dan sumber daya manusia, sedangkan AMARTA-USAID melaksanakan tugas pemantauan dan konsultasi. Hingga tahun 2011, pos tangkapan ikan berjumlah lima buah yang terletak di Pomako, Timika Pantai, Nayaro, Kokonao, dan Otakwa. Kelima pos ini menjadi pusat pengumpulan ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan pesisir sehingga mereka tidak perlu datang ke Timika untuk menjual hasil lautnya. Jangkauan program perikanan ini meliputi 19 kampung dengan jumlah nelayan yang terlibat sebanyak 406 KK. Jumlah tangkapan ikan dari para nelayan sebanyak 57,5 ton dengan total pendapatan lebih dari Rp 539 juta.

Beberapa pelatihan telah diadakan oleh LPMK dan KMBL untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang perikanan, termasuk pelatihan kepada nelayan dari Tipuka sebagai perintis pengumpulan ikan yang ditangkap oleh para nelayan dari lima desa Kamoro. Tim P3MD juga mengadakan pelatihan pengenalan administrasi dan laporan keuangan untuk meningkatkan kemampuan karyawan KMBL. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Departemen SLD/CR 2011.

PROGRAM PETERNAKAN

Pada tahun 2011, program peternakan difokuskan untuk melanjutkan proses transfer pengetahuan dan teknologi serta penguatan kerjasama dan sinergi antar program yang telah berjalan selama ini. Proses sinergi ini muncul dari semakin eratnyanya kerjasama antara Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) sebagai pengelola program peternakan di dua kampung dataran rendah (Wangirja-SP IX dan Utikini Baru-SP XII) dengan pengelola program Rural Income Generating Activities (RIGA) yang dilaksanakan oleh LPMK. Selain melaksanakan program di dataran rendah, LPMK dan YJM juga melakukan pengembangan peternakan di dataran tinggi (Tsinga, Banti, Aroanop). YJM yang sudah berkecimpung lama dalam bidang peternakan ayam dan babi berperan sebagai pendamping, pelatih sekaligus penyuplai bibit babi kepada para anggota Kelompok Usaha (KU) binaan program ekonomi LPMK. 49 persen dari total 1.426 KU binaan LPMK berusaha dalam bidang budidaya ternak babi. Teknisi peternakan terlatih dari YJM juga memberikan pelatihan budidaya dan tata laksana pengelolaan ternak babi kepada KU. Materi pelatihan meliputi teori dasar dan praktek langsung di fasilitas milik YJM yang ada di SP XII. LPMK dan YJM juga memberikan pelatihan pengelolaan peternakan ayam yang diikuti oleh 10 anak putus sekolah dari suku Amungme. Kesepuluh anak tersebut diharapkan dapat menjadi wirausahawan dalam peternakan ayam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Departemen SLD/CR 2011 di www.ptfi.com.

PROGRAM PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pendampingan program pertanian bertujuan untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat dalam usaha budidaya tanaman, terutama yang bernilai komersial dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Program pendampingan pertanian saat ini dikembangkan oleh unit-unit teknis di bawah departemen SLD/CR, Biro Ekonomi LPMK, dan kerjasama antara Freeport Indonesia dan AMARTA-USAID. Kegiatan program pertanian yang telah dikembangkan adalah:

Program Kebun Sagu. Program pengembangan Kebun Sagu di kampung Nayaro merupakan upaya awal untuk mencapai ketahanan pangan yang berbasis pada kearifan dan karakter lokal. Disamping untuk tujuan ketahanan pangan, pengembangan kebun sagu tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat pada masa mendatang. Pada tahun 2011, LPMK melakukan beberapa usaha pengembangan perkebunan sagu. LPMK bekerjasama dengan PT Environmental Resources Management (ERM) dalam melakukan survei potensi sagu di Kabupaten Mimika. Survei ini juga dilaksanakan bersama dengan para pakar dari UNIPA. Selain survei, LPMK memfasilitasi 10 pemimpin masyarakat Kamoro dan pegawai pemerintah Kabupaten Mimika untuk melakukan kunjungan ke Selat Panjang, Provinsi Riau, dalam rangka studi banding industri sagu.

Program Pertanian Dataran Rendah. Di kampung-kampung Kamoro telah dikembangkan program pemanfaatan lahan perkarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan ketela. Saat ini terdapat sekitar 179 keluarga di lima Kampung Kamoro dan sekitar 24 keluarga di SP IX dan SP XII yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan sumber pangan maupun penghasilan tambahan. Biro Ekonomi LPMK telah memberikan pendampingan kepada 147 KU bidang pertanian. Komoditas pertanian yang dikembangkan oleh KU tersebut adalah sayur mayur dan tanaman hortikultura.



Program Wanatani Kopi dan Hortikultura di Dataran Tinggi. Program pengembangan ekonomi bagi masyarakat di dataran tinggi Amungme masih berfokus kepada pengembangan usaha wanatani kopi, pendampingan budidaya tanaman hortikultura, dan tanaman pangan. Freeport Indonesia melalui program Highland Agriculture Development (HAD) sebelumnya disebut Amungme Agroforestry (AAF) sejak tahun 1998 telah membuka perkebunan kopi di dataran tinggi. Sampai pada akhir tahun 2011, jumlah petani yang terlibat aktif dalam usaha perkebunan kopi ini mencapai 77 petani dari distrik Tsinga, Hoesa, dan Aroanop (22 petani binaan dan 55 petani mandiri).

Kelompok menjahit Aitomona yang beranggotakan ibu rumah tangga dari Suku Kamoro di Timika merupakan program pemberdayaan perempuan, untuk meningkatkan peranan ibu-ibu dalam ekonomi masyarakat.



Mengembangkan Kultur Ekonomi Baru

- Bina Swadaya pertama terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat di Freeport Indonesia sejak 2003. Setelah Bina Swadaya masuk dan dapat memperlihatkan nilai tambah, lembaga mulai mengambil konsultan untuk bidang-bidang lain.
- Pada tahun 2006, LPMK melihat masih perlu pendampingan kedua, proses edukasi yang merangkul 5 suku lain melalui pengembangan kegiatan pertanian dan peternakan, tetapi dengan mekanisme yang diperbaiki. Yang disebut sebagai program bergulir 2003 hingga 2007 sebenarnya lebih menjadi hibah bagi 1.500 KSM, penyaluran dana melalui Bank Papua.
- Sekitar 2007-2008, program stagnan untuk evaluasi pendekatan dan mekanisme. Di satu sisi, masih ada pandangan dari internal yang masih melihat dana lebih tersebut sebagai hibah daripada sebuah pinjaman. Di sisi lain, kondisi lokal lebih sesuai untuk program penggiatan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi.
- Pada 2008, program dana bergulir mulai diteruskan dengan beberapa perubahan pendekatan. Meskipun tetap melalui kelompok, tiap KSM kini adalah kelompok anggota dari satu keluarga. Istilah dana bergulir lebih dimengerti sebagai dana bergulir. Artinya, tingkat keberhasilan dilihat dari kemampuan KSM menjalankan usaha, tetap aktif, dan dapat menabung, sehingga dapat menerima sisa dana yang sebagaimana dijanjikan. Ada tambahan 300-400 KSM baru sekarang; masing-masing KSM menerima dana 5 hingga 30 juta rupiah sesuai sektor dan ukuran usaha.
- Namun yang lebih penting adalah berhasilnya disetujui dan dibangun *Standar Operating Procedure* (SOP) yang lebih bersifat akuntabel bagi tujuan program. SOP meliputi juga seleksi penerima bantuan dan SOP untuk pendamping (*field supervisor*). 1.500 KSM sebelumnya pun telah diverifikasi status terakhir usahanya. Persyaratan yang diminta antara lain: a) Bersedia diverifikasi di tempat usaha; b) Bersedia menandatangani kontrak antara LPMK dan pasangan (suami-istri, yang penting satu perempuan) wakil sebagai wakil KSM; c) Pembukaan rekening bank yang harus *counter signed* oleh pasangan bersangkutan; d) dana yang diberikan tidak langsung seratus persen, namun dievaluasi dulu berdasarkan jumlah tabungan. Sejak 2008, LPMK bekerja sama menyalurkan dana pinjaman melalui 6 bank di Mimika. Masing-masing bank menangani penerima dana dari suku tertentu.
- Bahwa anggota masyarakat kini dapat berurusan dengan bank melalui mekanisme yang benar dan dengan percaya diri menjadi indikator keberhasilan program yang mungkin tidak lazim di daerah lain di Indonesia. Bank yang sebelumnya kurang percaya kepada pelanggan lokal kini dapat menjalani sistem alternatif dalam penilaian apakah nasabah *bankable* atau tidak.
- Pendampingan kelompok berperan penting dalam memantau kelompok dan memberikan bantuan teknis. Pelaksanaan SOP dan pemantauan oleh pendamping sangat rinci tetapi mudah. Pemantauan pun dibantu oleh Freeport Indonesia. Namun, Kabupaten Mimika kekurangan pendamping secara mutu dan jumlah. Idealnya biro program Ekonomi LPMK memiliki 25 pendamping, tetapi kini hanya ada 19 orang. Kekurangan tenaga biasanya dibantu oleh pihak Gereja atau dengan universitas (Universitas Papua) yang menjadikan mahasiswa di bawah Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai pendamping. Sementara pihak bank memberikan pendampingan dalam urusan perbankan. Untuk masalah mutu pendamping, LPMK bekerja sama dengan dinas-dinas terkait.
- Pembelajaran berusaha KSM bukan hanya karena kekurangan keterampilan usaha, tetapi terkait dengan kebiasaan sosial. Contohnya kios dan peternakan babi yang menjadi preferensi setempat. Pemilik kios bisa memiliki banyak piutang (karena hubungan kekerabatan yang erat), serta perlu belajar mengenai kedisiplinan waktu dan kepedulian terhadap kebersihan. Babi biasanya dilepas karena kesulitan mencari pakan. Babi juga lebih disimpan sebagai investasi dan tidak ada pasarnya. Biro Ekonomi kini lebih berusaha beralih dari pemberian dana langsung ke program *in-kind* untuk kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan. Sosialisasi bertahap melalui kerjasama dengan UNIPA berlangsung sejak September 2010.
- Pentingnya kerjasama dengan Keuskupan melalui Koperasi Maria Bintang Laut yang berhasil bekerjasama dengan masyarakat untuk berhadapan dengan jaringan tengkulak. Masyarakat pun bersedia berkontribusi untuk memperkuat kelembagaan melalui penyisihan untung. Dalam skema ini, ada dana yang harus disisihkan dari hasil penjualan yang dialokasikan untuk tabungan, kampung, kas Gereja, dan subsidi pendampingan. Dengan demikian skema ini juga memperkuat ikatan sosial. Keterbatasan yang mulai terasa adalah daya serap pasar lokal. Contohnya, pernah ada saat dimana tangkapan ikan melimpah dan tidak dapat diserap pasar lokal. Sedang dipikirkan bagaimana cara membangun pabrik pengolahan hasil ikan, meskipun saat ini masalahnya adalah mahalnya bahan bakar pengoperasiannya. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan semacam subsidi dalam hal bahan bakar jika skema ini akan diwujudkan.



Mendorong Kewiraswastaan

Salah satu cara mendukung para wirausahawan setempat adalah melalui suatu program kredit mikro.

Sejak dimulai pada 2005, yayasan pemberi pinjaman mikro telah mencairkan kredit lebih dari 2 juta dolar AS (Rp 28,4 milyar) kepada 31 usaha, yang berpartisipasi dalam Program UMKM perusahaan.

Program UMKM pada awalnya bersifat pelatihan "*inbound*" artinya mengundang anggota masyarakat untuk mengikuti pelatihan kewiraswastaan. Akan tetapi cara ini ternyata kurang berhasil menyaring orang yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya. Kemudian polanya diubah menjadi "*outbound*" artinya peserta yang akan diberikan kredit dinilai dulu melalui metode tertentu. Program menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kinerja unit yang sudah ada, melalui konsultasi manajemen, pelatihan, advokasi, dan membuka jaringan bisnis.

Pada dasarnya ada dua program utama: (a) pembinaan (seperti dalam hal pengelolaan keuangan); dan (b) pendanaan (mikro antara 0 sampai 25 juta rupiah; kecil 25 - 200 juta rupiah; dan menengah diatas 200 juta). Program kredit menghadapi keadaan yang cukup sulit karena sebagian besar peminat baru sebatas memiliki kemauan dan ide usaha, tanpa didukung keahlian, rencana, dan modal awal yang cukup. Jika menggunakan persyaratan konvensional pada bank-bank lokal, sebagian besar peminat akan dinilai tidak *bankable*. Sebagai bagian dari mekanisme penyaluran, Freeport Indonesia mengembangkan suatu yayasan yang juga akan melakukan penilaian yaitu Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) terdiri dari pengurus yang berasal dari beberapa departemen di Freeport Indonesia.

Persyaratan untuk penerima kredit antara lain: a) Minimal memiliki unit usaha berbadan hukum (bukan KSM) atau peluang usaha yang diverifikasi layak; b) Mengajukan proposal rencana usaha yang bersedia untuk ditinjau, dinilai, kemungkinan ditolak, atau diperbaiki; c) Bersedia dilakukan verifikasi di tempat usaha oleh pengurus YBUM; d) Menjalani pembahasan dan persetujuan proposal oleh panel; e) Membuka rekening di bank mana saja dengan *counter sign* pihak YBUM (kecuali unit mikro yang mencicil langsung ke YBUM); f) Menandatangani kontrak dengan YBUM; g) Bersedia dipantau berbasis proposal rencana usaha.

Dari 130-an peserta program, sekitar sepertiga (47 unit) adalah unit usaha mikro yang biasanya bergerak di bidang jasa (kios). Usaha kecil biasanya menekuni *landscaping*, *cleaning service*, *indoor planting*, transportasi. Usaha menengah bisa bergerak di pengelolaan truk sampah, bis, pabrik es, land clearing, atau penyedia jasa di lapangan udara. Sebagian besar usaha masih terkait dengan kegiatan Freeport Indonesia atau kontraktornya.

Tingkat pelunasan kredit untuk mikro (selama satu tahun) adalah 60 persen, lebih kecil dibandingkan kecil menengah yang mencapai 80 - 90 persen. Freeport Indonesia sedang mengkaji apakah ini karena mikro kurang mengikuti pelatihan karena keterbatasan dana transportasi. Tantangan terbesar adalah perlunya program untuk meningkatkan keterampilan perseorangan untuk mengambil peluang. Kurangnya usaha di bidang manufaktur, sementara Freeport Indonesia sebenarnya memiliki banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi secara lokal. Namun, di sisi lain, pemasaran di luar Freeport Indonesia menjadi masalah karena Timika sulit diakses. Saat ini di daftar tunggu ada 400 pengguna jasa program yang menunggu menjadi binaan (sub kontrak) dari Freeport Indonesia. 130 peserta program adalah mereka yang menerima kredit dan yang non-kredit.

Lembar Data Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Desa 2011

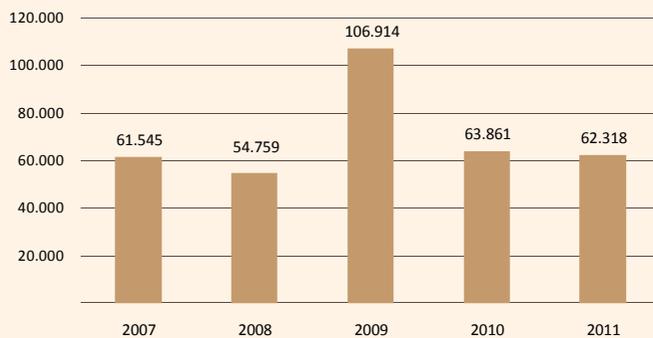
PTFI dan LPMMAK melakukan program pengembangan ekonomi berbasis desa dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki masyarakat lokal dan wilayah tempat tinggal mereka. Kegiatan program ini mencakup program perikanan, peternakan, pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berfungsi sebagai akselerator pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika yang secara umum masih tertinggal dari wilayah lain. Secara jangka panjang, dampak dari program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kabupaten Mimika terhadap sektor pertambangan (PTFI).

Jumlah orang yang menerima pemasukan secara ekonomis dari program VBED

Program VBED	Jumlah Karyawan
Program Peternakan & Pertanian SP IX & SP XII	462 karyawan, 26 petani mitra dan 2 mitra ternak babi
Program Pertanian Kamoro	4 karyawan dan 129 petani mitra
Program Perikanan	23 karyawan dan 269 nelayan
Program Usaha Alternatif (Koperasi Aitomona)	3 karyawan dan 8 binaan
Program Produksi Kopi	22 karyawan dan 34 petani mandiri

Program Perikanan

Jumlah Tangkapan Nelayan Kamoro Yang Dibeli oleh KMBL (Dalam Kilogram)



Program Peternakan

Penjualan YJM (Dalam Miliar Rupiah)



Pelatihan

Pelatihan RIGA LPMMAK Tahun 2011

Jenis Pelatihan	Pertemuan	Peserta
Pelatihan ana Bergulir	5	631
Pelatihan Administrasi & Keuangan	1	20
Pelatihan Peternakan Babi	1	10
Lokakarya Supervisor Lapangan	1	18
Pelatihan Pertanian	1	15
Pelatihan Menjahit	2	20
Pelatihan Teknis Perikanan	1	25
Pra sosialisasi Industry Pengolahan Sagu	1	200

Program Pertanian

Produksi Kopi (dalam Kg.)			Penjualan Kopi (dalam USD)	
Tahun	Kopi Mentah	Kopi Proses	Tahun	USD
2011	3.199	109	2011	30,516
2010	1.163	1.548	2010	18,354
2009	562	884	2009	6.310
2008	673	925	2008	9.683

Tim P3MD telah memberikan sekitar 69,4 kilogram bibit dan 26 pohon bagi para petani binaan di lima desa Kamoro selama tahun 2011.

Dukungan Infrastruktur

Dukungan Infrastruktur Program Perikanan & Pertanian Kamoro

Tahun	Aktifitas
2011	Perbaikan ruas jalan Tipuka - Mapuru Jaya
2010	Dermaga Penampungan Ikan Pomako, Pos Penampungan ikan di Kampung Timika Pantai dan Amar, Perbaikan ruas jalan Tipuka - Mapuru Jaya, Perawatan & Perbaikan Akses Jalan
2009	Pos Penampungan Ikan di Kampung Otakwa
2008	Pembangunan Lahan Sagu seluas 85 Hektar dan Perawatan Jalan akses ke Kampung Nayaro
2007	Pabrik Es Kokonao Kerjasama dengan AMARTA, Pembangunan Jembatan Nayaro dan Dermaga Penampungan Ikan di Tanggul Timur

Dukungan Transportasi Bagi 5 Desa Kamoro

Tahun	Bis*	Truk*
2011	732	189
2010	741	189
2009	612	157
2008	859	184

*Jumlah rata-rata trip bis & hari untuk truk

Subsidi Listrik di 3 Kampung Kamoro

Tahun	Tipuka	Koperapoka	Nawaripi
2011	Rp. 101.970.455	Rp. 62.139.710	Rp. 105.715.550
2010	Rp. 75.351.130	Rp. 68.629.380	Rp. 83.455.630
2009	Rp. 100.088.400	Rp. 121.128.015	Rp. 232.477.475
2008	Rp. 87.777.945	Rp. 100.136.725	Rp. 199,019,505

Keterangan

VBED: Village Based Economic Development
RIGA: Rural Income Generating Activities

KESEHATAN MASYARAKAT

Di sekitar areal operasi kami, HIV-AIDS, Tuberkulosis (TB) dan malaria merupakan penyakit menular yang beresiko bagi karyawan, Keluarga mereka dan masyarakat setempat. Melalui Departemen Community Public Health and Malaria Control (Community PHMC) Freeport Indonesia serta didukung oleh penyedia layanan medis Perusahaan, International SOS, Freeport Indonesia menerapkan program untuk pendidikan dan pelatihan, pencegahan, konseling, diagnosis dan pengobatan

HIV-AIDS di Kabupaten Mimika (wilayah di mana operasi kami berada) merupakan salah satu ancaman kesehatan di masa datang, walaupun prevalensi secara keseluruhan masih relatif rendah (sekitar 2 persen), namun tingkat infeksi jauh lebih tinggi dari pada tingkat rata-rata global, yang umumnya berdampak pada penduduk asli Papua. Pernyataan Kebijakan HIV dan AIDS Freeport Indonesia, diterbitkan pada bulan Januari 2004, menyatakan kebijakan dan prosedur Perusahaan mengenai isu-isu medis, sosial dan ketenagakerjaan yang terkait dengan HIV-AIDS dan merupakan bagian dari program pengenalan karyawan baru di Freeport Indonesia. Program pendidikan mengenai HIV-AIDS diarahkan kepada karyawan melalui pusat pendidikan di tempat kerja dan melalui penggunaan saluran TV Perusahaan serta promosi pada media lainnya. Freeport Indonesia menyediakan jasa HIV-AIDS Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang rahasia bagi karyawan dan anggota masyarakat di fasilitas yang berada di tempat kerja dan fasilitas klinis di komunitas. Freeport Indonesia telah memiliki manajer medis yang khusus menangani kasus HIV-AIDS dan memberikan konseling serta dukungan yang terfokus bagi anggota karyawan dan komunitas dengan HIV-positif dengan rujukan untuk terapi antiretroviral.



Departemen Community PHMC Freeport Indonesia juga mengoperasikan sebuah Klinik Kesehatan Seksual dan HIV (STI Klinik) bekerjasama dengan pemerintah setempat di Timika, dan sebuah klinik khusus penanganan TB di Mimika. Pada tahun 2011, Klinik tersebut melaporkan kunjungan pasien sebanyak 2.974; 1.669 anggota masyarakat yang mencari layanan VCT dan kasus infeksi seksual menular yang diobati. Di tempat kerja melalui Departemen Industrial PHMC, 4.327 karyawan telah menjalani VCT/PICT dan 289 pekerja telah didiagnosis dan diobati untuk infeksi seksual menular lainnya.

Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat prevalensi yang tinggi untuk TB dengan 189 kasus per 100.000 orang menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2009. Pemantauan kesehatan kami menunjukkan bahwa tingkat kasus baru TB aktif di Kabupaten Mimika adalah 27 persen lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia.



Pengendalian malaria merupakan salah satu program utama program bidang kesehatan Freeport Indonesia yang dijalankan oleh Departemen Public Health and Malaria Control (PHMC). Malaria masih menjadi ancaman kesehatan serius di Papua.

Dari 716 terduga TB di kalangan karyawan pada tahun 2011, ditegakkan diagnosisnya sebagai kasus TB sebanyak 68. Dari 68 kasus TB, terhadap 65 dilakukan VCT dengan hasil HIV+ 24. Total pasien TB-HIV dengan pengobatan ART: 9.

Freeport Indonesia menggabungkan pendekatan yang terkoordinasi untuk TB dan HIV, dan menyediakan penyaringan yang bersamaan untuk kasus HIV positif. Pada tahun 2011, Freeport Indonesia memberikan pendidikan dan konseling kepada 3.216 masyarakat untuk mempromosikan praktek-praktek pencegahan penyakit tersebut, serta pertemuan karyawan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran terhadap TB. Melalui kerjasama dengan pemerintah lokal serta Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK), Freeport Indonesia mengoperasikan sebuah klinik TB di Timika yang menyediakan pendeteksian aktif dan pengobatan kasus baru TB dengan menerapkan metode pengobatan Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Pada tahun 2011, 7.373 orang mengunjungi klinik TB di Timika dimana sebanyak 1.349 orang tersebut diuji untuk TB. Dari jumlah tersebut, 208 adalah orang-orang yang baru terkena TB yang kemudian mengikuti program pengobatan. Pada tahun 2010, tingkat

penyelesaian pengobatan TB selama 6 bulan adalah 88 persen untuk anggota masyarakat, dan 98 persen untuk karyawan, yang berada di atas pengobatan standar WHO (85 persen), dan merupakan sebuah pencapaian besar mengingat mobilitas yang tinggi dari masyarakat lokal dan tingkat drop-out yang tinggi (sekitar 50 persen di Kabupaten Mimika).



Rumah Sakit Mitra Masyarakat, rumah sakit di Timika yang dikelola oleh LPMK dengan menggunakan Dana Kemitraan Freeport untuk Pengembangan Masyarakat. Saat ini RS Mitra Masyarakat dilengkapi dengan 101 tempat tidur. Rumah sakit ini menyediakan pelayanan spesialis Kesehatan Anak, Kebidanan, Penyakit Dalam, Bedah, dan Kesehatan Mata dengan pengembangan khusus pada penanggulangan kasus gawat darurat terutama trauma dalam rangka *life saving* dan *limb-saving*, dan Pelayanan Terpadu Infeksi Khusus (Yanduinfus) pada penyakit HIV/AIDS dan Tuberkulosis.



Selain itu, Provinsi Papua memiliki salah satu tingkat tertinggi prevalensi malaria di Indonesia. Di hampir semua masyarakat lokal di dekat operasi kami, infeksi malaria adalah penyebab tunggal terbesar dari morbiditas dan rawat inap. Freeport Indonesia menerapkan program pengendalian malaria kelas dunia yang terintegrasi di wilayah proyek dan masyarakat setempat. Informasi tentang malaria termasuk dalam bahan pengenalan untuk semua karyawan baru dan Freeport Indonesia juga memproduksi dan mendistribusikan pamflet dan poster yang berisi tentang langkah-langkah perlindungan pribadi, bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk dan mengendalikan jumlah nyamuk serta tempat perkembangbiakannya. Program pengawasan regular baik aktif dan pasif dilakukan untuk mendeteksi infeksi malaria, termasuk survei sekolah semi-tahunan di wilayah komunitas sekitar. Tim Community PHMC Freeport Indonesia mengimplementasikan program penyemprotan insektisida dalam ruangan. Pada tahun 2011, 6.755 bangunan di desa-desa dan di kota Timika telah mendapatkan program ini. Freeport Indonesia juga melakukan kontrol drainase yang diawasi dan mendistribusikan 998 kelambu dengan insektisida dengan biaya bersubsidi untuk tenaga kerja dan masyarakat setempat.



Freeport Peduli

Sejak tahun 2007 Freeport Indonesia telah memulai sebuah inisiatif baru bernama Freeport Peduli yang merupakan program sosial Freeport Indonesia untuk ikut mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan. Freeport Peduli juga berusaha ikut membantu para korban bencana alam di Indonesia. Manajemen, karyawan dan para duta (*Champions*) Freeport Peduli bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menjalankan program-program tersebut.

Selama tahun 2010, Freeport Peduli menyelenggarakan 17 program yang merupakan empat bidang utama Freeport Peduli yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan bantuan bagi korban bencana alam. Program-program yang dilakukan adalah renovasi 5 sekolah di Padang pasca gempa; program penanaman pohon di Padang, Sentani dan bukit Masinggit Kareumbi; bantuan langsung dan pengiriman Tim Tanggap Darurat atau Emergency Response Group (ERG) Freeport Indonesia kepada korban bencana di Merapi, Mentawai, Wasior, Serui dan Manado; rangkaian kegiatan donor darah di Jakarta, Kuala Kencana, Tembagapura dan Jayapura; rangkaian pelatihan relawan AIDS Freeport Indonesia bersama Indonesian Business Coalition Against AIDS (IBCA) di Kuala Kencana dan Tembagapura; Peringatan Malam Renungan AIDS Nusantara dan Hari AIDS se Dunia 2010; peresmian IBCA Papua Chapter; lomba lari Run for Education bersama Jakarta International School; diskusi panel penanggulangan dan penatalaksanaan Malaria bersama Fakultas Kedokteran UI; serta bakti sosial ke korban banjir Muara Gembong dalam rangka HUT Freeport Indonesia. Program-program tersebut dihadiri manajemen Freeport Indonesia, para pemangku kepentingan perusahaan, mendapat perhatian media massa serta peran aktif para Freeport Peduli Champions dan karyawan.



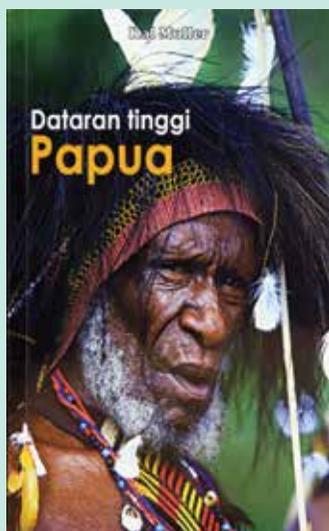
PELESTARIAN BUDAYA

Kami telah belajar banyak dari kelompok-kelompok masyarakat dekat tempat kami beroperasi, terutama dari para suku asli tetangga kami. Kami pun terus berjuang untuk belajar lebih banyak tentang masyarakat Papua; sejarah, budaya, dan situasi mereka yang terus berubah; untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dan untuk meningkatkan upaya-upaya kami untuk menjangkau mereka. Yang terpenting adalah komitmen kami untuk memperluas penghargaan terhadap suku-suku asli Papua beserta budaya mereka dan untuk terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan mereka menyangkut isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Kami memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan pengembangan sosial, pendidikan, dan ekonomi, termasuk upaya-upaya khusus untuk melatih anggota kelompok-kelompok asli daerah ini dan mengangkat mereka sebagai karyawan.

Kami telah lama mendukung berbagai Festival Seni dan Budaya Asmat dan Kamoro. Kami pun telah mensponsori studi-studi sosial, kesenian, kebudayaan, bahasa, dan ekonomi dari Suku Amungme dan Kamoro yang merupakan penduduk asli di wilayah kerja kami. Studi-studi ini telah memperbaiki komunikasi dengan dan pemahaman tentang para tetangga kami dan berkontribusi nyata pada pengetahuan internasional tentang budaya khas mereka.

Freeport Indonesia telah memutuskan untuk ikut mendukung pemerintah Indonesia dalam World Expo 2010 yang berlangsung di Shanghai, Cina, pada bulan Mei 2010. Sejumlah barang-barang kerajinan yang dikirimkan antara lain beberapa perahu kayu, alat musik dan ukiran dari Asmat, Kamoro dan Sentani. Sebelumnya Freeport Indonesia juga telah berbagai program kebudayaan Papua di tingkat lokal hingga internasional, seperti Festival Asmat (2008) dan Evolusi Batik untuk menggambarkan batik motif Papua (2008).



Freeport Indonesia telah mendukung penelitian dan mendanai banyak program untuk meningkatkan bentuk pengetahuan tentang masyarakat asli Provinsi Papua, Indonesia. Amungme: *Tradition and Change in the Highlands of Papua*, yang ditulis oleh cendekia Kal Muller dan tokoh Suku Amungme Yunus Omabak, merupakan terbitan terkini tentang budaya di tanah Papua yang didukung Perusahaan. Dalam buku tersebut tergambar dasar dan cakupan kepemimpinan sosial dan perubahan apa yang terjadi dengan masuknya pengaruh dari luar. Secara umum, karakter tradisional hubungan sosial suku di Tanah Tinggi bersifat tidak berstruktur ketat dan ruang untuk membentuk unit sosial baru relatif besar.



Pengembangan seni budaya asli Papua terus dikembangkan untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Promosi seni ukir Kamoro dilakukan di Papua hingga ke Jakarta untuk komunitas nasional dan internasional.



Mengukir adalah seni budaya asli suku Kamoro dimana banyak pengukir yang bisa ditemui di kampung-kampung Kamoro di Timika.

PERTAMBANGAN TANPA IZIN

Wilayah operasi Freeport Indonesia di Papua merupakan salah satu dari dua wilayah operasi FCX dimana penambang tanpa izin skala kecil (PETI) beroperasi di wilayah konsesi pertambangan atau area pendukungnya. Freeport Indonesia telah mengidentifikasi PETI sebagai salah satu tantangan utama keberlanjutan. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai PETI adalah orang-orang luar yang bermigrasi ke daerah itu. Mereka memiliki peralatan dan keahlian terbatas dalam beroperasi dalam kondisi berbahaya dan memiliki potensi untuk menciptakan risiko terhadap lingkungan, serta menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri pada situasi berisiko.

Selama empat tahun terakhir, Dr Kevin Telmer telah mengunjungi Freeport Indonesia dan memperbarui informasi dasar tentang kegiatan PETI di wilayah proyek Freeport Indonesia. Dr Kevin Telmer adalah presiden Earthtone Environmental R&D Inc. dan juga Founding Director Artisanal Gold Council. Beliau adalah seorang ahli dalam pertambangan emas artisanal dan skala kecil dengan pengalaman bekerja 15 tahun di lapangan dengan para penambang dan pemerintah dalam kapasitas teknis, kebijakan sosial, dan bisnis.

Jumlah peserta PETI dan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dari kegiatan mereka telah terus meningkat seiring dengan harga emas di pasar global. Saat ini ada ribuan penambang ilegal di sungai, dengan sebagian besar adalah masyarakat setempat yang juga turut mendukung kegiatan penambangan ini.

Masalah lingkungan utama yang diidentifikasi oleh Dr Telmer dan Freeport Indonesia adalah potensi penggunaan merkuri untuk menyaring emas dalam PETI. Freeport Indonesia telah menerapkan sejumlah usulan untuk mengedukasi para peserta PETI dan aparat lokal mengenai risiko tentang penggunaan merkuri. Freeport Indonesia juga memasang perangkat udara untuk pemantauan merkuri di Timika dan memiliki alat pengawasan genggam yang digunakan di Timika dan di sepanjang sungai. PETI beroperasi di sejumlah sungai dan membawa berbagai produk mereka ke Timika di mana lebih dari 40 toko emas lebih lanjut memproses konsentrat tersebut sebelum mengirimkan emas yang didapat ke tempat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijual kembali. Saat ini, beberapa upaya telah berhasil dalam mencegah penggunaan merkuri di sungai, namun, penggunaan merkuri telah diidentifikasi di beberapa toko emas di Timika dan pihak otoritas setempat telah menindaklanjutinya dengan pihak-pihak tersebut untuk mengurangi praktek berisiko. Freeport Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pemerintah dalam mengembangkan rencana untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan PETI. Sebagai contoh, Freeport Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan bahaya penggunaan merkuri untuk penduduk perkotaan dan penambang individu atau pemilik toko emas.

Freeport Indonesia telah membuat sebuah tim ahli dari Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, yang telah melakukan kegiatan sosial yang luas di Papua, untuk melakukan penelitian dasar sosial yang komprehensif. Tim Universitas Atma Jaya mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan survei. Penelitian ini dimulai di daerah dataran tinggi dan memetakan pemilik tanah utama, tokoh masyarakat di dalam PETI, serta semua aspek operasi pendukung di sekitar kegiatan PETI. Setelah bagian dataran tinggi dari studi selesai, tim studi akan melanjutkan untuk meninjau dataran rendah.

ETIKA BISNIS DAN KORUPSI

Korupsi kadangkala meluas dalam sejumlah sistem dan budaya lokal dekat tempat kami beroperasi, terutama di negara-negara berkembang. Kebijakan Anti-Korupsi kami membantu dalam memastikan kepatuhan pada *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977* (FCPA) serta UU anti-korupsi terkait lainnya, termasuk UU di negara tempat kami menjalankan bisnis. Selama beberapa tahun ini, Perusahaan telah mengembangkan sistem-sistem pengendalian di tempat kami beroperasi di seluruh dunia agar dapat mematuhi FCPA. Setiap tahun, perusahaan audit internal kami menjalankan suatu asesmen risiko bisnis untuk segenap perusahaan yang mencakup faktor risiko korupsi. Lebih lanjut, Perusahaan menjalankan penilaian-penilaian risiko untuk korupsi di seluruh entitas Freeport Indonesia, baik kantor pusat maupun di lokasi tambang.

Panduan anti-korupsi kami membantu orang-orang yang duduk dalam Perusahaan dengan tugas yang lebih mungkin menggiring mereka ke ranah-ranah yang tercakup dalam FCPA atau UU anti-korupsi lainnya yang berlaku. Lebih jauh, kami menjaga pelaksanaan suatu program pelatihan khusus tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi. Sasaran pelatihan kami untuk 2010 adalah para manajer operasional dan administratif di kantor Jakarta dan pengoperasian Grasberg kami. Selama tahun 2011, tidak ada pelatihan terkait FCPA maupun UU anti korupsi lainnya, yang diberikan kepada karyawan. Hal ini terkait dengan adanya mogok kerja Serikat Pekerja Freeport pada bulan Juli - 20 Desember 2011.

Melalui Prinsip-prinsip Berperilaku Usaha (*Principles of Business Conduct*) yang ada di Freeport Indonesia, kami memiliki berbagai mekanisme, termasuk pelaporan anonim, yang mendorong karyawan untuk melaporkan masalah terkait perilaku bisnis yang tidak benar, yang juga mencakup tuduhan korupsi. Proses yang kami jalani ketika mengetahui adanya dugaan semacam ini adalah dengan meninjau fakta-fakta dan keadaan serta menentukan jenis penyelidikan yang tepat. Setelah penyelidikan selesai, kita mengambil tindakan yang tepat terhadap pihak karyawan, vendor atau pihak terkait lainnya jika pelanggaran telah terjadi. Selain itu kami juga meninjau kebijakan dan prosedur kami untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dapat ditingkatkan dan diperbaiki untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan.

Transparansi Pembayaran Pada Pemerintah

Pembayaran-pembayaran kami kepada pemerintah tempat kami beroperasi melalui pajak, royalti, dan segala kewajiban lainnya merupakan suatu kontribusi nyata bagi pembangunan negara, wilayah, dan lokal. Total pembayaran yang telah dilakukan Freeport Indonesia selama tahun 2011 telah mencapai 2,4 miliar dolar AS, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 397 juta dolar AS, royalti 188 juta dolar AS, dan dividen bagian Pemerintah 202 juta dolar AS.

Freeport Indonesia bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk perannya dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi karyawan dan properti Perusahaan. Polisi ditugaskan berdasarkan keputusan presiden untuk melindungi wilayah tambang Grasberg, yang telah dikategorikan sebagai objek vital nasional. Apabila dibutuhkan oleh polisi, pihak militer Indonesia juga dapat dikerahkan untuk memberikan keamanan tambahan. Biaya yang merupakan bagian Freeport Indonesia dari dukungan keamanan yang disediakan oleh pemerintah selama tahun 2011 adalah 14 juta dolar AS. Dukungan tambahan ini terdiri dari berbagai macam infrastruktur dan biaya lainnya, seperti makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, tunjangan untuk menutupi biaya insidentil dan administrasi, dan program bantuan terhadap komunitas sekitar.

Freeport Indonesia telah melaporkan pembayaran pada Pemerintah Indonesia dan kami kini telah memperluas praktik ini untuk setiap negara tempat kami menjalankan bisnis. Sebaliknya, Freeport Indonesia sejalan dengan kebijakan FCX tidak menerima bantuan finansial signifikan dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya.

6.8

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN SELAMA 2011



Penghargaan Corporate Image Award 2011 di sektor tambang mineral oleh majalah Bloomberg BusinessWeek Indonesia.

Freeport Indonesia dianugerahi penghargaan Corporate Image Award 2011 di sektor tambang mineral oleh majalah Bloomberg BusinessWeek Indonesia. Sebelumnya, Freeport Indonesia juga telah dianugerahi penghargaan serupa pada tahun 2007. Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam ajang Indonesias Most Admired Companies (IMAC) Award 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni di Jakarta.



Penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Awards

Freeport Indonesia kembali menerima penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Awards yang diserahkan di Jakarta (15/9). Dua penghargaan yang diterima tersebut adalah penghargaan Gold atau Emas untuk program partisipasi pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan dan program penciptaan akses air minum/bersih dan sanitasi lingkungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.



Juara Umum Indonesian Fire & Rescue Challenge (IFRC) ke-14 yang berlangsung di PT Berau Coal, Kalimantan Timur.

Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia berhasil menjadi Juara Umum Indonesian Fire & Rescue Challenge (IFRC) ke-14 yang berlangsung di PT Berau Coal, Kalimantan Timur.



Penghargaan Penginspirasi Bumi pada kategori perusahaan atas upaya dalam mendokumentasikan keanekaragaman hayati Papua melalui buku Mengenal Papua oleh Kal Muller.

Freeport Indonesia menerima Indonesia Green Awards 2011 dari dewan juri Indonesia Green Awards 2011 yang diserahkan pada acara yang digelar oleh La Tofi School of CSR dan Majalah Bisnis & CSR dengan dukungan dari Kementerian Kehutanan. Freeport Indonesia menerima penghargaan Penginspirasi Bumi pada kategori perusahaan atas upaya dalam mendokumentasikan keanekaragaman hayati Papua melalui buku Mengenal Papua oleh Kal Muller.



Freeport Indonesia menerima penghargaan Strategy-into Performance Execution Excellence (SPEX2) dari GML Performance Consulting & Majalah Fortune Indonesia.

Freeport Indonesia menerima penghargaan Strategy-into Performance Execution Excellence (SPEX2) dari GML Performance Consulting & Majalah Fortune Indonesia sebagai Best in Operational Execution atau Terbaik Pelaksanaan Operasional. Freeport Indonesia dipilih berdasarkan bukti-bukti bahwa strategi inisiatif organisasi yang spesifik di seluruh tiga dimensi (pertumbuhan, pelanggan, tempat bekerja) dijalankan dan dimonitor dengan baik.



Freeport Indonesia menerima penghargaan Program Pencegahan dan Pemberantasan (P2) HIV dan AIDS di Tempat Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk komitmen dan upaya dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan HIV dan AIDS di tempat kerja dan masyarakat sekitar, Freeport Indonesia menerima penghargaan Program Pencegahan dan Pemberantasan (P2) HIV dan AIDS di Tempat Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Freeport Indonesia menerima penghargaan dalam kategori Platinum bersama dengan 6 perusahaan lain dari 47 perusahaan yang berpartisipasi dari seluruh Indonesia. Ini adalah kali ke-2 Freeport Indonesia menerima penghargaan dalam kategori yang sama sejak menerimanya pertama kali tahun lalu. Selain Freeport Indonesia penerima Platinum kategori lainnya adalah: Tjiwi Kimia, Chevron, Coca Cola Amatil Indonesia, Star Energy, Total E & P Indonesia dan Kalimantan Prima Coal. Redpath Indonesia, yang merupakan anggota IBCA Papua Bab, juga menerima penghargaan dalam kategori Emas.



Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) beserta Freeport Indonesia menerima penghargaan Platinum dan Perak pada penyelenggaraan Indonesia CSR Awards (ICA) 2011

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) beserta Freeport Indonesia menerima penghargaan Platinum dan Perak pada penyelenggaraan Indonesia CSR Awards (ICA) 2011 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD) bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI, dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penghargaan Platinum (terbaik) diberikan kepada program Mimika Sehat dengan fokus kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Mimika yang merupakan bagian dari program kesehatan LPMAM. Selain itu Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP-UMKM) Freeport Indonesia mendapat penghargaan Perak untuk kategori pengembangan ekonomi.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
WTSD	Working Toward Sustainable Development
GRI	Global Reporting Indicator
ICCM	International Council on Mining & Metals/Dewan Internasional tentang Pertambangan)
SDRR	Sustainable Development Risk Register
PETI	Petambang Tradisional Tanpa Izin
Sirsat	Pasir Sisa Tambang
TRIR	Total Recordable Incident Rate
ORNOP	Organisasi non-pemerintah
VPSHR	Voluntary Principles on Security and Human Rights
GBC	Grasberg Block Cave
TDMLZ	The Deep Mill Level Zone
SLD/CR	Social Outreach & Local Development / Community Relation
LPMMAK	Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungmedan Kamoro
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative
TFM	Tenke Fungurume Mining
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
RKL/ RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan
BMKG	Badan Meteorologi dan Geofisika
Mod ADA	Modified Ajkwa Deposition Area (Daerah Pengendapan Aijkwa)
UNIPA	Universitas Negeri Papua
ARD	Acid Rock Drainage (Air Asam Batuan)
TSCs	Time Species Counts
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Bapedalda	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
3R	Reuse, Recycle, Reduction
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
BOD	Kebutuhan Oksigen Biologi
COD	Kebutuhan Oksigen Kimia
BPO	Bahan Perusak Ozone
IUCN	International Union for Conservation of Nature
REACH	Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical substance
GHS	Global Harmonized System
ILO	International Labor Organization
PUK KEP SPSI	Pengurus Unit Kerja Federasi Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PBC	Principles of Business Conduct
DPFI	Dana Pensiun Freeport Indonesia
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JHT	Jaminan Hari Tua
IPN	Institute Pertambangan Nemangkawi
LTIR	Lost Time Incident Rate
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
OHSAS	Occupational Health & Safety Advisory Services
ERG	Emergency Response Group
WHO	World Health Organization
CDC	Center for Disease Control and Prevention
IBCA	Indonesian Business Coalition on AIDS
MDGs	Millenium Development Goals
ODHA	Orang Dengan HIV/AIDS
APBCA	Asia Pasific Business Coalition on Aids
LEMASA	Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme
LEMASKO	Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro
Pesat	Pelayanan Desa Terpadu
Binterbusi	Bina Teruna Bumi Cendrawasih
AMARTA	Agribusiness Market and Support Activities
USAID	United State Agency for International Development
PADA	Papua Agriculture Development Aliannce
UMKM	Usaha Kecil Mikro dan Menengah
YJM	Yayasan Jayasakti Mandiri
RIGA	Rural Income Generating Activities
KU	Kelompok Usaha
ERM	Environmental Resources Management
HAD	Highland Agriculture Development
AAF	Amungme Agroforestry
KSM	Kelompok Swadaya Mandiri
SOP	Standar Operating Procedure
P3MD	Program Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat 5 Desa
KMBL	Koperasi Maria Bintang Laut
YBUM	YayasanBina Usaha Mandiri
KKN	Kuliah Kerja Nyata
VCT	Voluntary Counseling and Testing
DOTS	Direct Observed Treatment Shortcourse
BBM	Bahan Bakar Minyak
FCPA	Foreign Corrupt Practice Act
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KPI	Kuala Pelabuhan Indonesia
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
CFC	Chlorofluorocarbon
WHS	World Heritage Site (Situs Warisan Dunia)
SDS	Safety Data Sheet (Laporan Data Keselamatan)
CPHMC	Community Public Health & Malaria Control
HAM	Hak Asasi Manusia
Lapter	Lapangan Terbang
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan)

Independent Assurance Statement
Report No. 1212/BD/0164/JK

To the management of PT Freeport Indonesia

We were engaged by PT Freeport Indonesia ('PTFI') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2011 ('the Report'). The assurance has been carried out by a multi-disciplined assurance team with a broad range of skills and depth of experience, thus providing a high level of competency for the assurance engagement.

Independence

We were not involved in the preparation of any key part of the Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. We did not provide any services to PTFI during 2011 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards

We conducted our work in accordance with ISAE3000 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' issued by the International Auditing and Accounting Standards Board. In addition, we have also planned and carried out our work in accordance with AA1000AS (2008) 'AA1000 Assurance Standards (2008)', issued by AccountAbility.

Level of assurance and criteria used.

Our evidence-gathering procedures have been designed to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000 and a moderate level of assurance engagement as set out in AA1000AS (2008) in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to a very low but not to zero. The AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness has also been used as criteria to evaluate the Report.

Scope of Assurance

We provided Type 2 assurance engagement under AA1000AS (2008). This involved:

- 1) an assessment of PTFI's adherence to the AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008); and
- 2) an assessment of the accuracy and quality of the specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope. The scope of work consists of:
 - Community engagement and development program
 - Occupational health and safety
 - Waste management
 - Biodiversity.

Responsibility

PTFI is responsible for all information and claims contained in the Report, including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation, etc. Our responsibility in performing this engagement is to the management of PTFI only for the purposes of verifying its statements relating to its sustainability performance, more particularly as described in the agreed scope. Our responsibility is to express our conclusions in relation to the agreed scope.

Methodology

We have assessed several assertions and specified data sets included in the report and the systems and processes used to manage and report these using the following methods:

- Reviewed report, internal policies, documentation, management and information systems
- Carried out interviews with staff involved in sustainability-related management and reporting.
- Followed data trails to initial aggregated source and checked sample data to a greater depth during the engagement process.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information, and did not include any on-site validation of the mining site.

Conclusions

AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008)

Findings and conclusions concerning adherence to the AA1000 AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness include:

▪ Inclusivity

An assessment has been made to determine whether PTFI has included all key stakeholders in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability issues.

We found PTFI demonstrates a strong commitment to stakeholder inclusivity. PTFI has an effective system in place for key stakeholders to participate in the development of the organization's response in the context of sustainability. This is demonstrated for instance, by conducting needs assessment surveys in relation to the community development program. However, we recommend that PTFI continue to improve stakeholder inclusivity systems and procedures on a regular basis in order to maintain their effectiveness.

▪ Materiality

An assessment has been made as to whether PTFI has included in the Report the material information required by its stakeholders in order for them to be able to make informed judgments, decisions and actions.

We found PTFI has a strong process in place to determine material issues. Key material issues were adequately reported and found to provide balanced information about PTFI's sustainability performance. A range of internal stakeholders are involved in PTFI's materiality determination process. However, we recommend that PTFI continue to conduct materiality test on a regular basis in future reports.

▪ Responsiveness

An assessment has been made as to whether PTFI demonstrates that it responds to its stakeholders and is accountable to them.

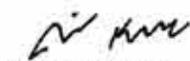
PTFI was found to be responsive to key stakeholder concerns and expectations. This was achieved through the organization's allocation of resources to stakeholder engagement, the timeliness and accessibility of reported information, and the types of communication mechanisms regularly employed. However, we recommend that PTFI continue to improve stakeholder engagement procedures on a regular basis in future reports.

Reliability of Sustainability Performance Information

Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the data of the Report has been materially misstated.

All key assurance findings are included herein, and detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to PTFI management in a separate report.

Jakarta, December 21, 2012



James Kallman
President Director



Mazars is an international, integrated and independent organization, specializing in audit and assurance, accountancy, tax, legal and advisory services. Mazars can rely on the skills of 13,000 professionals in the 61 countries that make up its integrated partnership in Europe, Africa, the Middle East, Asia Pacific, North America, Latin America and the Caribbean, whilst in Indonesia is served by PT Mazars, one of the leading sustainability assurance providers.



PT FREEPORT INDONESIA

Affiliate of Freeport-McMoRan Copper & Gold

PT FREEPORT INDONESIA

Plaza 89,
Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - Indonesia
Tel. 62-21 2591818, Fax. 62-21 2591945

Office Building I
Jl. Mandala Raya Selatan No. 1 Kuala Kencana, Timika 99920 - Indonesia
Tel: 62-901 432005, Fax. 62-901 432209



This report is printed on 100%
post-consumer recycled paper.



RECYCLED
Paper made from
recycled material
FSC® C002350



This report is printed on Mohawk Options,
100% PC White, which is manufactured entirely
with Green-e certified wind-generated electricity.